



# **RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

*Satu Perencanaan Jabar untuk Peningkatan Daya Saing,  
Kemandirian dan Kesiapan dalam Persaingan Global*



## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>I – 1</b>
1.1.	Latar Belakang .....	I – 1
1.2.	Landasan Hukum .....	I – 4
1.3.	Maksud dan Tujuan .....	I – 6
1.4.	Hubungan Antar Dokumen.....	I – 7
1.5.	Sistematika .....	I – 10
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2014 .....</b>	<b>II – 1</b>
2.1.	Gambaran Umum Wilayah .....	II – 1
2.1.1.	Aspek Fisik.....	II – 1
2.1.2.	Aspek Demografis.....	II – 11
2.1.3.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II – 15
2.1.4.	Aspek Pelayanan Umum.....	II – 22
2.1.5.	Aspek Daya Saing Daerah.....	II – 25
2.1.6.	Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II – 26
2.1.7.	Kinerja Pengembangan Wilayah.....	II – 32
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKD .....	II – 38
2.2.1.	Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2014 .....	II – 38
2.2.2.	Pencapaian Misi RPJMD .....	II – 60
2.3.	Permasalahan Pembangunan .....	II – 66
<b>BAB III</b>	<b>RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III – 1</b>
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III – 1
3.1.1.	Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat .....	III – 1
3.1.2.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 .....	III – 10
3.1.2.1.	Global dan Nasional .....	III – 10
3.1.2.2.	Jawa Barat .....	III – 11
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III – 18
3.2.1.	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....	III – 18
3.2.2.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III – 21
3.2.3.	Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III – 23
3.2.4.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III – 27
3.3.	Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	III – 30
3.3.1.	APBN .....	III – 30

3.3.2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) .....	III – 33
3.3.2.1. Kebijakan Fasilitasi TJSLP dan PKBL Provinsi Jawa Barat.....	III – 33
3.3.2.2. Realisasi Program TJSLP/PKBL Jawa Barat Tahun 2014 .....	III – 33
3.3.3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) .....	III – 38
<b>BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>IV – 1</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV – 1
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah .....	IV – 34
4.2.1. Isu Strategis .....	IV – 35
4.2.2. Program Pembangunan Daerah .....	IV – 43
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH .....</b>	<b>V – 1</b>
5.1. Rencana Program dan Kegiatan Tematik .....	V – 2
5.1.1. Rencana Program dan Kegiatan Tematik Sektoral .....	V – 3
5.1.2. Rencana Program dan Kegiatan Tematik Kewilayahan .....	V – 30
5.1.3. Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Di Jawa Barat .....	V – 31
5.2. Rencana Program dan Kegiatan <i>Non Common Goals</i> (Non Tematik) .....	V – 32
5.3. Matrik Rencana Program dan Kegiatan .....	V – 33
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>VI – 1</b>
6.1. Kaidah Pelaksanaan .....	VI – 1
6.2. Tindak Lanjut .....	VI – 2

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Proses pembangunan nasional dirancang agar dalam implementasinya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Rancangan tersebut dituangkan ke dalam produk rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun), dan rencana tahunan. Berbagai sumber daya dilibatkan agar setiap produk rencana yang dihasilkan memiliki peran maksimal sebagai kendali pembangunan yang bersifat spesifik, terukur, dan akuntabel. Khususnya pembangunan tahunan harus disusun dalam rangkaian prioritas tahunan yang saling bersinergi untuk mewujudkan proses membangun yang selalu berlanjut selama rentang waktu 5 (lima) tahunan.

Berdasarkan Perencanaan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018, posisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 berada pada tahap pengembangan untuk memantapkan Pembangunan secara menyeluruh sebagai upaya menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat dalam berbagai bidang. Hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran dan dapat mempertanggungjawabkan proses pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat.

RKPD Tahun 2016 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah beserta upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat. Selain daripada itu, RKPD Tahun 2016 juga merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2016.

Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang mana memuat arah kebijakan umum RPJMN Tahun 2015-2019 yaitu, 1. *Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.* 2. *Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.* 3. *Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.* 4. *Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan*

*reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia*

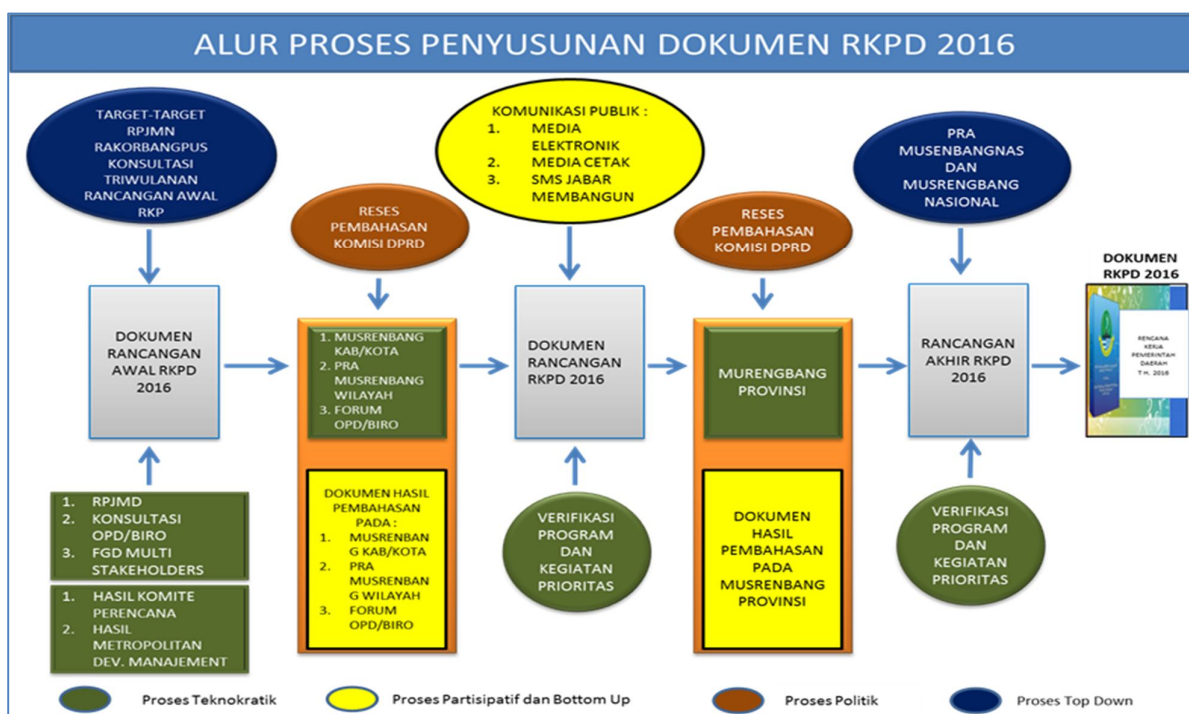
Provinsi Jawa Barat memiliki tantangan yang besar dalam proses pembangunan mengingat kedudukannya sebagai provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia yaitu 18,28% dari 255.461.70 ribu jiwa pada tahun 2015 (BPS Pusat; data proyeksi penduduk menurut provinsi) dengan laju pertumbuhan penduduk yang juga tinggi. Jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2014 sebesar 46.029.66 ribu jiwa berdasarkan proyeksi BPS, mengalami peningkatan 1,5% dari tahun sebelumnya yaitu 45.340.79 ribu jiwa pada tahun 2013. Laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat rata-rata 1,64% setiap tahunnya (Pusdalishang; Januari 2014). Hal ini memberikan konsekuensi terhadap penyediaan dan peningkatan layanan publik beserta petugasnya, perumahan, jalan, transportasi massa, pemenuhan pangan dan lain sebagainya.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA), dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b) Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- c) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- d) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- e) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
- f) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- g) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan

sumberdaya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

Diagram Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.1**  
**Bagan Alur Proses Penyusunan RKPD**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2016**

Perencanaan pembangunan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan yang meliputi dialog, koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi multi pihak. Format proses perencanaan pembangunan berbasis multi pihak dilaksanakan dengan menerapkan Prinsip Kerja JABAR MASAGI yang merupakan pengembangan dari Triple Helix, sehingga mampu menggambarkan pelibatan aktif 4 (empat) aktor pembangunan yaitu : (1) Pemerintahan, (2) Dunia Usaha, (3) Akademisi, dan (4) Komunitas berbasis masyarakat; dengan landasan dan kendali Peraturan Perundang-undangan/Law and Regulations; serta didukung piranti lunak level Decision Support System (DSS) yaitu RKPD JabarOnline-2101.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan



- Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Dokumen RKPD Tahun 2016 disusun dengan maksud sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2016. Adapun tujuannya sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat;
- 2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- 3) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas; serta
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

## **1.4 Hubungan Antar Dokumen**

RKPD Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan makro tahunan yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang SISRENBANGDA. Penyusunan RKPDTahun2016 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Dokumen RKPD Tahun 2016 selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPDTahun 2016, RKPD Kabupaten/KotaTahun 2016, dan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016.

## **1.5 Sistematika**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Menjelaskan tentang latar belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

#### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Menjelaskan tentang hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

#### **1.4. Sistematika**

Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

#### **1.5. Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CARA PENCAPAIAN KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2013-2014**

### **2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014.

### **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD Tahun 2013-2018**

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 serta pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

### **2.3 Permasalahan Pembangunan**

Menjelaskan dan melakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah serta Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD Tahun 2013-2018.

## **BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2016**

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2015, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2016.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2016 serta pendanaan pembangunan lainnya.

## **BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Menjelaskan Visi dan Misi yang mencakup tujuan sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan indikator.

#### 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Menjelaskan isu strategis, prioritas pembangunan daerah yang berasal dari program pembangunan daerah RPJMD Tahun 2013 – 2018 pada Tahun berkenaan, serta *common goals* (tematik sektoral dan kewilayahan), perbatasan antar Provinsi, MDGs, Inpres No 3 Tahun 2010.

#### 4.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota

Menjelaskan prioritas pembangunan setiap Kabupaten/Kota.

### **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016**

Mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD Tahun 2016 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD serta pagu indikatifnya.

### **BAB VI. PENUTUP**

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada bagian ini juga memuat antara lain:

- a. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di OPD dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Kewenangan serta peran/tanggung jawab/tugas OPD;
- b. Peranan *stakeholder* pembangunan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan RKPD;
- c. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan APBD;
- d. Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RKPD.

## **1.6 Maksud dan Tujuan**

Dokumen RKPD Tahun 2016 disusun dengan maksud sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2016. Adapun tujuannya sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat;
- 2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- 3) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas; serta
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

## **BAB II**

# **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2014**

### **2.1. Gambaran Umum Wilayah**

#### **2.1.1. Aspek Fisik**

##### **a. Letak Geografis**

Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah daratan seluas 3.709.528,44 hektar dengan garis pantai sepanjang 724,85 km. Secara Geografis Provinsi Jawa Barat terletak pada posisi 104°48" - 108°48" Bujur Timur dan 5°50" - 7°50" Lintang Selatan dengan batas wilayahnya meliputi:

- a. Sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Sebelah timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sebelah selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- d. Sebelah barat, berbatasan dengan Provinsi Banten.

Secara administratif pemerintahan, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 kota, yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Pangandaran serta Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Kota Banjar.

Beberapa fakta mengenai kondisi geografis/fisik dasar Jawa Barat dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **b. Curah Hujan dan Sumber Daya Air**

Jawa Barat memiliki curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 2000-4000 mm/tahun dan memiliki potensi sumber daya air khususnya air permukaan mencapai rata-rata 48 Milyar m<sup>3</sup>/tahun dalam kondisi normal. Potensi tersebut baru dimanfaatkan sekitar 50% atau 24 Milyar m<sup>3</sup>/tahun, sedang sisanya langsung terbuang ke laut.

Potensi sumber daya air tersebut mengalir pada 5 (lima) Wilayah Sungai (WS) yang terbagi dalam 41 Daerah Aliran Sungai (DAS) atau sekitar 2.745 buah sungai induk dan anak-anak sungainya. Peta pembagian WS dapat dilihat pada Gambar 1.10, dan peta DAS dapat dilihat pada Gambar 1.11. Sekitar 35,9 Milyar m<sup>3</sup>/tahun (75%) dari jumlah potensi tersebut mengalir pada 2.078 buah sungai yang secara geografis lintas kabupaten/kota, sedangkan sisanya yaitu 12,1 Milyar m<sup>3</sup>/tahun (25%) berada pada 1.170 buah sungai. Potensi air permukaan dan luas setiap wilayah sungai yang terdapat di Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel 1.9.

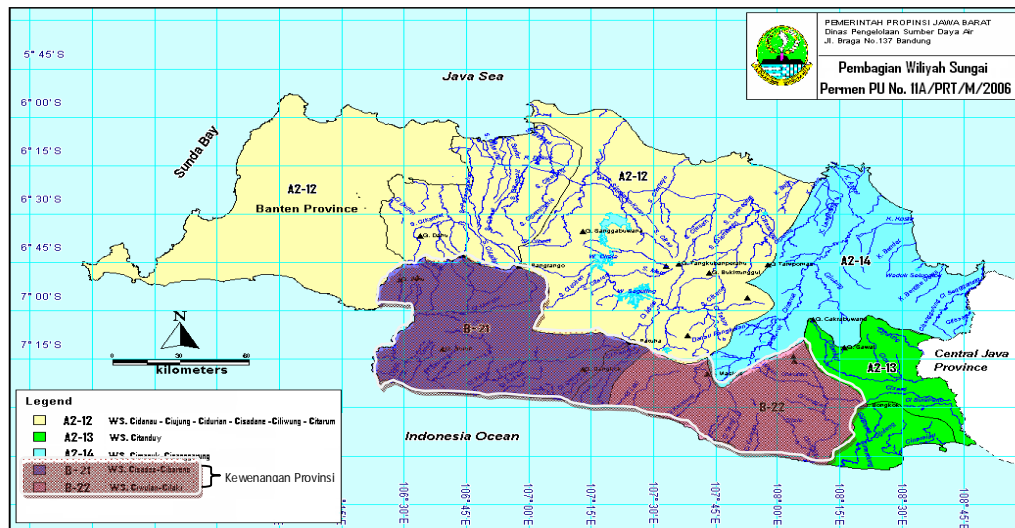
Wilayah Sungai di Jawa Barat, sesuai penetapan wilayah sungai, terbagi dalam 2 wewenang dan tanggung jawab, terdiri atas :

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah :

1. Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum.
2. Cimanuk-Cisanggarung.
3. Citanduy.

■ Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi:

1. Ciwulan-Cilaki.
2. Cisadea-Cibareno.



**GAMBAR 2.1**  
**PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI**



**GAMBAR 2.2.**  
**PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI**



**TABEL 2.1**  
**POTENSI DAN LUAS WILAYAH SUNGAI MENURUT KEWENANGAN**

No	Wilayah Sungai	Luas (Km2)	Juta m <sup>3</sup> / tahun		
			Lintas Prov./ Kab./Kota	Lokal Kab./Kota	Total
1.	Cidanau-Ciujung- Cidurian-Cisadane- Ciliwung-Citarum	15.810,3	16.367,06	2.095,99	18.463,06
2.	Cimanuk- Cisanggarung	6.972,80	7.572,64	305,43	7.878,07
3.	Citanduy	8.033,70	7.069,50	3.625,68	10.695,19
4.	Ciwulan-Cilaki				
5.	Cisadea-Cibareno	8.813,06	4.908,71	6.078,76	10.987,47
Total		39.629,86	35.917,91	12.105,86	48.023,77

Sumber : Dinas PSDA dan Hasil Analisis, 2008

### c. Pesisir dan Laut

Secara geografis wilayah pesisir dan laut Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah pantai utara (Pantura) dan wilayah pantai selatan (Pansela). Panjang pantura adalah 417,5 km, dan panjang pansela adalah 399,32

km, sehingga luas wilayah lautan Jawa Barat sampai wilayah 12 mil laut adalah 18.153 km<sup>2</sup>.

Kondisi fisik dasar pesisir utara Jawa Barat yang terdiri dari dataran pantai dan rawa alluvial pantai dengan kemiringan lereng 0%-5%, merupakan daerah yang bertopografi landai, perairan dangkal, memiliki substrat lumpur, berpasir dan berawa, pola arus yang dipengaruhi arus laut Jawa, serta bervegetasi mangrove dan terumbu karang. Sungai-sungai yang bermuara ke pantura diantaranya Sungai Cimanuk, Cipunagara, Citarum, Kali Bekasi, Pagadungan, Cilamaya, Ciasem, Kali Beji, Cipanas, Cimanggis, Ciwaringin, Kali Bunder, Bangkaderes, dan Cisanggarung. Perairan laut relatif tenang menjadi lingkungan yang kondusif bagi perkembangan wilayah, dimana aktivitas sosial dan pertumbuhan ekonomi relatif berkembang cukup pesat.

Sementara di pesisir selatan, kondisi yang berbukit dengan seismisitas relatif tinggi, bertopografi terjal, perairan dalam, memiliki substrat pasir dan karang, pola arus dipengaruhi arus Samudera Hindia, dan vegetasi cenderung berupa hutan pantai dan mangrove. Batimetri pantai umumnya curam dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, sehingga timbul gelombang laut yang besar, kadang dapat timbul gelombang badai (2-5 m), serta arus laut yang relatif kuat, menjadi faktor kendala di dalam pengembangan wilayah. Selain itu pemanfaatan pelayaran memerlukan tingkat keamanan yang cukup tinggi. Perbedaan kondisi fisik tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi ketimpangan perkembangan wilayah antara pesisir utara dan selatan. Sungai-sungai yang bermuara ke pangsela diantaranya Sungai Citepus, Cimandiri, Cikaso, Cibuni, Cisokan, Cisadea, Ciujung, Cipandak, Cilaki, Cikandang, Cipalebuh, Cikaengan, Cisanggiri, Cipatujah, Ciwulan, Cimedang, Cijulang, dan Citanduy. Selain itu, wilayah Pangsela ini terletak di Lempeng Eurasia dan Lempeng Australia yang merupakan zona aktif gempa dan berpotensi bencana tsunami. Ancaman lainnya adalah gelombang laut pasang, akresi dan abrasi, sedimentasi yang besar di muara-muara sungai yang menyebabkan pendangkalan, penyumbatan aliran sungai, rawan banjir bandang, erosi sungai, dan terbentuknya delta baru. Abrasi yang telah terjadi sejak lama terdapat di Teluk Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

Wilayah pesisir dan laut Jawa Barat memiliki pulau-pulau kecil, di pesisir selatan pesisir Pulau Nusamanuk dan Batukolotok serta di pesisir utara yaitu Gugusan Pulau Biawak.

#### d. Pertambangan

Jawa Barat memiliki potensi bahan galian (mineral) yang beraneka ragam dan tersebar di 17 (tujuh belas) Kabupaten. Bahan galian meliputi bahan galian mineral logam, mineral industri, dan bahan galian konstruksi. Bahan galian mineral logam (*base metal*) yang ada di Jawa Barat antara lain emas, timbal (timah hitam), besi (bijih besi dan pasir besi) dan mangan. Bahan galian industri antara lain barit, batuapung, batugamping, belerang, bentonit, *bond clay*, *chert* (rijang), diatomea, dolomit, felspar, fosfat, gipsum, jasper, kalsedon, kalsit, kaolin, lempung, marmer, obsidian, oker, oniks, pasir kuarsa, perlit, toseki, dan zeolit. Sedangkan bahan galian konstruksi antara lain batu andesit, pasir, sirtu, tanah urug dan lain-lain. Peta potensi mineral dan bahan tambang dapat dilihat pada Gambar 2.3.

**GAMBAR 2.3.**  
**PETA POTENSI MINERAL DAN BAHAN TAMBANG PROVINSI JAWA BARAT**



Sebaran beberapa jenis sumber daya bahan galian mineral logam di Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.3.

**Tabel 2.2.**  
**Sebaran Beberapa Komoditi Mineral (Logam Dasar)**

<b>Jenis Mineral</b>	<b>Kecamatan/Kabupaten</b>	<b>Keterangan</b>
Emas	Nanggung dan Leuwiliang Kab. Bogor.	Merupakan urat kuarsa pada zona sesar.
	Ciomas, Ciracap, Pelabuhan Ratu, Warung Kiara, Cikidang, dan Tegal Buleud Kab. Sukabumi.	Merupakan urat kuasa pada zona sesar maupun akibat terobosan andesit basal pada Formasi Jampang.
	Cibeber, Kab. Cianjur	Merupakan urat kuarsa pada andesit tua terpropilitkan
	Sukatani dan Campaka, Kab. Purwakarta	Merupakan urat kuarsa
	Kec. Cililin, Kab. Bandung	Urat sulfida pada andesit terpropilitkan.
	Kec. Salopa, Pancatengah, Cineam Kab. Tasikmalaya	Merupakan endapan placer (Kec. Salopa), stockwork pada batuan andesit dan breksi gunungapi (Kec. Pancatengah), urat kuarsa yang berkembang dalam tuff Formasi Jampang (Kec. Cineam).
Timbal	Kec. Jasinga dan Cigudeg Kab. Bogor	Merupakan endapan hidrothermal.
Tembaga	Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya	Urat kuarsa pada granit-granodiorit, tuf dan breksi, dan berasosiasi dengan timbal dan seng
	Kec. Ciamis, Ciamis	Urat kuarsa pada andesit, berasosiasi dengan timbal dan seng
Alumunium	Kec. Pangalengan, Kab. Bandung	Terbentuk oleh kegiatan vulkanik pada andesit di bawah kaldera.
Mangan	Kec. Karangnunggal, Pancatengah, dan Cikatomas, Kab. Tasikmalaya	Bijih mangan terdapat pada lapisan batugamping berbentuk lensa-lensa, serta adanya pengayaan supergen.
Besi Titan	Kec. Ciracap, Surade, dan Pelabuhan Ratu Kab. Sukabumi, Kec. Cibuaya Kab. Karawang, Kec. Sindang Barang Kab. Cianjur, Kec. Pamanukan Kab. Subang, Kec. Cipatujah, Bantarkalong, Cikalong Kab. Tasikmalaya, Kec. Cijulang & Pangandaran Kab. Ciamis.	Umumnya merupakan endapan pasir pantai yang mengandung ilmenit dan magnetit.
Besi	Kec. Sindangbarang Kab. Cianjur, Kec. Cisalak Kab. Subang, Kec. Pamengpeuk Kab. Garut	Berupa limonit dan hematit sedimenter, serta endapan pasir besi.
Seng	Kec. Sukatani, Kab. Purwakarta	Berupa endapan primer yang berupa urat-urat yang terdapat pada batuan andesit.

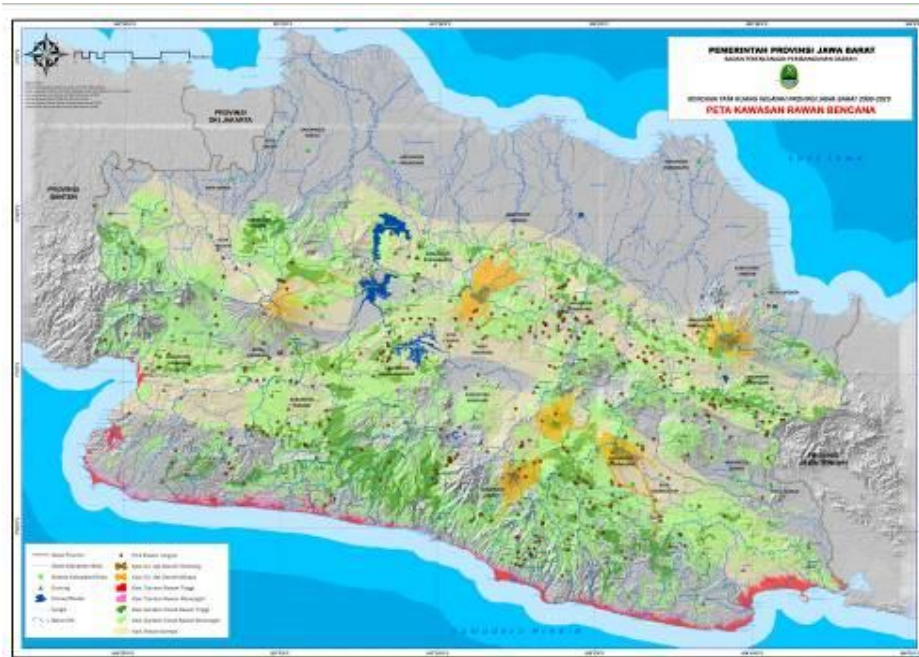
Sumber : Direktorat Sumber daya Mineral, 1994

#### **e. Kebencanaan**

Struktur geologi yang bersifat kompleks menjadikan sebagian wilayah Jawa Barat memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dari ancaman bencana alam. Sumber-sumber potensi penyebab bencana alam di Jawa Barat yang perlu diwaspadai adalah 7 (tujuh) gunung api aktif, 5 (lima) sesar aktif serta aktivitas lempeng tektonik di selatan Jawa Barat. Sumber penyebab bencana lainnya adalah tingginya

intensitas curah hujan yang memicu gerakan tanah terutama di wilayah Jawa Barat bagian selatan, serta banjir di wilayah pantai utara dan Cekungan Bandung. Kawasan rawan bencana dapat dilihat pada Gambar 2.4.

**GAMBAR 2.4.**  
**PETA KAWASAN RAWAN BENCANA**

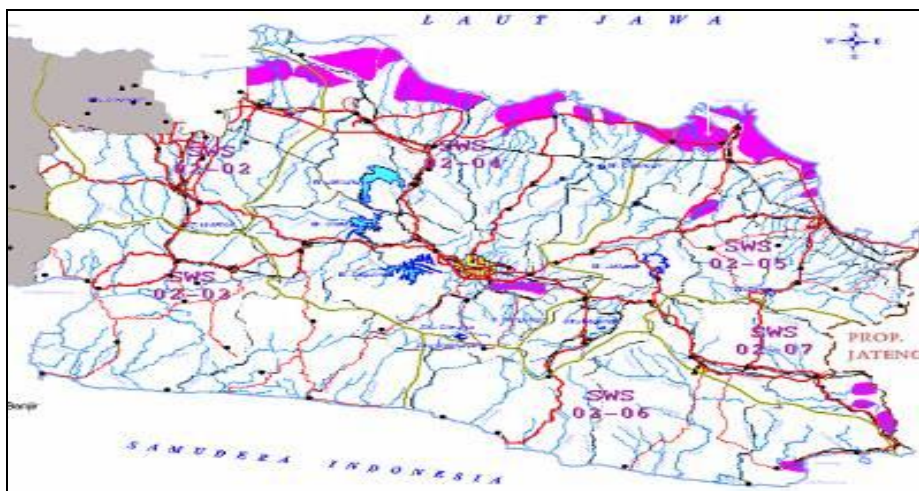


Bahaya lingkungan beraspek geologi yang sering terjadi di Jawa Barat antara lain masalah kegempaan, letusan gunungapi dan aliran lahar, longsor (gerakan tanah), perubahan garis pantai dan Erosi tebing sungai. Jawa Barat secara geologi terletak disebelah utara lajur pertemuan dua lempeng aktif yang saling bertumbukan. Kedua lempeng tektonik yang saling bertumbukan tersebut yaitu lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eropa-Asia. Tumbukan ini mengakibatkan Jawa Barat sering merasakan getaran dan di landa gempa bumi tektonik serta letusan gunung api.

Bencana gempabumi guncangan tanah menempati urutan pertama sebagai bencana perusak, diikuti oleh gerakan tanah dan pelulukan. Patahan permukaan dan tsunami sangat jarang terjadi disebabkan kekuatan gempabumi di Jawa Barat umumnya lebih kecil dari 6 pada Skala Richter. Gempabumi tektonik Jawa Barat berasal dari dua sumber yakni sumber gempabumi penunjaman dan sumber gempabumi sesar aktif. Bencana dan risiko yang diakibatkan oleh kedua sumber



**GAMBAR 2.5.**  
**PETA SEBARAN DAERAH RAWAN BANJIR**



Bencana gerakan tanah (tanah longsor) merupakan peristiwa alam yang seringkali mengakibatkan banyak kerusakan, baik berupa kerusakan lingkungan maupun kerusakan prasarana dan sarana fisik hasil pembangunan, serta menimbulkan kerugian yang tidak sedikit baik berupa harta benda maupun korban jiwa manusia. Jabar Selatan merupakan salah satu daerah yang sangat rawan terhadap gerakan tanah, hampir setiap mengalami bencana gerakan tanah dan menimbulkan kerusakan yang cukup besar.

Pada umumnya bencana tanah longsor dipicu oleh turunnya curah hujan yang cukup tinggi, disamping kondisi kelerengan lahan yang cukup terjal dan tidak tertutup oleh vegetasi serta sifat batuan atau tanah yang cukup sensitif terhadap kondisi keairan. Secara umum, daerah potensi longsor di Jawa Barat dapat dirangkum seperti terlihat pada tabel 2.3.

**TABEL 2.3.**  
**DAERAH RAWAN LONGSOR**

No	Potensi Longsor	Lokasi
1	Menengah – Tinggi	Bogor (Jonggol, Citeureup, Nanggung), Sukabumi (Tegalbeuleud, Cidolog, Sagaranten, Jampang Tengah, Palabuhanratu, Parung Kuda), Cianjur (Pacet, Sukaresmi, Pagelaran, Tanggeung, Kadupandak, Cibinong, Argabintang, Naringgul, Campaka, Cibeber), Bandung (Gununghalu), Garut (Palegong, Cisewu, Pakenjeng, Cisompet), Purwakarta (Wanayasa, Sukatani, Plered), Subang (Sagalaheang), Sumedang (Tomo, Cadasngampar, Paseh, Congeang, Buah Dua, Tanjungkerta, Cibugel), Tasikmalaya (Bantarkalong, Sodonghilir, Cibalong, Taraju, Salawu, Salopa, Cikatomas), Ciamis (Langkaplancar, Tambaksari, Cisaga, Panawangan), Majalengka (Talaga, Maja, Rajagaluh, Argapura, Sukahaji, Majalengka, Bantarujeg), Kuningan (Mandirancan, Cilimus, Subang, Selajambe, Cidahu), Cirebon (Palimanan, Sumber, Karangsembung, Ciwaringin)
2	Menengah	Bogor (Caringin, Cariu), Sukabumi (Cibadak, Nyalindung), Cianjur (Pacet, Sukaresmi, Pagelaran, Tanggeung, Kadupandak, Cibinong, Argabinta, Naringgul, Campaka, Cibeber), Bandung (Rongga, Cililin, Cipongkor, Parongpong, Pangalengan, Arjasari, Cipatat), Garut (Bungbulang, Bayongbong, Banjarwangi), Purwakarta (Bojong, Jatiluhur), Subang (Cisalak, Cijambe), Sumedang (Wado, Sumedang Selatan), Tasikmalaya (Pager Ageung), Ciamis (Cihaubeuti), Majalengka (Lemah Sugih), Kuningan (Ciniru, Ciwaru), Cirebon (Beber, Waled, Sedong)

Sumber : Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (2005).

Sedangkan BNPB menetapkan skor indeks resiko bencana tanah longsor pada semua wilayah administratif di Jawa Barat dengan rincian pada tabel 2.4.berikut.

**Tabel 2.4.**  
**Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor Provinsi Jawa Barat**

No	Peringkat Nasional	Kab/Kota	Skor	Kelas Resiko	Ket
1.	1	Kab. Garut	36	Tinggi	
2.	53	Kab. Bogor	24	Tinggi	
3.	54	Kab. Bandung	24	Tinggi	
4.	56	Kab. Sukabumi	24	Tinggi	

No	Peringkat Nasional	Kab/Kota	Skor	Kelas Resiko	Ket
5.	58	Kab. Cianjur	24	Tinggi	
6.	60	Kab. Tasikmalaya	24	Tinggi	
7.	63	Kab. Ciamis	24	Tinggi	
8.	64	Kab. Bandung Barat	24	Tinggi	
9.	67	Kab. Subang	24	Tinggi	
10.	72	Kab. Majalengka	24	Tinggi	
11.	75	Kab. Sumedang	24	Tinggi	
12.	77	Kab. Kuningan	24	Tinggi	
13.	90	Kab. Purwakarta	24	Tinggi	
14.	152	Kota Sukabumi	24	Tinggi	
15.	274	Kota Bandung	22	Tinggi	
16.	301	Kab. Bekasi	12	Tinggi	
17.	302	Kab. Cirebon	12	Tinggi	
18.	303	Kab. Karawang	12	Tinggi	
19.	306	Kab. Indramayu	12	Tinggi	
20.	409	Kota Banjar	12	Sedang	
21.	451	Kota Bogor	12	Sedang	
22.	460	Kota Bekasi	11	Sedang	
23.	464	Kota Depok	11	Sedang	
24.	474	Kota Cirebon	11	sedang	

Sumber: IndeksResikoBencanaIndonseia BNPB 2013

Erosi pada tebing sungai terdapat berupa longsor dan runtuh. Umumnya terjadi pada alur sungai yang membelok. Erosi terjadi pada tebing busur luar tikungan yang selalu dihantam oleh kekuatan arus air sungai. Pada daerah dataran lanjutan proses erosi ini membentuk meander. Selain dari itu perbuatan manusia dapat pula mempercepat proses erosi tersebut seperti di sekitar lokasi penambangan batu kali. Seperti terlihat pada sungai Cimandiri di daerah Sukabumi dimana telah mengancam dan menghancurkan rumah penduduk yang berlokasi di tepi sungai. Pengambilan bongkahan batu kali dapat mempercepat arus sungai, sehingga kekuatan arus menghantam tebing lebih kuat dan terjadi lekukan pada kaki tebing sungai.

Daerah Jabar Selatan secara geologis rentan terhadap bencana alam pesisir, seperti Tsunami. Walaupun jarang terjadi, namun daya hancurnya yang besar



membuatnya harus diperhitungkan. Tsunami umumnya disebabkan oleh gempabumi dasar laut. Sekitar 70% gempabumi tektonik terjadi di dasar laut yang berpotensi menyebabkan tsunami (tsunamigenik). Kriteria terjadinya tsunami adalah magnituda gempa harus lebih besar dari 6 skala Richter, gerakan kulit bumi ke arah atas (up thrusting) dan kedalaman gempabumi kurang dari 80 kilometer, memiliki topografi dasar laut relatif landai (lebih kecil dari 600). Jarak sumber gempa terhadap pantai di semua kelompok pantai rata-rata kurang dari 300 kilometer, sedangkan kecepatan rambat tsunami mencapai 600-700 kilometer per jam, maka tsunami datang dengan amat cepat. Kurang dari setengah jam setelah gempa mengguncang. Untuk memperkecil resiko tersebut yang perlu dilakukan adalah mengembangkan manajemen bencana alam terutama pada tahap mitigasi bencana yang dikaitkan dengan rencana tata ruang yang didasarkan pada peta rawan bencana alam.

### 2.1.2. Aspek Demografis

Kondisi demografis Jawa Barat secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 adalah sebanyak 46.029,6 ribu jiwa meningkat sekitar 0,985% dari tahun sebelumnya. Sementara itu dilihat dari laju pertumbuhannya, penduduk Jawa Barat mengalami penurunan dari 1,77% pada Tahun 2013 menjadi 1,52% pada Tahun 2014. Berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk Jawa Barat pada Tahun 2014 antara laki laki dengan perempuan adalah 49 % : 51%.

**Tabel 2.5.**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat 2013 - 2014**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
			2013	2014
	<b>Demografi</b>			
	a. Jumlah Penduduk	jiwa	45.340,8*	46.029,6*
	a.1 Laki-laki	jiwa	23.004,3*	23.345,3*
	a.2 Perempuan	jiwa	22.336,5*	22.684,3*
	b. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	persen	1,77	1,52
	c. Kepadatan Penduduk	jiwa per km <sup>2</sup>	1.222	1.236

\*) dalam ribuan

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat.

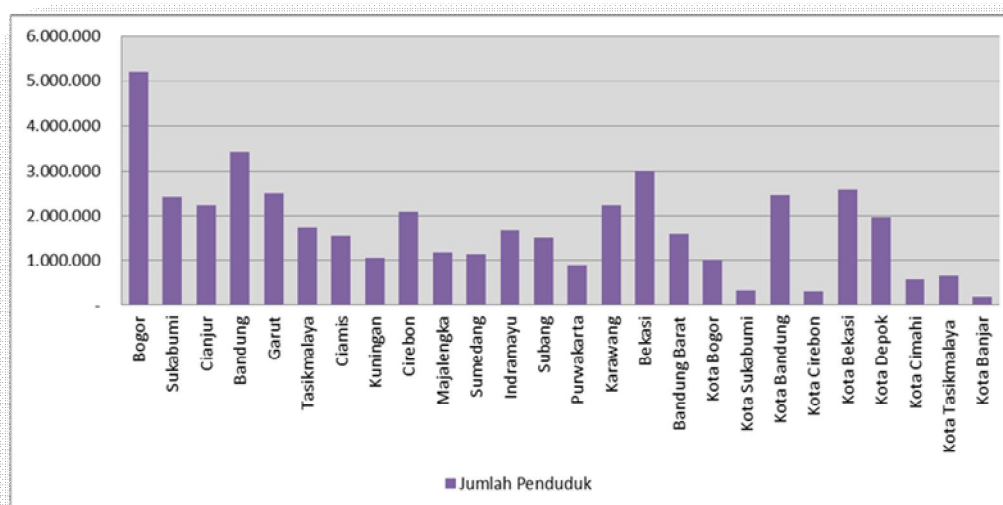
Berdasarkan sebaran pada wilayah administratif, Kabupaten Bogor mempunyai penduduk terbanyak yaitu sebanyak 11,47%, sementara yang paling sedikit adalah Kota Banjar dengan prosentase sebanyak 0,40% dari total jumlah penduduk Jawa Barat. Sedangkan berdasarkan tingkat kepadatan, Kota Bandung merupakan kota terpadat disusul oleh Kota Cimahi dan Kota Bekasi. Untuk jumlah penduduk setiap kabupaten/kota beserta kepadatannya dapat dilihat pada tabel 2.6.

**Tabel 2.6.**  
**Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk**  
**Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2013**

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Km2)	% Terhadap Luas Jawa Barat	Jumlah Penduduk	% Terhadap Penduduk Total Jawa Barat	Kepadatan Penduduk (Orang/Km2 )
<b>Kabupaten</b>						
01.	Bogor	2997,13	8,06	5202097	11,47	1.735,69
02.	Sukabumi	4160,75	11,19	2408417	5,31	578,84
03.	Cianjur	3594,65	9,67	2225313	4,91	619,06
04.	Bandung	1756,65	4,73	3405475	7,51	1.938,62
05.	Garut	3094,40	8,32	2502410	5,52	808,69
06.	Tasikmalaya	2702,85	7,27	1720123	3,79	636,41
07.	Ciamis	2740,76	7,37	1541600	3,40	421,59
08.	Kuningan	1189,60	3,20	1042789	2,30	876,59
09.	Cirebon	1071,05	2,88	2093075	4,62	1.954,32
10.	Majalengka	1343,93	3,62	1170505	2,58	870,96
11.	Sumedang	1560,49	4,20	1125125	2,48	721,01
12.	Indramayu	2092,10	5,63	1672683	3,69	799,52
13.	Subang	2164,48	5,82	1496886	3,30	691,57
14.	Purwakarta	989,89	2,66	898001	1,98	907,17
15.	Karawang	1914,16	5,15	2225383	4,91	1.162,59
16.	Bekasi	1269,51	3,42	3002112	6,62	2.364,78
17.	BandungBarat	1335,60	3,59	1588781	3,50	1.189,56
<b>Kota</b>						
18.	Bogor	111,73	0,30	1013019	2,23	9.066,67
19.	Sukabumi	48,96	0,13	311822	0,69	6.368,91
20.	Bandung	168,23	0,45	2458503	5,42	14.613,9
21.	Cirebon	40,16	0,11	301728	0,67	7.513,15
22.	Bekasi	213,58	0,57	2570397	5,67	12.034,8
23.	Depok	199,44	0,54	1962182	4,33	9.838,46
24.	Cimahi	41,20	0,11	570991	1,26	13.859,0
27.	Tasikmalaya	184,38	0,50	651676	1,44	3.534,42
26.	Banjar	130,86	0,35	179706	0,40	1.373,27
<b>JawaBarat</b>		<b>37173,97</b>	<b>100,00</b>	<b>45340799</b>	<b>100,00</b>	<b>1.219,69</b>

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka 2014 (BPSProvinsiJawaBarat)

Gambar 2.6.  
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat



Berdasarkan kondisi ketenagakerjaan (Tabel 2.7.) dapat terlihat bahwa ada trend peningkatan jumlah penduduk usia kerja bertambah sebanyak kurang lebih 1,28 juta orang pada Tahun 2014, trend yang sama juga berlaku untuk penduduk angkatan kerja dan penduduk bekerja walaupun kenaikannya dibawah satu juta orang. Sementara untuk penganggur (mencari kerja), tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka mengalami trend penurunan dari Tahun 2013 ke 2014.

Tabel 2.7.  
Data Ketenagakerjaan Jawa Barat Tahun 2013 - 2014

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2013	2014
	<b>Ketenagakerjaan</b>			
a.	Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas)	juta orang	32,19	33,47
b.	Penduduk Angkatan Kerja	juta orang	20,28	21,01
c.	Penduduk Bekerja (15 tahun ke atas)	juta orang	18,41	19,23
d.	Penganggur (Mencari Kerja)	juta orang	1,87	1,78
e.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persen	63,01	62,77
f.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	9,22	8,45
g.	Serapan Tenaga Kerja	orang		477.046
h.	Jumlah Wirausahawan	orang		19.436

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan status pekerjaan utama, secara presentase status pekerjaan utama penduduk Jawa Barat sebagian besar masih merupakan buruh/karyawan (42,45%) walaupun secara jumlah mengalami penurunan. Penurunan tersebut berimplikasi kepada kenaikan jumlah untuk beberapa status pekerjaan utama lainnya (lihat Tabel 2.8). Hal ini mengindikasikan adanya perpindahan status utama pekerjaan dikarenakan berbagai hal.

**Tabel 2.8.**  
**Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas Yang Bekerja**  
**Menurut status pekerjaan utama Tahun 2013 - 2014**

Status Pekerjaan Utama	Kondisi			
	Aug-13		Aug-14	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Berusaha Sendiri	3.129.504	17,00	3.469.999	18,04
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	2.412.449	13,10	2.631.805	13,69
Berusaha dibantu buruh tetap	618.909	3,36	680.679	3,54
Buruh / Karyawan	7.974.437	43,31	8.163.001	42,45
Pekerja Bebas	2.726.597	14,81	2.727.615	14,18
Pekerja Keluarga	1.552.088	8,43	1.557.844	8,10
<b>Total</b>	<b>18.413.984</b>	<b>100</b>	<b>19.230.943</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

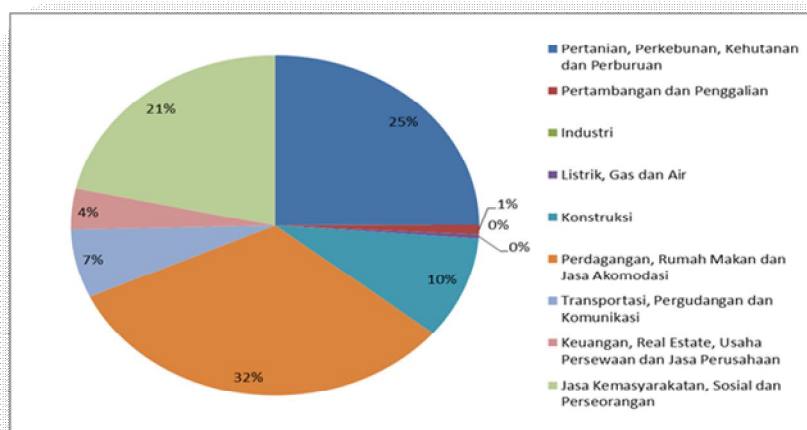
Berdasarkan lapangan pekerjaan utama (Tabel 2.9.), dalam kurun waktu 2013 – 2014 terjadi trend penurunan jumlah penduduk yang bekerja pada 7 (tujuh) sektor termasuk industri dan pertanian. Walaupun secara prosentase (Gambar 2.7), kedua sektor tersebut masih merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbanyak. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja pada sektor industri dan pertanian mengalami penurunan. Sementara itu untuk sektor keuangan dan jasa terjadi peningkatan walaupun masih dibawah 1 (satu) %.

**Tabel 2.9.**  
**Jumlah Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang bekerja**  
**menurut lapangan pekerjaan utama Tahun 2013 – 2014**

Lapangan Pekerjaan Utama	Kondisi			
	Aug-13		Aug-14	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perburuan	3.670.614	19,93	3.821.320	19,87
Pertambangan dan Penggalian	138.372	0,75	142.371	0,74
Industri	3.916.702	21,27	3.902.850	20,29
Listrik, Gas dan Air	63.150	0,34	59.651	0,31
Konstruksi	1.265.248	6,87	1.485.424	7,72
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	4.718.798	25,63	4.926.566	25,62
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1.027.045	5,58	1.000.908	5,20
Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	538.391	2,92	600.262	3,12
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan	3.075.664	16,70	3.291.591	17,12
<b>Total</b>	<b>18.413.984</b>	<b>100</b>	<b>19.230.943</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

**Gambar 2.7.**  
**Prosentase Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang bekerja**  
**menurut lapangan pekerjaan utama Tahun 2014**



### 2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 2.1.3.1. Kondisi Umum Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi

peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan rata-rata pengeluaran riil per kapita (daya beli). Pencapaian IPM Tahun 2014 sebesar 74,28 poin menjadikan Provinsi Jawa Barat termasuk kategori/kelas pembangunan manusia menengah ke atas (UNDP; nilai IPM 66-80 termasuk kategori/kelas pembangunan manusia menengah ke atas). Selama kurun waktu Tahun 2013-2014 komponen indeks pendidikan, indeks kesehatan dan daya beli mengalami peningkatan.

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2013-2014**

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
		2013	2014
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :</b>	poin	73,58	74,28 ***
a. Indeks Kesehatan (IK)	poin	73,06	74,01 <sup>1)</sup>
a.1 Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	68,84	69,02 <sup>1)</sup>
a.2 Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	30*	30*
a.3 Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	n/a	n/a
b. Indeks Pendidikan (IP)	poin	82,59	83,36 <sup>1)</sup>
b.1 Angka Melek Huruf (AMH)	persen	96,87	98,29 <sup>1)</sup>
b.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,11	8,34 <sup>1)</sup>
c. Indeks Daya Beli (IDB)	poin	65,08	65,47
c.1 <i>Purchasing Power Parity</i> (PPP)	ribu rupiah	641,63	644,36 ***

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat , \*) angka SDKI 2012, \*\*) RPJMD, \*\*\*Pusdalisbang , \*\*\*\*)Dinkes

1) Angka sementara perhitungan Pusdalisbang Februari 2015.

### 2.1.3.2. Kondisi Pemerataan Ekonomi

Pemerataan ekonomi di Jawa Barat tidak terlepas dari perkembangan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan indeks gini. Laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dalam kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 (Kumulatif Trw.1-Trw.3) mengalami peningkatan sebesar 0,04%, diikuti dengan turunnya tingkat inflasi sebesar 1,74%. Secara umum produktivitas ekonomi Jawa Barat meningkat dan berdampak pada peningkatan PDRB per kapita (ADHB) Tahun

2013 sebesar Rp 23,6 juta. Namun demikian kondisi ekonomi tidak berdampak pada perbaikan pemerataan pendapatan, hal ini diindikasikan dengan angka indeks gini yang tetap dan terkategori mempunyai ketimpangan moderat.

**Tabel 2.4**  
**Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2013-2014**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
			2013	Kumulatif Trw.1- Trw.3 Tahun 2014
<b>1</b>	<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>			
	a. Nilai PDRB :			
	a.1 Atas Dasar Harga Berlaku (adhb)	triliun rupiah	1.070 ,18	1.387,28 <sup>1)</sup>
	a.2 Atas Dasar Harga Konstan (adhk)	triliun rupiah	386,84	1.148,01 <sup>1)</sup>
	b. PDRB per Kapita :			
	b.1 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (adhb)	ribu rupiah	23.603	30.138,74
	b.2 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (adhk)	ribu rupiah	8.531	24.940,51
<b>2</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)</b>	persen	6,06	5,07 <sup>1)</sup>
<b>3</b>	<b>Inflasi</b>	persen	9,15	6,16
<b>4</b>	<b>Indeks Gini</b>	poin	0,41	0,42

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Februari 2014

1) Menggunakan Perhitungan Dasar Tahun 2010

### 2.1.3.3. Kondisi Kesejahteraan Sosial

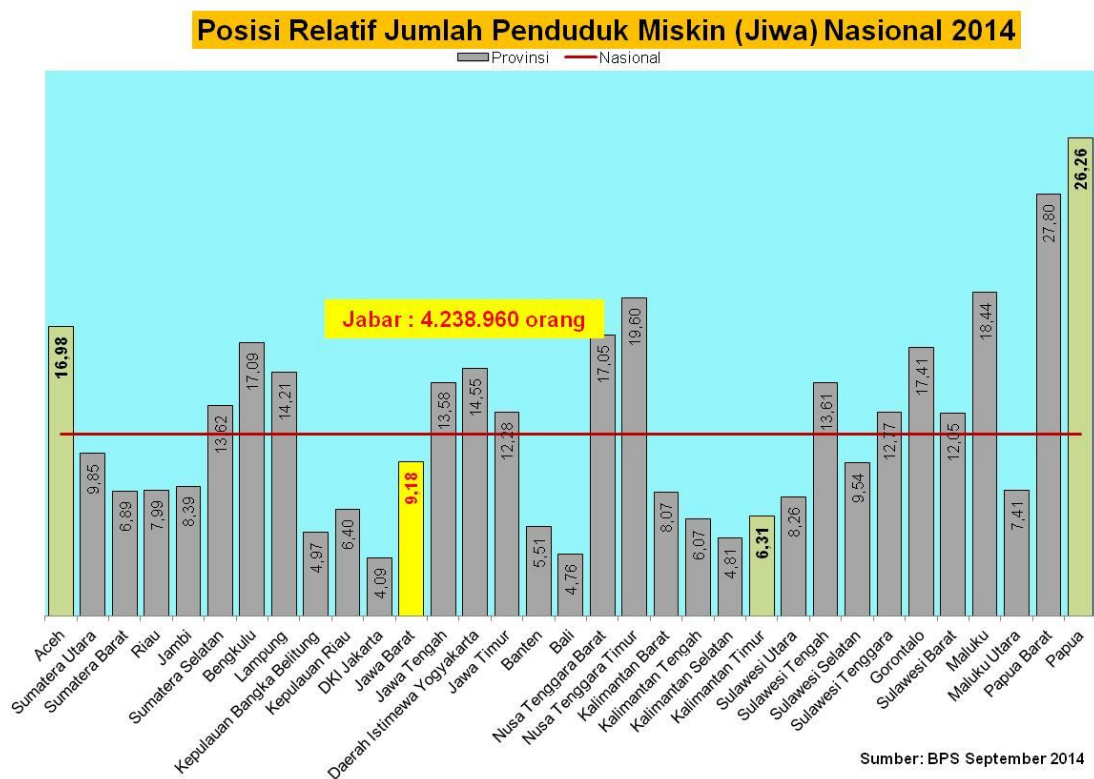
Capaian Indeks Kesehatan pada Tahun 2014 yaitu 74,01 poin dengan AHH 69,02 yang didukung Indikator lainnya antara lain AKB 30 per 1.000KH dan rasioa kematian ibu 79,11 per 100.000 KH dengan jumlah kasus kematian ibu 747 dan jumlah kasus kematian bayi 3.810 (Sumber Dinkes). Kasus penyakit menular masih perlu perhatian yang serius khususnya untuk Epidemic HIV & AIDS Indonesia tercepat di Asia dan Jawa Barat merupakan empat besar kasus tertinggi di Indonesia setelah DKI, Jatim dan Papua, walaupun Pelaksanaan Perda No. 12/2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan HIV dan AIDS di Jawa Barat. Keberhasilan terapi layanan ART dari rumah sakit pemberi ARV di 14 kab/kota, angka kesembuhan penyakit TB meningkat di 27 kab/kota. Pencegahan Penyakit – penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I),

dengan peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mencapai target Universal Child Immunization (UCI). Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan di Jawa Barat dengan meningkatnya persentase puskesmas yang memiliki dokter sesuai standar menjadi 60%, tenaga dokter gigi sesuai standar menjadi 55% dan tenaga bidan menjadi 97%, persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar sebesar 75,93%, dokter gigi 73,24% serta bidan sebesar 96,52%, juga dengan adanya rekrutmen untuk dokter, dokter gigi PTT dan bidan PTT dan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Alat Kesehatan/Kodokteran RS. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang Non Kuota Jamkesmas yaitu Jamkesda di biayai melalui Bantuan Keuangan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Bantuan Tidak Langsung (BTL) ke Kabupaten/Kota dan untuk pasien SKTM masyarakat Jawa Barat pelayanan kesehatan oleh RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.

Capaian Indeks Pendidikan yang pada Tahun 2014 mencapai 83,36 poin dengan AMH 98,29% dan RLS 8,34 tahun, yang didukung Indikator lainnya antara lain angka partisipasi kasar (APK) tingkat PAUD Sederajat 60,48%, APK SD Sederajat 108,89% dengan angka partisipasi murni (APM) SD Sederajat 94,74% dari 4.684.536 Siwa Usia 7-12 th dan turun 2,36% APK SMP Sederajat 95,35% dengan APM 72,17% dan APK SMA Sederajat 61,19.% dengan APM 44,71% (Sumber Kemendikbud)

Garis kemiskinan Jawa Barat bulan September 2014 sebesar Rp. 294.700,- mengalami peningkatan sebesar 6,46 persen dibandingkan dengan garis kemiskinan bulan September 2013 (Rp. 276.825,-). Untuk daerah perkotaan garis kemiskinan bulan September 2014 sebesar Rp. 294.700,- naik 4,80 persen dari kondisi September 2013 (Rp. 281.189,-), Garis kemiskinan di daerah perdesaan mengalami peningkatan yang lebih tinggi yaitu 6,27 persen menjadi sebesar Rp. 285.076,- dibandingkan dengan kondisi September 2013 yaitu sebesar Rp. 268.251,- dengan demikian jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 136.212 orang atau prosentase penduduk miskin berkurang sebesar 0,43% dari penduduk miskin 4.375.172 orang atau 9,61% pada Tahun 2013 menjadi 4.238.960 orang atau 9,18% pada September 2014.





Pembangunan di bidang budaya untuk upaya pelestarian budaya lokal telah mendapat pengakuan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yaitu Topeng Jawa Barat, Kujang dan Kendang Sunda sebagai Heritage. Pembangunan di bidang kepariwisataan Tahun 2014 kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat mencapai angka 1.962.639 orang dari target sebesar 810.000 orang dan wisatawan nusantara/domestik sebesar 33.617.999 orang dari target 31.900.000 orang.

Pembangunan pemuda dan olahraga di Jawa Barat, pemerintah mendorong mandiri dan kreatif dalam pembinaan karakter pemuda, dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan pemuda di bidang kewirausahaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup. Gubernur Jawa Barat memberi penghargaan sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang mempunyai hasil karya inovatif menuju wiraswasta mandiri dan prakarsa yang berkontribusi dalam pembangunan Jawa Barat di bidang pendidikan, pangan, energi, seni budaya, pariwisata, lingkungan hidup, infrastruktur dan rekayasa sosial. Selain untuk persiapan dan Pembangunan Infrastruktur Venue sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON XIX Tahun 2016 dengan melibatkan pihak-pihak serta OPD yang terkait, tetap memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di masyarakat untuk meningkatnya angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga

serta pelestarian olahraga tradisional, yang akhirnya meningkatkan potensi dan prestasi masyarakat dan atlet pelajar di Jawa Barat dengan dukungan peran serta Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan insan olahraga berprestasi di Jawa Barat.

Pembangunan di bidang sosial, Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi dalam rangka pencegahan, penanganan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak untuk meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang pelaporan dan penanganan Korban Tindak Kekerasan. Dalam upaya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Tahun 2014 yang ditangani 2.582 orang, dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan penyandang masalah tuna sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi serta peran sosialnya secara wajar melalui kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS) walaupun belum optimal pemberdayaan potensi PMKS, baik secara kelembagaan maupun perorangan terutama dalam kegiatan pendampingan dan belum optimalnya penggalian dan pemanfaatan sumber-sumber kesejahteraan sosial.

Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan kesepakatan global yang dituangkan dalam Deklarasi Millenium yang tujuan dan sasarannya Millenium Development Goals (MDGs) sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat serta pembangunan Nasional, merupakan keseriusan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat maka Tujuan MDGs diadopsi dan dimplementasikan dalam RPJMD 2013-2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan dan akhirnya bermuara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka upaya pencapaian MDGs di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah : 1) Membentuk Tim Pokja Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals (MDGs) Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015 melalui keputusan Gubernur No. 56 Tahun 2011, 2) Menyusun RAD MDGs Tahun 2011-2015, 3) Mengkoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun RAD MDGs Kabupaten/Kota, 4) Mensinergiskan Program/Kegiatan dalam upaya percepatan MDGs di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tujuan MDG's yang telah ditetapkan oleh Jawa Barat dan mengalami ketercapaian terhadap target, antara lain :

- a. Tujuan MDG's 1, yaitu penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK).
- b. Tujuan MDG's 3, yaitu rasio APM perempuan yang terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar / MI, SMP / SMA dan Perguruan Tinggi. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 – 24 tahun, serta proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/MI.
- c. Tujuan MDG's 4, yaitu angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup, dan prosentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak.
- d. Tujuan MDG's 5, yaitu proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN) mengalami peningkatan. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun, semua cara ( target 2015 : 65,00 %, dimana capaian saat ini 92,98 %).
- e. Tujuan MDG's 6, yaitu angka kejadian malaria per 1000 penduduk (target 2015 : 0,50 %, telah tercapai saat ini sebesar 0,02%), proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTs (dari target 2015 : 85,00 %, telah capaian saat ini menjadi sebesar 91,72%)

Tujuan MDG's yang telah ditetapkan oleh Jawa Barat dan memberikan indikasi kemajuan yang signifikan, serta diharapkan tercapai pada Tahun 2015 (on-track), antara lain :

- a. Tujuan MDG's 2, yaitu Angka Partisiupasi Murni (APM) SD, terdapat kemajuan dan kemungkinan bisa tercapai pada Tahun 2015. (dimana target 2015 sebesar 96,81 %, dimana capaian Tahun 2012 adalah sebesar 92,34 %).
- b. Tujuan MDG's 2, yaitu Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 – 24 tahun, laki-laki dan perempuan (dari target 2015 sebesar 100 %, pada Tahun 2012 telah mencapai 99,75 %).
- c. Tujuan MDG's 3, yaitu rasio APM perempuan/laki-laki di tingkat SD/MI/Paket A. (dari target 2015 sebesar 100%, pada Tahun 2012 telah mencapai 98,81%), rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15 – 24 tahun. (dari target 2015 sebesar 100,00 %, spada Tahun 2012 telah mencapai 99,95 %)
- d. Tujuan MDG's 5, yaitu proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih dalam kurun waktu 1990 – 2015. (dari target 2015 sebesar 90,00 %, pada Tahun 2012 telah mencapai 89,32%).

Tujuan MDGs yang telah ditetapkan oleh Jawa Barat dan memberi indikasi kemajuan yang harus dilakukan dengan kerja keras, antara lain :

- a. Tujuan MDGs 1, yaitu proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US\$ 1,00 (PPP) per kapita per hari, rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, dan prevalensi status gizi balita gizi buruk;
- b. Tujuan MDGs 2, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA/MA/SMK/Paket C, APK/SMP/MTS/Paket B;
- c. Tujuan MDGs 3, yaitu rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi, kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan disektor non pertanian, proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRPD;
- d. Tujuan MDGs 4, yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, angka kematian neo natal per 1000 kelahiran hidup;
- e. Tujuan MDGs 5, yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup;
- f. Tujuan MDGs 6, yaitu prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi. Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi, proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS, proporsi penduduk yang terinfeksi lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral, tingkat kematian akibat penyakit malaria, angka kejadian tuberkulosis, mengendalikan penyebaran dan penurunan jumlah kasus baru HIV dan AIDS berupa penurunan prevalensi HIV dan AIDS;
- g. Tujuan MDGs 7, yaitu berupa rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan, jumlah emisi CO<sub>2</sub>, konsumsi energi primer per kapita, elastisitas energi, serta proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak dan sanitasi dasar layak di perkotaan dan perdesaan, proporsi masyarakat urban yang tinggal di kawasan kumuh, dan proporsi kepastian kepemilikan lahan.

#### **2.1.4. Aspek Pelayanan Umum**

##### **2.1.4.1 Kondisi Pelayanan Bidang Pendidikan**

Pelayanan umum yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2012 ditujukan untuk peningkatan sumberdaya manusianya (SDM) yang berkualitas yang merupakan salah satu faktor utama pembangunan. Oleh karena itu dalam peningkatan

kualitas SDM terutama difokuskan kepada aksesibilitas masyarakat terutama terhadap bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Pendidikan merupakan salah satu aspek pelayanan yang cukup penting dalam pembangunan manusia Jawa Barat. Pembangunan pendidikan di Jawa Barat terus ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan dalam bidang pendidikan.

**Tabel 2.5**  
**Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pendidikan**

No	URAIAN	2013	2014
	Jumlah penduduk	45.340.799	46.029.669
<b>PENDIDIKAN</b>			
1	Rasio jumlah murid dan Guru SD Negeri/swasta non MI	6,29	
2	Rasio jumlah murid dan Guru SMP negeri/swasta. non tsanawiah	33,17	
3	Rasio jumlah murid dan Guru SMA negeri/swasta non aliyah	17,53	
4	Rasio jumlah murid dan Guru SMK/negeri/ swasta	17,54	

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2012 dan 2013, diolah

#### 2.1.4.2 Kondisi Pelayanan Bidang Kesehatan

**Tabel 2.6**  
**Kondisi pelayanan umum pada aspek Kesehatan**

No.	URAIAN	2013	2014
	Jumlah penduduk	45.340.799	46.029.669
1.	Jumlah puskesmas	1.050	1050
2.	Jumlah puskesmas pembantu	1.579	1.579
3.	Jumlah poskesdes	3.823	3.823
4.	Jumlah posyandu	52.141	52.141
5.	Jumlah rumah sakit	290	290
6.	Jumlah puskesmas keliling (Roda 4)	804	804
7.	Jumlah balai pengobatan	3.111	3.111
8.	Rasio jumlah penduduk per	43.352	

No.	URAIAN	2013	2014
	puskesmas		
9.	Rasio jumlah penduduk per puskesmas pembantu	28.965	
10.	Rasio jumlah penduduk per poskesdes	11.963	
11.	Rasio jumlah penduduk per posyandu	877	
12.	Rasio jumlah penduduk per rumah sakit	157,712	
13.	Rasio jumlah penduduk per puskesmas keliling	56,886	
14.	Rasio jumlah penduduk per balai pengobatan	14.701	

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2012 dan 2013, diolah,  
 Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Badan PPSPDMK, Puast Data dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri, RI, Profil  
 Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2012,  
 \* Jabar Dalam Angka 2013

#### 2.1.4.3 Kondisi Pelayanan Bidang Transportasi

**Tabel 2.7**  
**Kondisi Pelayanan pada Bidang Transportasi**

No.	URAIAN	2013	2014
	Jumlah penduduk (orang)	45.340.799	46.029.669
1	Jumlah kendaraan umum roda empat (unit)	NA	
2	Rasio Jumlah Penduduk per Jumlah kendaraan umum roda empat (orang/unit)	NA	
3	Jumlah kendaraan bukan umum roda empat (unit)	NA	
4	Rasio Jumlah Penduduk per Jumlah kendaraan bukan umum roda empat (orang/unit)	NA	
5	Jumlah sepeda motor (unit)	NA	
6	Rasio Jumlah Penduduk per Jumlah sepeda motor (orang/unit)	NA	
7	Total panjang jalan Nasional (Km)	1.351,132	1.351,132
8	Total panjang jalan Provinsi (Km)	2.191,29	2.191,29
9	Total panjang jalan Kabupaten/ Kota (Km)	32.438,659	22.757,155*
10	Total panjang jalan Non Status di Jalur Horizontal Jawa Barat Selatan (Km)	210,930	210,930
11	Rasio Jumlah kendaraan umum roda empat terhadap panjang jalan nasional (unit/Km)	NA	
12	Rasio Jumlah kendaraan umum roda empat terhadap panjang jalan provinsi (unit/Km)	NA	

No.	URAIAN	2013	2014
13	Rasio Jumlah kendaraan umum roda empat terhadap panjang jalan kabupaten/kota (unit/Km)	NA	
14	Rasio Jumlah kendaraan umum roda empat terhadap panjang jalan non status (unit/Km)	NA	
15	Rasio Jumlah kendaraan bukan umum roda empat terhadap panjang jalan nasional (unit/Km)	NA	
16	Rasio Jumlah kendaraan bukan umum roda empat terhadap panjang jalan provinsi (unit/Km)	NA	
17	Rasio Jumlah kendaraan bukan umum roda empat terhadap panjang jalan kabupaten/kota (unit/Km)	NA	
18	Rasio Jumlah kendaraan bukan umum roda empat terhadap panjang jalan non status (unit/Km)	NA	
19	Rasio Jumlah kendaraan sepeda motor terhadap panjang jalan nasional (unit/Km)	NA	
20	Rasio Jumlah kendaraan sepeda motor terhadap panjang jalan provinsi (unit/Km)	NA	
21	Rasio Jumlah kendaraan sepeda motor terhadap panjang jalan kabupaten/kota	NA	
22	Rasio Jumlah kendaraan sepeda motor terhadap panjang jalan non status (unit/Km)	NA	

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2013 dan 2014, diolah dan Dinas Bina marga Provinsi Jawa Barat, diolah

Pembangunan Bidang Transportasi memegang peranan penting dalam pembangunan wilayah Jawa Barat yang cukup luas dengan topografi yang cukup bergelombang. Untuk mendukung pergerakan orang dan barang di Jawa Barat diperlukan peningkatan pelayanan transportasi. Selama kurun waktu Tahun 2013 dan Tahun 2014, panjang jalan nasional, provinsi maupun tidak mengalami peningkatan, sedangkan panjang jalan kabupaten/kota berkurang 9.681, 504 km.

#### 2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah

Kemampuan Jawa Barat untuk bersaing dengan daerah lain secara nasional dalam mencapai pertumbuhan kesejahteraan daerah selama Tahun 2012 menunjukkan peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kinerja ekonomi daerah dalam berbagai sektor, meningkatnya kinerja pengembangan wilayah fasilitas wilayah atau infrastruktur, dan membaiknya iklim investasi.

**Tabel 2.8**  
**Laju Pertumbuhan Investasi (PMTB) Tahun 2013-2014**

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
		2013	2014
Investasi (PMTB adhb)	triliun rupiah	194,33	161,10
a. Laju Pertumbuhan Investasi ( <i>Pemb. Modal Tetap Bruto/PMTB</i> ) adhb	persen	10,91	12,79
b. Laju Pertumbuhan Investasi ( <i>Pemb. Modal Tetap Bruto/PMTB</i> ) adhk	persen	6,6	3,68
c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah :			
- Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (adhb)	triliun rupiah	94,80	75,12
- Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (adhk)	triliun rupiah	21,22	14,93

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Februari 2014

#### 2.1.6. Kemampuan Ekonomi Daerah

Dalam struktur perekonomian yang mempunyai kontribusi terbesar pada pembangunan Jawa Barat adalah sektor industri, perdagangan, dan sektor pertanian (BPS Jawa Barat, 2012). Sehingga ke tiga sektor tersebut mencerminkan potensi perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara berkelanjutan.

**Tabel 2.9**  
**Perkembangan PDRB (ADHB) Jawa Barat Tahun 2013 - 2014**

No	Indikator	Satuan	Kondisi/Capaian	
			Tahun 2013	Tahun 2014
	<b><u>a. Kontribusi</u></b>			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	persen	9,05	8,72
	2. Pertambangan dan Penggalan	persen	2,77	2,43
	3. Industri Pengolahan	persen	43,23	43,57
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	persen	0,70	0,79
	5. Pengadaan Air	persen	0,08	0,07



No	Indikator	Satuan	Kondisi/Capaian	
			Tahun 2013	Tahun 2014
	6. Konstruksi	persen	7,87	8,12
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	persen	15,86	15,24
	8. Transportasi dan Pergudangan	persen	4,50	4,78
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	persen	2,39	2,43
	10. Informasi dan Komunikasi	persen	2,40	2,46
	11. Jasa Keuangan	persen	2,57	2,56
	12. Real Estate	persen	1,09	1,04
	13. Jasa Perusahaan	persen	0,39	0,39
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	persen	2,40	2,42
	15. Jasa Pendidikan	persen	2,35	2,55
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	persen	0,57	0,63
	17. Jasa Lainnya	persen	1,77	1,82
	PDRB	persen	100,00	100,00
	<b><u>b. Pertumbuhan</u></b>			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	persen		6,13
	2. Pertambangan dan Penggalan	persen		-3,36
	3. Industri Pengolahan	persen		11,06
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	persen		24,26
	5. Pengadaan Air	persen		6,72
	6. Konstruksi	persen		13,62
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	persen		5,83
	8. Transportasi dan Pergudangan	persen		17,01
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	persen		12,30
	10. Informasi dan Komunikasi	persen		12,83

No	Indikator	Satuan	Kondisi/Capaian	
			Tahun 2013	Tahun 2014
	11. Jasa Keuangan	persen		9,74
	12. Real Estate			5,08
	13. Jasa Perusahaan	persen		11,61
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	persen		10,80
	15. Jasa Pendidikan	persen		19,32
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	persen		20,95
	17. Jasa Lainnya	persen		12,99
	PDRB	persen		10,20

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat. Februari 2014 ; Keterangan : \*) Merupakan konversi dari 9 sektor menjadi 17 klasifikasi dengan menggunakan perhitungan dasar Tahun 2010 sedangkan untuk PDRB tahun 2014 sudah langsung menggunakan tahun dasar 2010

#### Data PDRB Jawa Barat (ADHK) Tahun 2013-2014

No	Indikator	Satuan	Kondisi/Capaian	
			Tahun 2013*)	Tahun 2014*)
	<b><u>a. Kontribusi</u></b>			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	persen	8,45	8,08
	2. Pertambangan dan Penggalian	persen	2,46	2,38
	3. Industri Pengolahan	persen	43,72	43,74
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	persen	0,55	0,55
	5. Pengadaan Air	persen	0,08	0,08
	6. Konstruksi	persen	8,04	8,07
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	persen	16,27	16,00
	8. Transportasi dan Pergudangan	persen	4,39	4,49
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	persen	2,38	2,40
	10. Informasi dan Komunikasi	persen	2,81	3,14
	11. Jasa Keuangan	persen	2,42	2,40

No	Indikator	Satuan	Kondisi/Capaian	
			Tahun 2013*)	Tahun 2014*)
	12. Real Estate	persen	1,15	1,14
	13. Jasa Perusahaan	persen	0,39	0,40
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	persen	2,07	1,98
	15. Jasa Pendidikan	persen	2,35	2,56
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	persen	0,62	0,68
	17. Jasa Lainnya	persen	1,86	1,93
	PDRB	persen	100,00	100,00
	<b><u>b. Pertumbuhan</u></b>			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	persen		0,47
	2. Pertambangan dan Penggalian	persen		1,57
	3. Industri Pengolahan	persen		5,11
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	persen		4,30
	5. Pengadaan Air	persen		5,98
	6. Konstruksi	persen		5,45
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	persen		3,31
	8. Transportasi dan Pergudangan	persen		7,50
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	persen		6,00
	10. Informasi dan Komunikasi	persen		17,47
	11. Jasa Keuangan	persen		4,12
	12. Real Estate			4,46
	13. Jasa Perusahaan	persen		6,92
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	persen		0,72
	15. Jasa Pendidikan	persen		14,43
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	persen		15,78

No	Indikator	Satuan	Kondisi/Capaian	
			Tahun 2013*)	Tahun 2014*)
	17. Jasa Lainnya	persen		8,80
	PDRB	persen		5,07

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat. Februari 2014 ;Keterangan : \*) Merupakan konversi dari 9 sektor menjadi 17 klasifikasi dengan menggunakan perhitungan dasar Tahun 2010 sedangkan untuk PDRB tahun 2014 sudah langsung menggunakan tahun dasar 2010

**Tabel 2.9**  
**Perkembangan PDRB Jawa Barat Tahun 2013 - 2014**

Indikator	Satuan	Kondisi/Capaian	
		2013	Kumulatif Trw.1-Trw.3 Tahun 2014
<b><u>a. Kontribusi</u></b>			
1. Pertanian	persen	11,95	11,84
2. Pertambangan & Penggalan	persen	1,74	1,76
3. Industri Pengolahan	persen	34,56	34,27
4. Listrik, Gas & Air Bersih	persen	2,73	2,90
5. Bangunan	persen	4,40	4,44
6. Perdag., Hotel & Restoran	persen	24,44	24,13
7. Pengangkutan & Komunikasi	persen	8,20	8,83
8. Keu. Persewaan, & Jasa Perusahaan	persen	3,01	2,99
9. Jasa-Jasa	persen	8,98	8,82
<b>PDRB</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b><u>a. Pertumbuhan</u></b>			
1. Pertanian	persen	3,57	0,95
2. Pertambangan & Penggalan	persen	-0,66	0,28
3. Industri Pengolahan	persen	5,32	4,43
4. Listrik, Gas & Air Bersih	persen	7,05	7,60
5. Bangunan	persen	8,37	8,95
6. Perdag., Hotel & Restoran	persen	7,57	6,99
7. Pengangkutan & Komunikasi	persen	9,66	11,13

Indikator	Satuan	Kondisi/Capaian	
		2013	Kumulatif Trw.1-Trw.3 Tahun 2014
8. Keu. Persewaan, & Jasa Perusahaan	persen	8,35	7,72
9. Jasa-Jasa	persen	5,44	8,75
<b>PDRB</b>	<b>persen</b>	<b>6,06</b>	<b>5,60</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat. Februari 2014

Bidang perdagangan mencakup aktivitas transaksi barang dan jasa baik secara domestik maupun ekspor impor. Bagi perekonomian Jawa Barat, peran sub sektor perdagangan ini semakin besar. Nilai ekspor selama kurun waktu Tahun 2013-2014 mengalami penurunan begitu pula impor (Kumulatif Trw.1-Trw.3). Berdasarkan Tabel 2.10 di bawah ini, neraca perdagangan Jawa Barat adalah positif.

**Tabel 2.10**  
**Nilai Ekspor dan Impor Tahun 2013-2014**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
			2013	2014 (Kumulatif Trw.1-Trw3)
<b>1</b>	<b>Ekspor :</b>			
	- Ekspor (adhb)	triliun rupiah	389,42	331,32
	- Ekspor (adhk)	triliun rupiah	178,43	141,73
<b>2</b>	<b>Impor :</b>			
	- Impor (adhb)	triliun rupiah	309,96	256,04
	- Impor (adhk)	triliun rupiah	131,40	100,07

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Februari 2014

Kemajuan sektor perdagangan dalam pembangunan ekonomi Jawa Barat seperti di gambarkan di atas disebabkan diantaranya oleh: (a) Meningkatnya akses pasar untuk beberapa jenis/item produk industri Jabar dan meningkatnya pangsa pasar ekspor Jawa Barat pada negara tujuan ekspor senilai US\$ 17,760 milyar. Meningkatnya volume dan keanekaragaman produk perdagangan ekspor dari Jawa Barat sebesar 4.617 juta ton.

Pembangunan di bidang pertanian difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan cadangan pangan

pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat, pengendalian distribusi dan harga pangan, peningkatan keanekaragaman konsumsi serta penanganan keamanan pangan. Produksi pertanian, khususnya produksi padi Jawa Barat mempunyai peranan penting dalam ketahanan pangan nasional, karena memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi beras Nasional. Pada Tahun 2012 kontribusi produksi padi (Gabah Kering Giling) Jawa Barat terhadap nasional adalah 16,33%.

Prestasi Provinsi Jawa Barat sebagai kontributor terbesar dalam penyediaan padi nasional salah satunya ditunjang oleh peningkatan produksi padi secara konsisten selama lima tahun terakhir, sebagai akibat dari pengembangan sumberdaya petani, teknologi, penyuluhan dan perbaikan infrastruktur pertanian, serta berbagai peraturan daerah yang mendukung peningkatan produksi pertanian khususnya padi. Untuk mempertahankan posisi Jawa Barat sebagai provinsi kontributor padi tertinggi, maka perlu ditingkatkan produktivitasnya.

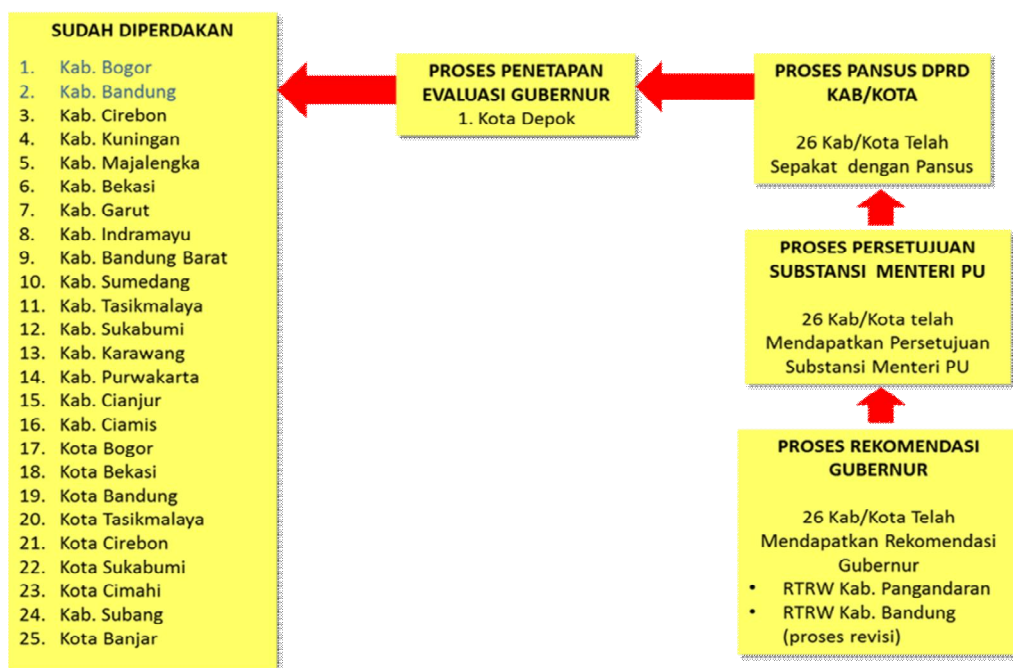
### **2.1.7. Kinerja Pengembangan Wilayah**

#### **2.1.7.1 Penataan Ruang**

Kinerja penataan ruang dilaksanakan melalui: (a) penyediaan pranata dan perwujudan rencana tata ruang; (b) harmonisasi penataan ruang antara pusat, provinsi dengan kabupaten dan kota; (c) peningkatan upaya pemantauan, pengawasan, dan penertiban pemanfaatan ruang di seluruh Wilayah Jawa Barat. Dalam rangka mewujudkan tata ruang yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 maka dilaksanakan operasionalisasi penyelenggaraan BKPRD Provinsi Jawa Barat yang bermitra dengan West Java Province-Metropolitan Development Management (WJPMDM), Badan Pengembangan Wilayah (BPW) Jabar Selatan dan Forum Jabar Utara. Sebagai pendetilan RTRW Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2012-2013 sudah melaksanakan kegiatan penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Sampai dengan Tahun 2013 telah diselesaikan 16 (enam belas) dari 24 (dua puluh) KSP dengan 4 (empat) diantaranya sedang dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Penetapan Perda.

Disamping itu, mengingat pentingnya pengelolaan pembangunan dan pengembangan metropolitan dan pusat pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memandang perlu pembangunan metropolitan secara terencana dan terintegrasi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tanpa mengurangi kewenangan serta tanggung jawab masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Dengan menyusun konsep pengembangan 3 (tiga) Metropolitan dan 3 (tiga) pusat pertumbuhan sejak 2012-2013 yang dilakukan oleh West Java Province-Metropolitan Development Management (WJPMDM). West Java Province-Metropolitan Development Management (WJPMDM) tersebut dibentuk pada Tahun 2011. Konsep pengembangan 3 (tiga) Metropolitan dan 3 (tiga) pusat pertumbuhan jugatelah ditetapkan dalam Perda No. 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk harmonisasi penataan ruang antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta dalam rangka pembinaan tata ruang oleh Provinsi Jawa Barat kepada Kab./Kota dilakukan fasilitasi pelaksanaan proses rekomendasi dan evaluasi Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah RTRW Kabupaten/Kota. Saat ini sebanyak 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota di Jawa Barat sudah menetapkan Perda tentang RTRW.



**Gambar 2.1.**  
**Status RTRW Kabupaten/Kota Per Desember 2013**

Dalam meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan fasilitasi pemberian Rekomendasi Gubernur untuk pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara (KBU) sebanyak 57.kasus pada Tahun 2013.

### 2.1.7.2 Infrastruktur Transportasi

Upaya peningkatan infrastruktur transportasi melalui peningkatan kinerja pengelolaan jalan provinsi. Dari total panjang jalan provinsi sepanjang 2.191,29 Km, berada dalam kondisi mantap sampai dengan Tahun 2014 mencapai 97,68%. Dengan capaian tersebut, maka peningkatan kemantapan jalan sudah melebihi target RPJMD 2013-2018 untuk Tahun 2014 sebesar 97,10 – 97,40%. Untuk mempertahankan kondisi jalan, dilaksanakan program pemeliharaan jalan pada semua jaringan jalan provinsi sepanjang 2.191,29 km dan pemeliharaan jembatan sepanjang 14.198 m, sedangkan untuk rehabilitasi jalan telah dilaksanakan sepanjang 74,84 km, rehabilitasi jembatan sepanjang 25 m, perbaikan badan jalan sepanjang 42,22 km, perbaikan drainase jalan sepanjang 61,33 km. Sementara melalui program pembangunan/Peningkatan jalan telah ditingkatkan jalan sepanjang 76,19 km.

**Tabel 2.11**  
**Kinerja Kemantapan Jalan Tahun 2014**

No	Kondisi	2014	
		panjang (km)	%
1	Baik	1.108,091	50,57
2	Sedang	1.032,469	47,12
	Mantap	2.140,56	97,68
3	Rusak Ringan	50,730	2,32
4	Rusak Berat	-	0
	Tidak Mantap	50,730	2,32
<b>Total</b>		2.191,29	100

Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

Tingkat kemantapan jalan (kondisi baik dan sedang) di Provinsi Jawa Barat meningkat dari 97,56% pada Tahun 2013 menjadi 97,68% pada Tahun 2014,



meningkat sebesar 0,12%. Berkaitan dengan sektor perhubungan, untuk pembangunan di bidang perhubungan, keberhasilannya dapat dilihat dari capaian indikator yaitu Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi, yang meningkat dari 15,83% pada Tahun 2013, menjadi 17,02% pada Tahun 2014. Keberhasilan lainnya yang dicapai pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : (a) Penyediaan lahan untuk pembangunan Jembatan Timbang pada jalur Cianjur-Sukabumi di Desa Titisan Kabupaten Sukabumi seluas 7.800 m<sup>2</sup> dan Jalur Sukabumi-Bandung di Desa Sindang Jaya Kabupaten Cianjur seluas 159.620 m<sup>2</sup>; (b) Lanjutan pembebasan lahan untuk pembangunan Bandar Udara Internasional di Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Barat pada Tahun 2014 dengan membebaskan lahan di Desa Sukakarta dan Sukamulya 14,13 Ha dan pembebasan tanah kas Desa Kertajati dan Desa Kertasari seluas 82 ha sehingga total lahan yang dibebaskan sampai Tahun 2014 adalah 873,63 Ha. Sedangkan pembangunan sisi udara Tahap II dilakukan oleh Kementerian Perhubungan yang dibiayai dari APBN sebesar Rp. 80 Milyar sebagai lanjutan kegiatan Tahun 2013 ; (c) Pembangunan Sisi Udara Bandar Udara Internasional Kertajati berupa konstruksi Runway dengan panjang 2.565 m dan lebar 60 m; (d) Pembebasan tanah untuk pembangunan shortcut Jalur Kereta Api Cibungur (Purwakarta) dan Tanjungrasa (subang), yang dilaksanakan di Desa Wanakarta seluas 5.489 m<sup>2</sup>, sedangkan pembangunannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang didanai dari APBN dan telah dimulai sejak Tahun 2013; (e) Peningkatan fasilitas pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau di Jawa Barat; (f) Lanjutan pembebasan lahan Bandara Nusawiru pada Tahun 2013 sebagai persiapan pengembangan Bandara Nusawiru di Kabupaten Pangandaran. Pada Tahun 2014 telah dibebaskan lahan seluas 33.664 m<sup>2</sup> untuk pengembangan Bandara Nusawiru sesuai Rencana Induk Bandar Udara Nusawiru yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 407 Tahun 2014; (g) Penetapan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 67 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi Jawa Barat, yang memuat rencana pengembangan jaringan prasarana perkeretaapian, baik yang memuat jaringan jalur kereta api yang akan dibangun di Jawa Barat.

Pembangunan angkutan massal di Jawa Barat juga sedang diupayakan melalui pembangunan dan reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat, antara lain dengan melakukan persiapan reaktivasi jalur kereta api Rancaekek-Tanjungsari melalui penyusunan Studi Sosial Penertiban Lahan Reaktivasi Kereta Api Rancaekek-Tanjungsari dan penyusunan DED Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek-Tanjungsari

Tahap I. Sedangkan pembangunan atau peningkatan prasarana untuk reaktivasi jalur kereta api Rancaekek-Tanjungsari akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

#### **2.1.7.3 Sumberdaya Air dan Irigasi**

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dilakukan upaya peningkatan intensitas tanam padi melalui peningkatan pengelolaan jaringan irigasi di Jawa Barat. Dari total luas Daerah Irigasi (DI) 974.012 Ha terdapat 86.561 Ha atau sebanyak 91 DI yang merupakan DI kewenangan Provinsi. Peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya irigasi ditunjukkan dengan terpeliharanya kondisi dan fungsi DI yang tersebar di WS Ciliwung-Cisadane, Cisadea-Cibareno, Citarum, Cimanuk-Cisanggarung, Citanduy dan Ciwulan-Cilaki. Jaringan irigasi pada DI kewenangan provinsi dengan kondisi baik meningkat dari 65,98% pada akhir Tahun 2013 menjadi 67,34% pada Tahun 2014. Hal ini berdampak positif pada meningkatnya intensitas tanam padi menjadi 227% pada Tahun 2013 dibandingkan dengan Tahun 2012 yang mencapai 214%. Kinerja ini melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2008-2013 untuk Tahun 2012 yang sebesar 194 — 198%. Selain jaringan irigasi, juga dipelihara kondisi dan fungsi 106 situ/waduk yang tersebar di WS Ciliwung-Cisadane, Cisadea-Cibareno, Citarum, Cimanuk-Cisanggarung, Citanduy dan Ciwulan-Cilaki. Peningkatan kinerja ditunjukkan dengan meningkatnya kapasitas tampung situ/waduk sehingga manfaatnya adalah mampu menyediakan air untuk areal persawahan sehingga meningkatkan intensitas tanam padi serta dapat memenuhi kebutuhan air baku lainnya untuk masyarakat di sekitarnya.

#### **2.1.7.4 Iklim Berinvestasi**

Penanaman modal merupakan sumber pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah. Oleh karena itu upaya akumulasi modal merupakan concern setiap pemerintahan. Penyelenggaraan bidang penanaman modal diarahkan untuk mencapai misi 2 (dua) yakni Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Regional Berbasis Potensi Lokal. Untuk mendorong peningkatan penanaman modal di Jawa Barat, dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Hasil dari pelaksanaan program tersebut seperti terlihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.12.**  
**Rekapitulasi Program dan Kegiatan**  
**Penanaman Modal Tahun 2013-2014**

No	NAMA	JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN TAHUN		JUMLAH SELURUH
		2013	2014	
	PROGRAM			KEGIATAN
1.	Peningkatan Iklim Investasi	3		
2.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	4		
<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>		

Sumber. LKPD Gubernur Jawa Barat Tahun 2013

**Tabel 2.8**  
**Laju Pertumbuhan Investasi PMTB Tahun 2012-2013**

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
		2013	2014
Investasi (PMTB adhb)	triliun rupiah	194,33	161,10
a. LajuPertumbuhanInvestasi(Pemb. Modal TetapBruto/PMTB)adhb	persen	10,91	12,79
b. LajuPertumbuhanInvestasi(Pemb. Modal TetapBruto/PMTB)adhk	persen	6,6	3,68
c. PengeluaranKonsumsiPemerintah :			
▪ PengeluaranKonsumsiPemerintah (adhb)	triliun rupiah	94,80	75,12
▪ PengeluaranKonsumsiPemerintah (adhk)	triliun rupiah	21,22	14,93

#### 2.1.7.5 Sumber Daya Manusia

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dibandingkan dengan provinsi lain, yaitu sebesar 45.340.799 orang pada Tahun 2013 dan meningkat menjadi 46.029.669 orang pada Tahun 2014. Berdasarkan struktur umur, proporsi jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun, yaitu 31,59 juta orang pada Tahun 2012 dan 32,19 juta orang pada Tahun 2013. Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sedikit menurun pada Tahun 2014 menjadi 62,77%, perbedaannya 0,24% dibandingkan Tahun 2013. Angka pengangguran menurun 0,77% dari 9,22% di Tahun 2013 menjadi 8,45% di Tahun 2014.

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

### 2.2.1. Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2014

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen RKPD, terdapat 90 program berupa Belanja Langsung (BL) yang harus dilaksanakan pada Tahun 2014. Program ini seluruhnya terlaksana melalui APBD Tahun 2014. Program dalam RKPD ini kemudian dijabarkan menjadi 1.542 kegiatan, sementara dalam APBD terdapat 1.432 kegiatan.

Evaluasi terhadap dokumen pelaksanaan RKPD atau dokumen APBD terhadap dokumen RKPD Tahun 2014 dilakukan dengan menggunakan 5 kriteria, yaitu kesesuaian indikator kinerja, target kegiatan, judul, lokasi dan anggaran kegiatan. Dari hasil evaluasi, terdapat 66,67% program dalam dokumen APBD yang sebagian atau seluruh kegiatannya tidak sesuai atau kegiatannya berbeda program dengan dokumen RKPD. Selain itu, terdapat 73,33% program dalam RKPD yang sebagian atau seluruh kegiatannya tidak dilaksanakan atau kegiatannya berubah program.



Kemudian dari hasil analisis terhadap kedua dokumen tersebut ditemukan sebagian kegiatan APBD yaitu sebanyak 46,95% kegiatan APBD memiliki indikator berbeda dengan RKPD, dan sebanyak 48,18% kegiatan APBD berbeda targetnya dengan RKPD. Dalam aspek lainnya, sebanyak 4,86% kegiatan APBD berbeda judulnya dengan RKPD, sebanyak 17,96% kegiatan APBD berbeda lokasinya dengan RKPD. Berkaitan dengan aspek anggaran sebanyak 59,73% kegiatan APBD berbeda anggarannya dengan RKPD. Ketidaksesuaian kegiatan tersebut dapat mencakup hanya satu maupun keseluruhan aspek evaluasi.

Disamping itu juga terdapat 18,30% kegiatan APBD yang berbeda programnya dengan RKPD atau tidak tercantum dalam RKPD. Sementara kegiatan RKPD yang tidak dilaksanakan atau kegiatan RKPD yang programnya berubah adalah sebanyak 24,12%.

Hasil evaluasi juga menemukan adanya kegiatan yang sama tetapi berbeda program antara RKPD dengan APBD. Selain itu, didalam dokumen RKPD juga terdapat Program Belanja Tidak Langsung (BTL) yang tercantum dalam kelompok Program Belanja Langsung (BL). Atau sebaliknya, Program BL tetapi tercantum dalam kelompok Program BTL. Disamping itu, juga terdapat kegiatan yang seharusnya termasuk Program BTL tetapi tercantum di dalam RKPD sebagai kegiatan Program BL.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka merespon kebutuhan organisasi dan memenuhi harapan masyarakat terhadap perwujudan sosok birokrasi yang bermutu dan akuntabel, telah dilaksanakan beberapa upaya diantaranya: implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Provinsi Jawa Barat, mempertahankan dan memperluas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), transparansi dan kemudahan dalam pelayanan perijinan, meningkatkan efektivitas pengelolaan satu data pembangunan Jawa Barat, memperluas dan meningkatkan kualitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang telah berhasil memfasilitasi lelang sebanyak 2.323 paket untuk Tahun 2014, dengan efisiensi anggaran sebesar 13,39% dari pagu yang disediakan. Implementasi kebijakan pembangunan metropolitan dan pusat pertumbuhan harus dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, tanpa mengurangi kewenangan serta tanggung jawab masing-masing. Sehingga, pengelolaan pembangunan dan pengembangan metropolitan serta pusat pertumbuhan tersebut dilaksanakan melalui West Java Province-Metropolitan Development Management (WJPMDM).

Selanjutnya, dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan Jawa Barat, khususnya dalam periode RPJMD 2013-2018, maka telah ditetapkan beberapa kebijakan operasional pembangunan, yaitu: melanjutkan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah selesai untuk selanjutnya dimanfaatkan dan direplikasi ke berbagai daerah; menuntaskan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah dimulai dilaksanakan namun belum selesai untuk segera dapat dimanfaatkan; memberikan dukungan pada program-program pembangunan yang dilakukan langsung oleh komunitas berbasis masyarakat, akademisi dan institusi pendidikan/riset dan dunia usaha; reposisi dengan menerapkan strategi baru untuk program-program pembangunan

namun belum bisa dilaksanakan karena mengalami hambatan; melakukan reorientasi dengan menyusun program-program baru bersifat terobosan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang perlu segera dilaksanakan bersama bupati/wali kota dengan dukungan dari pemerintah pusat.

## **Pelaksanaan RKPD**

### **I. Urusan Pendidikan**

Urusan Pendidikan terdiri dari 5 program, jumlah seluruh kegiatan sebanyak 45 kegiatan, penanggung jawab kegiatan oleh Dinas Pendidikan dan Biro Pelayanan Sosial Dasar, dengan jumlah dana sebesar Rp. 180.709.795.281 yang terealisasi sebesar Rp. 84.500.758.303 atau 47%, Kinerja program terendah mencapai 0% untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (data sementara), dan tertinggi mencapai 96% untuk Program Pendidikan Non Formal, rincian per program sebagai berikut :

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan, penanggung jawab kegiatan Dinas Pendidikan, dengan jumlah dana sebesar Rp. 66.009.417.331 dan dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 27.537.706.970 atau 41,7% (data sementara), terdiri dari 5 kegiatan sudah terealisasi diatas 90% yaitu untuk kegiatan Membina Olahraga Pendidikan Dasar tertinggi 99%, dan 1 kegiatan diatas 80% serta 1 kegiatan belum terealisasi untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Jenjang SD dan SMP, target kegiatan ini sangat penting yaitu “Pemberdayaan Gugus Sekolah Dasar, Pemberdayaan Sekolah Swasta di Jabar, Pemberdayaan TP-UKS Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum, Peningkatan Kemampuan Akademik Kepala SD dan SMP”.

Indikator Kinerja program ini antara lain, 1) Terselenggaranya Kualitas Layanan Pendidikan Dasar untuk Jenjang SD dan SMP di Jawa Barat, Meningkatnya prestasi O2SN dan Klub OR SD dan kelas olahraga SMP di Tingkat Nasional; 2) Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Dasar untuk Jenjang SD dan SMP di Jawa Barat, Meningkatnya Kualitas dan Jumlah Sarana Prasarana Penyelenggaraan Pendidikan Dasar; Meningkatnya Jumlah dan Kualitas SSN Jenjang SD dan SMP, Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Dasar di Jawa Barat; 3) Meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi dan terkategori sebagai sekolah Standar Nasional melalui

pemenuhan 8 SNP, Peningkatan prestasi siswa SD dan SMP SSn serta meningkatnya mutu sekolah dan tenaga kependidikan SSN SD dan SMP.

2. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi, jumlah kegiatan sebanyak 16 kegiatan, penanggung jawab kegiatan Dinas Pendidikan dan Biro Pelayanan Sosial Dasar, dengan jumlah dana sebesar Rp. 54.939.400.950 dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 42.332.474.634 atau 77%, terdiri dari 5 kegiatan belum terealisasi atau 0% yaitu untuk kegiatan Diklat Kewirausahaan dan Pemberian Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Siswa SMK di Jawa Barat, Peningkatan Kualitas Pendidikan SMK di Jawa Barat, Pengadaan Peralatan Praktek SMK di Jawa Barat, Penuntasan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB) SMK di Jawa Barat, Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Jawa Barat, Tingkat Nasional Dan Penyelenggaraan Epitech 2014, Pemberian BOS Provinsi dan Pusat untuk Jenjang Pendidikan Menengah; 3 kegiatan terealisasi diatas 80% ; 3 kegiatan terealisasi diatas 90% dan 2 kegiatan terealisasi 100% yaitu untuk kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Program Kegiatan KKN Tematik Perguruan Tinggi Se-Jawa Barat; Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Program Pendidikan Menengah Universal menuju Pendidikan 12 Tahun yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar.

Indikator Kinerja program ini antara lain 1) Meningkatnya Angka Melanjutkan ke SMA di Jawa Barat, Masukan kepada sekolah terhadap kesulitan dalam pemenuhan 8 SNP, pemetaan 200 SMA dalam pemenuhan 8 SNP, 2) Meningkatnya Jumlah Rombel SMA /MA, Terlaksananya Bimbingan Teknik Pembangunan Ruang Kelas Baru, Meningkatnya angka Melanjutkan ke SMA di Jawa Barat, Terlaksananya Lomba–Lomba (OSN, O2SN, FLS2N, Debat Bahasa Inggris, dan Galaksi) TK Provinsi Jabar, Terbinanya pelaksanaan pendidikan karakter budaya bangsa disekolah model, Tersosialisasikannya pendidikan karakter budaya bangsa kesekolah lainnya, 3) Meningkatnya kualitas Guru BK SMA dan SMK di Jawa Barat, Tercapainya prestasi non–akademik siswa SMA/SMK melalui keikutsertaan siswa dalam lomba/event/olimpiade/festival mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi maupun nasional, Tercapainya tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan, penyelenggaraan, pengelolaan SMA/SMK, 4) Terlaksananya Peningkatan Kualitas SMK serta Terpupuknya Jiwa Kewirausahaan pada Siswa SMK, Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Kejuruan di Jawa Barat, 5) Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SD ke Jenjang SMP dan SMP ke Jenjang SMA/SMK/MA,

Meningkatnya APK SMA/MA dan SMK, Peningkatan Mutu Guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Menengah Umum, Terselenggaranya Program KKN Tematik Perguruan Tinggi se-Jawa Barat, Terwujudnya sinergitas dan kesamaan persepsi antara Pemprov, Pemkab/Pemkot dan Stakeholder pendidikan dalam implementasi program Pendidikan Menengah Universal menuju pendidikan 12 Tahun.

3. Program Pendidikan Non Formal, jumlah kegiatan sebanyak 5 kegiatan, penanggung jawab kegiatan Dinas Pendidikan, dan Biro Pelayanan Sosial Dasar dengan jumlah dana sebesar Rp. 8.328.320.000 dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 8.005.370.499 atau 96%, terdiri dari 4 kegiatan terealisasi diatas 90%, yaitu untuk kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat terealisasi 99%, dengan target yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Pemberantasan Buta Aksara dan Meningkatkan Penyelenggara Program Dikmas, dan 1 kegiatan terealisasi 100% yaitu untuk kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Program Kegiatan KKN Tematik Perguruan Tinggi se-Jawa Barat, dalam pelaksanaan Saresehan Keteladan di Jabar yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar.

Indikator Kinerja program ini antara lain 1) Meningkatnya APK PAUD, Tercapai Perkembangan Layanan PAUD di Jawa Barat, Pemberantasan Buta Aksara, Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI pada Tk. Nasional,

2) Meningkatnya Kegiatan Pendidikan Keterampilan Berbasis Potensi Lokal bagi Masyarakat, 3) Terapresiasinya para pelaku pembangunan di Jawa Barat yang memiliki prestasi sesuai dengan profesinya serta kepedulian terhadap pembangunan di wilayahnya masing-masing.

4. Program Pendidikan Luar Biasa, jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan, penanggung jawab kegiatan Dinas Pendidikan, dengan jumlah dana sebesar Rp. 8.443.842.000 dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 6.625.206.200 atau 78%, terdiri dari 2 kegiatan terealisasi diatas 90%, yaitu untuk kegiatan Bina Promosi dan Kompetensi Siswa Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) terealisasi 97%, dengan target yang ingin dicapai Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kualitas siswa-siswi SLB di Jawa Barat dalam bidang akademik, bidang olahraga, bidang kecakapan hidup, ketrampilan dan kesenian, dan 1 kegiatan belum terealisasi (data sementara) untuk kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pengembangan Kurikulum PK/PLK.



Indikator Kinerja program ini antara lain 1) Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK), Peningkatan Sarana dan Prasarana SLBN di Jawa Barat, 2) Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan PK dan PLK di Jawa Barat, Meningkatnya Kualitas Pendidikan Sekolah Luar Biasa.

5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan , jumlah kegiatan sebanyak 14 kegiatan, penanggung jawab kegiatan dinas Pendidikan, dengan jumlah dana sebesar Rp. 30.488.815.000 belum terealisasi semua atau 0.00% (data sementara).

Indikator Kinerja program ini antara lain 1) Meningkatnya target dan motivasi terhadap pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Wajar 12 Tahun di Jawa Barat secara merata, baik diperkotaan maupun di pedesaan, Meningkatnya Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan PLB Negeri dan Swasta di Jawa Barat, Menghasilkan Guru SLB yang Siap Menghadapi Uji Kompetensi Guru, Meningkatnya Jumlah Guru yang paham Implementasi Kurikulum 2013, 2) Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan, baik bagi pendidik maupun yang siswa dalam kejuruan bidang studi Teknologi dan Rekayasa, Meningkatnya kesejahteraan Guru Bantu SD/MI Daerah Terpencil Jawa Barat, Meningkatnya Kompetensi Guru Bahasa Daerah di Jawa Barat, 3) Terasilitasinya kebutuhan minimal Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua dalam melaksanakan penyelenggaraan Proses Belajar mengajarnya, 4) Peningkatan Kualitas Pendidikan di kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu Jatinangor.

## **II. Urusan Kesehatan**

Urusan Kesehatan terdiri dari 5 program, jumlah seluruh kegiatan sebanyak 78 kegiatan, penanggung jawab kegiatan oleh Dinas Kesehatan, RS Jiwa, RS Paru, RSUD Al Ihsan, dan Biro Pelayanan Sosial Dasar, dengan jumlah dana sebesar Rp. 274.117.893.834 yang terealisasi sebesar Rp. 137.880.856.388 atau 50,30% (data sementara), Kinerja program terendah mencapai 30% untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan (data sementara), dan tertinggi mencapai 90,84% untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, rincian per program sebagai berikut :

1. Program Upaya kesehatan, jumlah 15 kegiatan, penanggung jawab kegiatan Dinas Kesehatan, RSUD Al Ihsan dan Biro Pelayanan Sosial Dasar, dengan jumlah dana

sebesar Rp, 18.824.310.000 dana yang terealisasi sebesar Rp. 13.455.715.741 atau 71%, terdiri dari 1 kegiatan tidak terealisasi atau 0% yaitu untuk Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan PON XIX Tahun 2016, dan 1 kegiatan terealisasi 51% untuk kegiatan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar, dan 8 kegiatan diatas 90 % salah satu kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi untuk Mendukung Peningkatan Akses Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) mencapai 99,9% dilaksanakan oleh Bagian Kesehatan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda, 1 kegiatan mencapai 100% untuk kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanggulangan Kesehatan.

Indikator Kinerja program ini antara lain 1) Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak, dan masyarakat resiko tinggi, Tercapainya indikator Kesehatan Ibu dan Anak dan Lansia tahun 2014, 2) Meningkatnya Komitmen dan kemampuan kab/ kota untuk mencapai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Meningkatnya Keluarga Sadar Gizi, 3) Meningkatnya Penggunaan Obat Rasional, serta Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Obat Sesuai dengan Undang-undang di Dinas Kesehatan 27 Kab/Kota, 4) Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan spesialisik yang bermutu, Meningkatnya pelayanan komprehensif gangguan mental sesuai standar, 5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman masyarakat akan kesehatan dasar dan terhadap rujukan spesialisik paru, 6) Meningkatnya Pelayanan terhadap Kesehatan Jiwa, Terbentuknya sistem pelayanan kesehatan jiwa yang terpadu di Jawa Barat (TPKJM).

2. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan, jumlah kegiatan sebanyak 22 kegiatan, penanggung jawab kegiatan dinas Kesehatan, RS Jiwa, RS Paru, RSUD Al Ihsan dan Biro Pelayanan Sosial Dasar dengan jumlah dana sebesar Rp. 16.814.355.212 dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 12.659.490.342 atau 75%, terdiri dari 1 kegiatan daya penyerapan yang rendah realisasinya sebesar 33% yaitu kegiatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Jawa Barat, dan ternyata hal itu terjadi bukan adanya permasalahan dalam pelayanan namun masyarakat miskin Jawa Barat sudah banyak yang beralih ke BPJS; 9 kegiatan terealisasi diatas 90% salah satunya kegiatannya Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam rangka Pengendalian HIV & AIDS di Jawa Barat, dilaksanakan oleh Bagian Kesehatan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda; 2 kegiatan terealisasi 100% untuk kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi untuk Mendukung Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu Terpadu Provinsi Jawa Barat,

dan kegiatan Koordinasi, Fasilitasi TP-UKS Kab/Kota di Jawa Barat, ke duanya dilaksanakan oleh Bagian Kesehatan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda.

Indikator Kinerja program ini antara lain 1) Tersedianya berbagai kebijakan, standar pelayanan kesehatan Provinsi, SPPM Bidang Kesehatan, Pedoman dan Regulasi Kesehatan, 2) Terfasilitasinya Akreditasi Persalinan di 5 Kab/Kota, Meningkatkan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, Tersedianya puskesmas berfungsi PONED yang optimal dan berkualitas, Optimalisasi Fungsi Puskesmas DTP dalam Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), 3) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kesehatan, Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan laboratorium, 4) terjadinya sinkronisasi bidang kesehatan, sehingga terwujudnya akuntabilitas, pencapaian kinerja program pembangunan kesehatan yang baik, meningkatnya koordinasi antar OPD Kabupaten/Kota anggota pokjanal posyandu dalam upaya pengintegrasian layanan social dasar di Posyandu, meningkatnya koordinasi antar OPD kabupaten/Kota dan OPD Provinsi dalam pengendalian penyakit tidak menular, 5) Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap peningkatan dan penyebaran penyakit akibat situasi global (Glonal Warning),Meningkatnya Peran Provinsi dalam upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TB, DBD, Malaria, Penyakit Cardio Vasculer (struk,MI), penyakit metabolisme (DM) dan penyakit jiwa, penyakit gimul, penyakit mata dan telinga.

3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan, penanggung jawab kegiatan Dinas Kesehatan,dan Bagian Kesehatan Biro Pelayanan Sosial Dasar dengan jumlah dana sebesar Rp 2.132.000.000 dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 1.936.702.975 atau 91%, terdiri dari 1 kegiatan terealisasi paling rendah yaitu kegiatan Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan Matra, 4 kegiatan terealisasi diatas 90% salah satu kegiatannya adalah Pencegahan Penyakit-Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) sebesar 98,57%, dan 1 kegiatan terealisasi 100% untuk kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular. Indikator Kinerja program ini antara lain 1) Meningkatnya Jumlah Desa/Kelurahan yang mencapai target Universal Child Immunization (UCI), Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan, 2) Meningkatnya peran Provinis Jawa Barat melalui BKKM Provinis Jawa Barat dalam upaya pengendalian dan penemuan

Penyakit Akibat Kerja, dan dalam upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TB, DBD, Malaria, Penyakit Cardio Vasculer (struk,MI), penyakit metabolisme (DM) dan penyakit jiwa, penyakit gimul, penyakit mata dan telinga, Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap peningkatan dan penyebaran penyakit akibat situasi global (Glonal Warning), dan meningkatnya koordinasi antar OPD kabupaten/Kota dan OPD Provinsi dalam pengendalian penyakit tidak menular.

4. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan, jumlah kegiatan sebanyak 23 kegiatan, penanggung jawab kegiatan Dinas Kesehatan, RS Jiwa dan RSUD AlIhsan, dengan jumlah dana sebesar Rp.166.048.069.600 dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 48.987.155.592 atau 30%, terdiri dari 1 kegiatan daya serapnya paling rendah yaitu kegiatan Pengadaan pengembangan Sarana Dan Prasarana Rekam Medik RSUD Al Ihsan, dan 9 kegiatan terealisasi diatas 90% salah satunya adalah kegiatan Membangun Instalasi Pengolah Air Bersih yang dilaksanakan oleh RS Jiwa, serta 1 kegiatan yang terealisasi 100% yaitu kegiatan Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh RSUD Al Ihsan, dalam bentuk pengadaan obat, bahan dan alkes habis pakai, service cost darah, gas medis, bahan makanan basah dan kering untuk pasien.

Indikator Kinerja program ini antara lain 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana BKPM, BAPELKES Dinas Kesehatan dan UPT Kesehatan, Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan kerja, Tersedianya Gedung Perawatan Anak Remaja, Terwujudnya Bangunan Fisik Konstruksi Gedung Maskin Lantai 3 (Tiga) (Pengembangan) di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, 2) Meningkatnya pelayanan penunjang terhadap pasien rawat inap dan rawat jalan secara berkesinambungan, Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, Meningkatnya Kualitas Dan Pelayanan Pasien Pada Pelayanan SIM Rumah Sakit, 3) Tersedianya pengadaan alat-alat kedokteran sebagai peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Al Ihsan, 4) Terpenuhinya asupan gizi yang memadai untuk pasien dan petugas yang dinas di unit beresiko shift malam, konselor napza, hari raya, bulan puasa, di rumah sakit.

5. Program Sumber Daya Kesehatan, jumlah kegiatan sebanyak 11 kegiatan, penanggung jawab Dinas Kesehatan, RS Paru, RS Jiwa dan RSUD Al Ihsan dengan jumlah dana sebesar Rp 70.299.159.022 dana yang sudah terealisasi sebesar Rp.

60.841.791.738 atau 87%, terdiri dari 1 kegiatan daya serapnya paling rendah adalah kegiatan Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin sebesar 48% dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, dan 5 kegiatan terealisasi diatas 90 % salah satu kegiatannya Peningkatan Mutu Kesehatan sebesar 97% yang dilaksanakan oleh RS Jiwa.

Indikator Kinerja program ini antara lain 1) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM Kesehatan (Meliputi Dokter/Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan Tenaga kesehatan lainnya), Meningkatnya profesionalisme SDM Kesehatan dan Non Kesehatan RS. Jiwa Provinsi Jawa Barat, Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dan RSUD Al Ihsan, 2) Terlaksananya Pengadaan Obat Buffer Stok, 3) Meningkatnya Kualitas pelayanan Rumah Sakit terhadap Masyarakat, Terlayannya tindakan pelayanan penunjang dignostik medik, Tersedianya Makanan dan Minuman Pasien dan makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh pegawai, 4) Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana

### **III. Urusan Pekerjaan Umum**

Terdapat 9 program urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan pada Tahun 2104. Kinerja anggaran rata-rata adalah sebesar 83,74% (predikat kinerja tinggi). Kinerja anggaran program terendah untuk Urusan Pekerjaan Umum adalah program Pembinaan Jasa Konstruksi, yaitu sebesar 61,70%, sedangkan kinerja anggaran tertinggi adalah Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, yaitu sebesar 97,63% (sangat tinggi).

#### **1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**

Program ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan Perencanaan Jalan, Peningkatan Jalan, Pengawasan Jalan dan Monitoring Jalan kewenangan provinsi. Terdapat 12 kegiatan pada program Pembangunan Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan pada Tahun 2104. Indikator kinerja program ini adalah aksesibilitas jalan dan tingkat kemantapan jalan. Target aksesibilitas jalan pada Tahun 2014 adalah sebesar 0,98165 km/km2 dan tingkat kemantapan jalan ditargetkan 97,5-97,7%. Tingkat aksesibilitas pada Tahun 2014 masih seperti kondisi tahun 2013 sebesar 0,98119 km/km2, hal ini dikarenakan pembangunan jalan pada Tahun 2014 belum terlaksana, sementara untuk tingkat kemantapan jalan telah mencapai target yaitu

sebesar 97,7%. Alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 430,66 Milyar, dan terealisasi sebesar Rp. 306,72 Milyar, atau sebesar 71,22%.

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Terdapat 13 kegiatan pada program Pembangunan Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan pada Tahun 2104. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan Penanganan kerusakan jalan dan jembatan yang harus ditangani segera. Indikator kinerja program ini adalah tingkat kemantapan jalan seperti tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat, adapun target pada Tahun 2014 adalah sebesar 97,5-97,7%. Capaian kinerja Tahun 2014 telah mencapai target yaitu sebesar 97,7%. Alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 396,32 Milyar, dan terealisasi sebesar Rp. 379,9 Milyar, atau sebesar 95,85%.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebanyak 2 kegiatan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang diaplikasikan ke dalam kegiatan-kegiatan seperti Pengadaan Peralatan Jalan dan Revitalisasi Laboratorium dan Workshop. Indikator kinerja program ini adalah tingkat ketersediaan sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan, adapun target pada Tahun 2014 adalah sebesar 65-66 %. Capaian kinerja untuk tingkat ketersediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan telah mencapai target, yaitu sebesar 66.00%. Alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 38,98 Milyar, dan terealisasi sebesar Rp. 36,40 Milyar, atau sebesar 93,38%.

4. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan dalam 4 kegiatan, yang meliputi kegiatan Penyusunan Data Base Leger Jalan, Sosialisasi Kebinamargaan, Pembinaan Pemanfaatan Jalan dan Pelaksanaan Pengujian Tanah dan Bahan Jalan. Indikator kinerja program ini adalah tingkat Ketersediaan Informasi Jalan dan Jembatan. Adapun target pada Tahun 2014 adalah sebesar 96-97%. Capaian kinerja untuk tingkat Ketersediaan Informasi Jalan dan Jembatan telah mencapai target yaitu sebesar 97.00%. Untuk kinerja anggaran, dari alokasi sebesar Rp. 700 Juta, terealisasi sebesar Rp. 659,39 Juta, atau sebesar 94,19%.

5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Terdapat 5 kegiatan dalam program ini dengan realisasi kinerja anggaran rata-rata sebesar 93,23%. Untuk kinerja anggaran, dari alokasi sebesar Rp. 72,45 Milyar, terealisasi sebesar Rp. 70,74 Milyar, atau sebesar 97,63%.

6. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Terdapat 15 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32,99 Milyar dan realisasi sebesar Rp. 25,15 Milyar atau sebesar 76,24%.

7. Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai

Terdapat 2 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6,06 Milyar dan realisasi sebesar Rp. 5,72 Milyar, atau sebesar 94,36%

8. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Seluruhnya terdapat 26 kegiatan. Terdapat satu kegiatan yang tidak terlaksana karena lokasi kegiatan berada di kawasan konservasi, yaitu pembangunan Masjid Rancabuaya sebesar 4.730.171.500. Rata-rata capaian kinerja anggaran adalah sebesar 80,16%.

9. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Terdapat 2 kegiatan, yang dilaksanakan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,35 Milyar, dan terealisasi sebesar Rp. 1,49 Milyar, atau sebesar 61,62%.

#### **IV. Urusan Penataan Ruang**

Terdapat 1 program Urusan Penataan Ruang yang dilaksanakan pada Tahun 2104, yaitu Program Penataan Ruang. Kinerja anggaran adalah sebesar 94,34% (kinerja tinggi). Kinerja anggaran kegiatan terendah untuk Urusan Penataan Ruang adalah sebesar 85,24%, sedangkan kinerja anggaran tertinggi sebesar 96,43%.

#### **V. Urusan Kepemudaan dan Olah raga**

Urusan Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari 2 program, jumlah seluruh kegiatan sebanyak 25 kegiatan, penanggung jawab kegiatan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda dan Biro Pengembangan Sosial Dasar, dengan jumlah dana sebesar Rp. 171.274.223.200 yang terealisasi sebesar Rp. 132.539.542.578 atau 77% (data sementara), Kinerja

program terendah adalah Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga sebesar 94% dan tertinggi Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda sebesar 94%, rincian per program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda, jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan, penanggung jawab Dinas Olahraga dan Pemuda dan Biro Pengembangan Sosial, dengan jumlah dana sebesar Rp. 19.227.350.000 dana yang sudah terealisasi sebesar Rp.18.098.458.300 atau 94%, terdiri dari 1 kegiatan yang terealisasi diatas 80% untuk kegiatan Peningkatan Potensi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda, dan 6 kegiatan yang terealisasi diatas 90%, salah satu kegiatannya Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebesar 99,68%.

Indikator Kinerja program ini antara lain 1) Meningkatnya pembinaan karakter pemuda, Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan menuju Jawa Barat juara, Meningkatnya peranserta organisasi kepemudaan dalam pembangunan, Meningkatnya rasa nasionalisme melalui LTUB di kalangan Pemuda/Pelajar di Jab, Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Pemuda dibidang Kewirausahaan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup, 2) kemandirian peraih inovasi Jawa Barat Jawa Barat menuju wiraswasta mandiri, terpilihnya 10 orang Inovasi dan 5 orang prakarsa yang berkontribusi dalam pembangunan Jawa Barat di bidang pendidikan, pangan, energi, seni budaya, pariwisata, lingkungan hidup, infrastruktur, rekayasa sosial.

2. Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga, jumlah kegiatan sebanyak 18 kegiatan, penanggung jawab Dinas Olahraga dan Pemuda, dengan jumlah dana sebesar Rp.152.046.873.200 dana yang sudah terealisasi sebanyak Rp. 114.441.084.278 atau 75% terdiri dari 2 kegiatan daya serapnya rendah antara 0,7 – 13%, 9 kegiatan yang diatas 90%.

Indikator Kinerja program ini antara lain 1) Meningkatnya dukungan terhadap olahraga prestasi secara berkelanjutan dan olahraga masyarakat, Meningkatnya dukungan terhadap olahraga prestasi secara berkelanjutan dan olahraga masyarakat, Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dan organisasi dalam berolahraga, 2) Meningkatnya Prasarana dan Sarana Olahraga, Mendukung pembangunan gelanggang olahraga di kota/kabupaten, Terbangunnya Pembangunan Lanjutan Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu (SPORt) Jabar Arcamanik, Perencanaan dan terlealisasinya Anggaran Tahun 2014, Terpenuhinya Fasilitas PB. PON dalam rangka



persiapan PON XIX Tahun 2016, 3) Tersedianya tenaga pembina/penggerak olahraga (SP3OR), Sukses Persiapan Penyelenggaraan POPDA Tahun 2014 dan Terpantaunya kekuatan POPWILNAS di 5 Wilayah dengan peningkatan prestasi yang optimal menuju POPNAS 2015, Adanya kegiatan/event yang secara langsung di lapangan/daerah untuk mengajak dan memotivasi masyarakat untuk berolahraga.

## **VI. Urusan Ketenagakerjaan**

Urusan Ketenagakerjaan terdiri dari 3 program, jumlah seluruh kegiatan sebanyak 15 kegiatan, penanggung jawab kegiatan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Biro Pengembangan Sosial, dengan jumlah dana sebesar Rp. 37.982.554.048 yang terealisasi sebesar Rp. 31.621.764.080 atau 83,25% (data sementara), Kinerja program yang terendah mencapai sebesar 74% untuk Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dan capaian tertinggi sebesar 95,55% untuk Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga, rincian per program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga, jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan, penanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan jumlah dana sebesar Rp. 14.262.367.048 dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 13.627.584.080,00 atau 95,55% terdiri dari 1 kegiatan yang terealisasi sebesar 82% untuk Kegiatan Peningkatan Standarisasi, Sertifikasi dan Kompetensi Tenaga Kerja, hal ini terjadi dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan formal mayoritas angkatan kerja di Jawa Barat, sehingga berpengaruh pada produktivitas dan nilai tambah pekerja dan pencari kerja; dan 4 kegiatan yang terealisasi diatas 90%, salah satu kegiatannya Pelatihan Berbasis Kompetensi Pelatihan Ketenagakerjaan Berbasis Kompetensi sebesar 99,38%; dan 1 kegiatan yang terealisasi 100% untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Indikator Kinerja program ini antara lain 1) Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan, Meningkatnya Keterampilan, Keahlian, Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Barat, 2) Meningkatnya jumlah Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja pada sektor formal dan meningkatnya kompetensi tenaga kerja di Jawa Barat melalui Pelatihan, 3) Meningkatnya kualitas Pencari Kerja ke Luar Negeri.

2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, jumlah kegiatan sebanyak 4 kegiatan, penanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan

Trasmigrasi, dan Biro Pengembangan Sosial, dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.637.345.000 dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 2.382.428.500 atau 90,34% terdiri dari 1 kegiatan yang terealisasi diatas 83% untuk Kegiatan Peningkatan Jaminan Sosial Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, hal ini terjadi masih belum optimalnya mekanisme kerja kelembagaan ketenagakerjaan yaitu Tripartit, Dewan Pengupahan dan Serikat Pekerja/Buruh dalam upaya pengembangan lembaga ketenagakerjaan di Jawa Barat; dan 3 kegiatan yang terealisasi diatas 90% , salah satu kegiatannya Fasilitasi Inovasi dan Prakarsa Jawa Barat dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Sosial.

Indikator Kinerja program ini antara lain 1) Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan kesejahteraan tenaga kerja, Meningkatnya perlindungan serta peran dan fungsi kelembagaan ketenagakerjaan, 2) Terlindungnya Tenaga Kerja melalui optimalisasi pemeriksaan Norma–norma Ketenagakerjaan.

3. Program Peningkatan Kesempatan kerja, jumlah kegiatan sebanyak 4 kegiatan, penanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, dengan jumlah dana sebesar Rp. 21.082.842.000 dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 15.611.751.500 atau 74,05%, terdiri dari 1 kegiatan yang terealisasi hanya 59%, untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan TKI Jawa Barat, dan 1 kegiatan yang terealisasi 86% (tertinggi), untuk Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja AKL, AKAD/AKAN.

Indikator Kinerja program ini antara lain 1) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor Jasa, Industri, Perdagangan dan Pertanian; Meningkatnya persebaran persediaan tenaga kerja dan optimalisasi penempatan tenaga kerja sektor formal dan tenaga kerja penyandang Disabilitas melalui mekanis antar kerja (AKL) di sektor pertanian, perdagangan, industri manufaktur dan jasa, 2) Meningkatkan daya saing TKI asal Jawa Barat.

## **VII. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak**

Urusan Ketenagakerjaan terdiri dari 2 program, jumlah seluruh kegiatan sebanyak 16 kegiatan, penanggung jawab kegiatan oleh BP3AKB dan Biro Pengembangan Sosial, dengan jumlah dana sebesar Rp. 11.194.735.000 yang terealisasi sebesar Rp. 8.698.077.956 atau 77,70% (data sementara), Kinerja program terendah untuk Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, sebesar 71,35%,

dan Kinerja program tertinggi untuk Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender sebesar 92%, rincian per program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender , jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan, penanggung jawab BP3AKB, dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.430.000.000 dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 3.158.170.592 atau 92,08% terdiri dari 1 kegiatan yang terealisasi 89%, untuk Kegiatan Gerakan Pengarusutamaan Gender, dan 2 kegiatan yang terealisasi diatas 90%, salah satu kegiatan Gerakan Pengarusutamaan Keluarga sebesar 98%.

Indikator Kinerja program ini antara lain 1) Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, jumlah kegiatan sebanyak 13 kegiatan, penanggung jawab BP3AKB dan Biro Pengembangan Sosial, dengan jumlah dana sebesar Rp. 7.764.735.000 dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 5.539.907.364 atau 71,35%, Kinerja program terendah pada Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Korban Kekerasan Jawa Barat sebesar 14%, dan kinerja tertinggi untuk kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Keluarga, HKSN, BBGRM, dan PHI Tingkat Nasional dan Provinsi sebesar 99,62%, dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Sosial.

Indikator Kinerja program ini antara lain 1) Pengokohan Ketahanan Keluarga sebagai Basis Ketahanan Sosial, Terwujudnya Pemahaman tentang Pengembangan Kota Layak Anak di Kab/Kota se Jawa Barat, Meningkatnya upaya pemberdayaan pengetahuan keterampilan dan kemandirian perempuan, 2) Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak melalui Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking), Tersosialisasikannya program – program KPPI Jawa Barat, Meningkatnya Sinergitas dan Kinerja Program Provinsi dan Kab/Kota dalam Pelaksanaan P2WKSS, Meningkatnya Pendapatan dan Keterampilan Perempuan Eks Korban Kekerasan serta persamaan kedudukan, hak & kewajiban perempuan dalam pembangunan.

### **VIII. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Urusan Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera terdiri dari 1 program, jumlah seluruh kegiatan sebanyak 4 kegiatan, penanggung jawab kegiatan oleh BP3AKB, dengan jumlah dana sebesar Rp. 8.159.522.500 yang terealisasi sebesar Rp. 2.093.570.100 atau 25,66% (data sementara), rincian per program sebagai berikut :

1. Program Keluarga Terencana jumlah kegiatan sebanyak 4 kegiatan, penanggung jawab BP3AKB, dengan jumlah dana sebesar Rp. 8.159.522.500 yang terealisasi sebesar Rp. 2.093.570.100 atau 25,66% ,terdiri dari 1 kegiatan daya serap terkecil untuk Kegiatan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Motivator Ketahanan Keluarga (MOTOKAR) sebesar 18,80%, 1 kegiatan terealisasi sebesar 75,26% (tertinggi) untuk kegiatan Ketahanan Keluarga.

Indikator Kinerja program ini antara lain 1) Pengokohan Ketahanan Keluarga sebagai Basis Ketahanan Sosial, 2) Terwujudnya Pemahaman tentang Pengembangan Kota Layak Anak di Kab/Kota se Jawa Barat, Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking).

### **IX. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari 2 program, jumlah seluruh kegiatan sebanyak 21 kegiatan, penanggung jawab kegiatan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Biro Humas, Protokol dan Umum Setda, dan Biro Pemerintahan Umum, dengan jumlah dana sebesar Rp. 40.803.608.000 dana yang terealisasi sebesar Rp. 35.840.687.632 atau 87,84%, Kinerja program terendah adalah Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat sebesar 86,77%, sedangkan kinerja tertinggi untuk program Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebesar 92,63%, rincian per program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat, jumlah kegiatan sebanyak 13 kegiatan, penanggung jawab Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Biro Humas, Protokol dan Umum Setda, dengan jumlah dana sebesar Rp. 33.357.343.000 dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 28.943.378.062 atau 86,77%, terdiri dari 1 kegiatan yang terealisasi hanya 20,85% untuk kegiatan Gerai Gelar Produk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP); dan 4 kegiatan terealisasi diatas 90% salah satu kegiatannya adalah Menyelenggarakan Pesta Rakyat Tahun

Anggaran 2014 sebesar 99,92%, sedangkan untuk kegiatan yang lainnya rata-rata mencapai 86%.

Indikator Kinerja program ini anatara lain 1)Tingkat keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan meningkatnya pengetahuan serta pemahaman aparat dan pokmas dalam hal perbaikan RUTILAHU, Meningkatnya Pengelolaan Data dan kebijakan fasilitasi TTG dan tersosialisasikannya produk TTG Jawa Barat, 2) Meningkatnya kapasitas teknik Pokjanal Posyandu Kab/Kota dan mengembangkan Sistem Informasi Posyandu, meningkatnya partisipasi masyarakat dan peran lembaga kemasyarakatan desa, 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BBGRM dan bertambahnya jumlah KPM serta meningkatnya kualitas KPM, Meningkatnya pengetahuan pengelola BUMDes dan Pasar Desa dalam mengelola usahanya, dan terfasilitasinya produk PNPM Mandiri perdesaan.

2. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, jumlah kegiatan sebanyak 8 kegiatan, penanggung jawab Biro pemerintah Umum, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan jumlah dana sebesar Rp. 7.446.265.000 dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 6.897.309.570 atau 92,63%, 1 kegiatan yang terealisasi 74,18% untuk kegiatan Peningkatan Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan, dan 5 kegiatan yang terealisasi diatas 90%, salah satu kegiatannya adalah Membangun Infrastruktur Perdesaan sebesar 95,89%, sedangkan untuk kegiatan lainnya rata-rata mencapai 90%.

Indikator Kinerja program ini anatara lain 1) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpetaan dan penggunaan GPS, tersedianya laporan fakta dan analisa penataan ruang kawasan perdesaan dengan tipologi desa pertambangan dan desa perkebunan; terinformasikannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2) Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Desa Terhadap Masyarakat, Terlaksananya Evaluasi hasil program pembangunan pemerintah dengan masyarakat baik dalam partisipasi maupun keswadayaan, Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, Bimbingan Teknis pemerintahan Desa dan meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan Desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## **X. Urusan Sosial**

Urusan Sosial terdiri dari 4 program, jumlah seluruh kegiatan sebanyak 57 kegiatan, penanggung jawab kegiatan oleh Dinas Sosial dan Biro Pengembangan Sosial, dengan jumlah dana sebesar Rp. 49.193.880.445 dana yang terealisasi sebesar Rp. 41.752.363.743 atau 84,87% (data sementara), Kinerja program yang terendah untuk yaitu Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar 72,02%, dan kinerja program tertinggi yaitu Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat sebesar 94,74%, rincian per program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan, penanggung jawab Dinas Sosial, dengan jumlah dana sebesar Rp. 500.000.000 dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 360.091.000 atau 72,02%, terdiri dari 1 kegiatan yang terealisasi 64,24%, untuk Kegiatan Bimbingan Sosial dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, hal ini terjadi dikarenakan jumlah populasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang ditangani tidak seimbang dengan jumlah populasi yang ada, dan keterbatasan fasilitas sarana prasarana rumah perlindungan/rumah aman bagi perempuan dan anak di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) swasta masih terbatas; dan 1 kegiatan yang terealisasi sebesar 90% yaitu Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi, output yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan keterampilan usaha kesejahteraan sosial KBS Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

Indikator Kinerja program ini antara lain 1) Meningkatnya Perlindungan dan Pemulihan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan pekerja Migran, Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Perempuan yang berbasis kemandirian

2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, jumlah kegiatan sebanyak 32 kegiatan, penanggung jawab Dinas Sosial, Biro Pengembangan Sosial, dengan jumlah dana sebesar Rp. 36.676.808.000 dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 30.088.128.388 atau 82,04%, terdiri dari 1 kegiatan yang daya serapnya rendah untuk kegiatan Fasilitasi Penanganan Anak Jalanan Terpadu Bersama Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebesar 32%, hal ini dikarenakan ketersediaan gedung/bangunan untuk pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) masih terbatas, sedangkan jumlah klien PMKS semakin bertambah; 1 kegiatan yang terealisasi 100% untuk Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Miskin dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE), kegiatan ini berbentuk kegiatan administrasi, identifikasi, bimbingan sosial bagi KBS keluarga miskin, monitoring dan pelaporan, yang dilakukan oleh petugas Dinas Sosial. Sedang untuk kegiatan lainnya, capaian pelaksanaan rata-rata diatas 80%.

Indikator Kinerja program ini antara lain 1) Terbangunnya Gudang Bencana Alam, Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan fakir miskin, KAT dan PMKS, putus sekolah, dalam mewujudkan Kesejahteraan Sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi serta peran sosialnya secara wajar sebagai SDM yang berkualitas, Terlayannya, Terlindunginya dan Tersantuninya Lanjut Usia, PMKS, dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesuai tahap perkembangan/pertumbuhan anak, 2) Terfasilitasi, Terlayani dan Terrehabilitasinya upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan korban NAPZA di masyarakat, 3) Adanya Perubahan Sikap, Kemauan dan Kemampuan dari Gelandangan dan Pengemis, Orang Terlantar, Korban Tindak Kekerasan, Trafficking dan Anak Jalanan anak nakal/anak berhadapan dengan hukum dalam melaksanakan kehidupan sosial masyarakat.

3. Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), jumlah kegiatan sebanyak 6 kegiatan, penanggung jawab Dinas Sosial, dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.794.000.000 dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 2.566.270.705 atau 91,85%, terdiri dari 1 kegiatan yang terealisasi terendah sebesar 74,69% untuk kegiatan Bimbingan Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Sosial; dan 1 kegiatan yang terealisasi paling tinggi sebesar 99,53% untuk kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial pada BPPS, sedangkan untuk kegiatan lainnya rata-rata mencapai 90%.

Indikator kinerja program ini antara lain 1) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan tenaga kesejahteraan sosial secara profesional, dan kemampuan calon penyelenggara dan pelaksana teknis di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tentang Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang, 2) Meningkatnya partisipasi sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna, PSM dan Orsos) dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Keterpaduan

dalam Penanganan Penyandang Disabilitas antar Instansi terkait dan organisasi masyarakat /LKS/Orsos .

4. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat, jumlah kegiatan sebanyak 17 kegiatan, penanggung jawab Dinas Sosial, Biro Pengembangan Sosia dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah dana sebesar Rp. 9.223.072.445 dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 8.737.873.650 atau 94,74%, terdiri dari 1 kegiatan yang terealisasi sebesar 75,91% untuk kegiatan Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Rawan Bencana; 1 kegiatan yang terealisasi paling tinggi sebesar 99,95% untuk kegiatan Fasilitasi Dan Perlindungan Sosial Korban Bencana, sedangkan untuk kegiatan lainnya rata-rata sebesar 90%.

Indikator Kinerja program ini antara lain 1) Terinventarisasinya *Networking Trauma Center* pada level masyarakat dan terlatihnya relawan/pendampingan pemulihan trauma kesehatan pasca bencana, pasca bencana kluster konstruksi, 2) Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana, Meningkatkan kemampuan dan jumlah sumber daya penanggulangan bencana, teridentifikasinya bahaya yang berpotensi menimbulkan bencana dan seluruh dampak yang terjadi di wilayah Jawa Barat, 3) meningkatnya kemampuan masyarakat dan tersedianya rumah siap bangun pascabencana, 4) Meningkatkan Mitigasi Bencana dan adaptasi terhadap perubahan Iklim, terlatihnya dan meningkatnya kemampuan relawan penanggulangan bencana dan terhubungnya kembali akses daerah yang terputus, 5) meningkatnya pemahaman dan kesadaran bagi aparaturnya kabupaten/kota di daerah rawan bencana Jawa Barat.

## **XI. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari 2 program, jumlah seluruh kegiatan sebanyak 21 kegiatan, penanggung jawab kegiatan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Biro Humas, Protokol dan Umum Setda, dan Biro Pemerintahan Umum, dengan jumlah dana sebesar Rp. 40.803.608.000 dana yang terealisasi sebesar Rp. 35.840.687.632 atau 87,84%, Kinerja program terendah adalah Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat sebesar 86,77%, sedangkan kinerja tertinggi untuk program Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebesar 92,63%, rincian per program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat, jumlah kegiatan sebanyak 13 kegiatan,



penanggung jawab Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Biro Humas, Protokol dan Umum Setda, dengan jumlah dana sebesar Rp. 33.357.343.000 dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 28.943.378.062 atau 86,77%, terdiri dari 1 kegiatan yang terealisasi hanya 20,85% untuk kegiatan Gerai Gelar Produk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP); dan 4 kegiatan terealisasi diatas 90% salah satu kegiatannya adalah Menyelenggarakan Pesta Rakyat Tahun Anggaran 2014 sebesar 99,92%, sedangkan untuk kegiatan yang lainnya rata-rata mencapai 86%.

Indikator Kinerja program ini antara lain 1)Tingkat keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan meningkatnya pengetahuan serta pemahaman aparat dan pokmas dalam hal perbaikan RUTILAHU, Meningkatnya Pengelolaan Data dan kebijakan fasilitasi TTG dan tersosialisasikannya produk TTG Jawa Barat, 2) Meningkatnya kapasitas teknik Pokjanal Posyandu Kab/Kota dan mengembangkan Sistem Informasi Posyandu, meningkatnya partisipasi masyarakat dan peran lembaga kemasyarakatan desa, 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BBGRM dan bertambahnya jumlah KPM serta meningkatnya kualitas KPM, Meningkatnya pengetahuan pengelola BUMDes dan Pasar Desa dalam mengelola usahanya, dan terfasilitasinya produk PNPM Mandiri perdesaan.

2. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, jumlah kegiatan sebanyak 8 kegiatan, penanggung jawab Biro pemerintah Umum, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan jumlah dana sebesar Rp. 7.446.265.000 dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 6.897.309.570 atau 92,63%, 1 kegiatan yang terealisasi 74,18% untuk kegiatan Peningkatan Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan, dan 5 kegiatan yang terealisasi diatas 90%, salah satu kegiatannya adalah Membangun Infrastruktur Perdesaan sebesar 95,89%, sedangkan untuk kegiatan lainnya rata-rata mencapai 90%.

Indikator Kinerja program ini antara lain 1) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpetaan dan penggunaan GPS, tersedianya laporan fakta dan analisa penataan ruang kawasan perdesaan dengan tipologi desa pertambangan dan desa perkebunan; terinformasikannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2) Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Desa Terhadap Masyarakat, Terlaksananya Evaluasi hasil program

pembangunan pemerintah dengan masyarakat baik dalam partisipasi maupun keswadayaan, Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, Bimbingan Teknis pemerintahan Desa dan meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan Desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

### **2.2.2. Pencapaian Misi RPJMD**

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan lima (5) misi yang akan dicapai. Pencapaian misi-misi ini perlu untuk selalu dievaluasi sebagai masukan bagi perbaikan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat. Evaluasi pencapaian misi pembangunan Jawa Barat dilakukan melalui evaluasi terhadap berbagai indikator RPJMD, evaluasi terhadap pelaksanaan program APBD Tahun 2014 dan evaluasi terhadap data-data BPS. Berdasarkan pada hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka pencapaian misi pembangunan Provinsi Jawa Barat dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 2. 13.****Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2013		2014		TARGET 2015	TARGET 2016
			Target	Capaian	Target	Capaian		
MISI PERTAMA : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing								
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,75 – 74,25	73,40	74,25 – 74,75	74,28	74,75 – 75,50	75,50-76,00
2	Indeks Pendidikan	Poin	82,75	82,31	84,65	83,36	85,50	86,00
3	Angka Melek Huruf	Persen	97,00 – 97,50	96,49	97,50 – 98,00	98,29	98,00 – 98,50	98,50-99,00
4	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten	Tahun	8,20 – 8,25	8,09	8,25 – 8,30		8,30 – 8,50	8,50-8,75
5	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota	Tahun	9,25 – 11,00	n/a	9,50 – 11,25		9,75 – 11,50	10,25-11,75
6	APK Sekolah Menengah	Persen	72,68	72,68	80,48	72,89	87,48	92,80
7	APK Sekolah Tinggi	Persen	16 – 17	17,09	17 – 18	19,19	18 - 19	19-20
8	Indeks Kesehatan	poin	72,60	72,99	75,60	73,32	76,53	77,00
9	AHH (Angka Harapan Hidup)	Tahun	68,70 – 68,90	68,80	69 - 69,2	68,83	70 - 70,25	70,5-71
10	Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat hak paten	Buah	5	5	10	5	20	25
11	Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun keatas	Orang	11.400.000	11.400.000	12.540.000	11.400.000	13.794.000	15.173.400
12	Indeks Pembangunan Gender		65-66	69,70	70	70	72,02	73
MISI KEDUA : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan								
1.	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	72	74,9	74		76	78

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2013		2014		TARGET 2015	TARGET 2016
			Target	Capaian	Target	Capaian		
2.	Pencetakan Sawah Baru	Ha	400	400	5.000	5000	25.000	50.000
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	109 – 110	109 – 110	110 – 111	112 - 113	111 – 112	112 - 113
4.	Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Pertanian	Buah	130	130	205		305	415
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	63,80 – 64,00	63,01	64,00 – 65,00	62,77	65,00 – 66,00	66,00 – 67,00
6.	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	21,25 - 21,50	23,60	21,50 – 22,00	30,02*)	22,00 – 24,00	24,00 – 26,00
7.	PDRB Per Kapita (ADHK)	Juta Rupiah	8,5 - 9,0	8,53	9,00 – 9,50	24,94	9,50 – 11,00	11,00 – 13,00
8.	Laju Pertumbuhan Ekspor	Persen	5,5 – 6,0	n/a	6,0 – 6,5	14,83	6,5 - 7,0	7,0 - 7,5
9.	Nilai Investasi PMA – PMDN	Trilyun Rupiah	76,52 – 85,55	93,53	85,55 – 95,81	62,83	95,81 – 107,79	107,79 - 121,80
10.	Nilai Investasi PMDN	Trilyun Rupiah	16 - 17	26,01	17 – 19	13,84	19 - 21	21 - 23
11.	Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)	Trilyun Rupiah	60 - 70	67,5	65 – 75	48,98	75 - 85	85 – 95
12.	Nilai Investasi/PMTB adhb	Trilyun Rupiah	154,18 - 174,2	194,33	174,2 - 194,2	305,989	198,6 - 208,6	226,40 – 246,40
13.	Inflasi	Persen	8,5 – 9,5	8,15	6,0 - 7,0	6,16	6,3 - 7,3	4,5 – 5,5
14.	Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha	Orang	5.750	n/a	6.250	5.101	7.250	7.750
15.	Indek Daya beli	Poin	64,17	65,08	64,00	65,47	64,45	65,00
16.	Daya Beli Masyarakat	ribu rupiah	640,55	641,63	645,00	644,36	650,00	655,00
17.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen per Tahun	6-6,5	6,06	5,90 – 6,50	5,07	6,20 – 6,80	6,3 - 6,9
18.	Indeks Gini	Poin	0,18-0,19	0,41	0,38-0,37	0,42	0,37 – 0,36	0,35 – 0,34
<b>MISI KETIGA : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik</b>								
1.	Skala Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Skala 1 - 4	3	3	3	3	4	4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2013		2014		TARGET 2015	TARGET 2016
			Target	Capaian	Target	Capaian		
2.	Jumlah Penerbitan Perijinan	Izin	39,029	n/a	42,931		47,224	47,224
3.	Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	11,0	11,00	12,1	12,36	13,3	13,3
4.	Indikator Daya Saing Provinsi	Rangking	6 - 5	n/a	5 - 4	5	4 - 3	4 - 3
5.	Skala Komunikasi Organisasi	Skala 1 - 7	n/a	n/a	3		3,5	3,5
6.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	50	n/a	60		70	70
7.	Indeks Persepsi Korupsi	Poin	5,5	n/a	6	3,7	6,5	6,5
8.	Indeks Kebahagiaan	Poin	55 - 57	65,11	57 - 59	68,28	59 - 61	59 - 61
9.	Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum	Persen	57	n/a	60	71,3	63	63
10.	Indeks Demokrasi	Poin	66,20 - 66,50	65,18	66,50 - 67,00		67,00 - 67,50	67,00 - 67,50
<b>MISI KEEMPAT : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan</b>								
1.	Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	45,284,2	45,340,8	46,035,9	46,029,6	46,800,1	47,577,0
2.	Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah	Persen	36 - 37	n/a	37 - 38	37,2	38 - 39	39 - 41
3.	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen per Tahun	3 - 2	2,7	4 - 3		5 - 4	6 - 5
4.	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi	Persen	11,5 - 12,03	15,83	12,03 - 25,09	17,02	25,09 - 39,77	39,77 - 53,64
5.	Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Persen	64 - 66	65,98	66 - 71	67,37	71 - 76	76 - 81
6.	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	Persen	78-80	83,77	80 - 82	83,77	82 - 84	84 - 86
7.	Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan)	Persen	63-64	64,70	64 - 65	64,88	65 - 67	67 - 69
8.	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	54-58	60,52	58 - 63	61,43	63 - 70	70 - 73

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2013		2014		TARGET 2015	TARGET 2016
			Target	Capaian	Target	Capaian		
9.	Cakupan Pelayanan Air Limbah (Domestik Perkotaan)	Persen	63,00-63,50	63,40	63,5 - 64	63,6	64 - 65	65 - 67
10.	Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang	Persen	9,6 - 10,4	9,6	10,4 - 10,8	13,14	10,8 - 11,2	11,2 - 11,7
11.	Tingkat Kemantapan Jalan (kondisi baik dansedang) <sup>1)</sup>	Persen	93-94	97,56	97,10 - 97,4	97,68	97,20 - 97,50	97,3 - 97,6
<b>MISI KELIMA : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal</b>								
1.	Angka Kemiskinan	Persen	8,80 - 7,80	9,61	7,80 - 6,80	9,44	6,80 - 5,90	5,90-5,00
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,00 - 8,50	9,22	8,50 - 8,00	8,45	8,00 - 7,50	7,50-7,00
3.	Jumlah PMKS yang Ditangani	Orang	479.255	n/a	527.181	2.582	579.899	637.888
4.	Jumlah Pekerja Anak	Orang	562.815	n/a	551.558		540.527	529.717
5.	Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional	Orang	1	n/a	2	2	3	3
6.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (target optimis)	Ribu Orang	900	800	1.000	902,7	1.250	1.500
7.	Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional	Buah	3	4	3	3	5	7
8	Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama	Poin	3	n/a	3		4	4

Sumber : RPJMD Prov. Jawa Barat 2013-2018BPS Prov. Jawa Barat Draft Buku Data LKPJ Tahun 2014

Dalam rangka penurunan tingkat korupsi di Jawa Barat telah diwujudkan hal-hal berikut:

- 1) Penetapan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013 sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 2) Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- 3) Penyusunan data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 4) Pengukuhan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014;
- 5) Dilaksanakannya Bintek RANHAM dan sosialisasi RANHAM, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014;
- 6) Penanganan kasus korupsi di wilayah Jawa Barat sebanyak 199 kasus selama dua tahun dengan perincian : yang terjadi pada Tahun 2009 sebanyak 95 kasus, dan 104 kasus terjadipada Tahun 2010.

Adapun untuk partisipasi masyarakat dengan indikator tingkat partisipasi masyarakat, dimana dalam Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah di beberapa daerah kabupaten/kota yang telah melaksanakan Pemilu pada kurun 2008-2012 masih di bawah target, rata-rata mencapai sekitar 65 persen dan pada Pemilu Gubernur 63,66 persen.

Pengendalian kamtibmas di Jawa Barat cukup terkendali, hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya seperti:

- 1) Pemantapan Bela Negara, Fasilitas Penyelenggaraan Pemeliharaan Keten-teraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat, sejak Tahun 2008 menghasilkan kesadaran masyarakat dalam bela negara dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta terjalinnya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Polda Jabar.
- 2) Secara bertahap dan sistematis telah dilakukan Penguatan Ketahanan Bangsa dalam Pencegahan Konflik di Jawa Barat, Bimbingan Pembinaan pada Ormas, LSM

dan generasi muda, Pemantapan Kondisi Sosial Politik di Jawa Barat, sehingga selama Tahun 2008-2012 di Jawa Barat tidak terjadi konflik antarwarga, konflik SARA seperti antar pemeluk agama Islam dan Ahmadiyah dapat diselesaikan dengan baik.

### **2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan di Jawa Barat hingga saat ini dapat diuraikan berdasarkan urusan sebagai berikut:

#### **1. Pendidikan**

Permasalahan pada Urusan Pendidikan adalah rawan *Drop Out* (DO) yang didominasi anak SD dan SMP; kurangnya sarana dan prasarana pendukung dan penunjang pendidikan; belum optimalnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan

#### **2. Kesehatan**

Permasalahan pada Urusan Kesehatan adalah: belum optimalnya perencanaan sumber daya manusia bidang tenaga kesehatan, sarana dan prasarana baik secara kuantitatif maupun kualitatif; kurang meratanya penyebaran tenaga kesehatan di Jawa Barat yang penempatannya masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan; masih rendahnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk memelihara lingkungan sehat serta masih kurangnya pendekatan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

#### **3. Lingkungan Hidup**

Permasalahan pada Urusan Lingkungan Hidup, masih sering terjadi banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek, serta degradasi kawasan hulu DAS prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) sampai ke wilayah pesisir. Secara garis besar permasalahan lingkungan hidup diakibatkan oleh tekanan penduduk yang tinggi, khususnya terjadinya konversi lahan untuk pemukiman dan masalah-masalah yang diakibatkan oleh kurang memadainya pengaturan industri dalam penanganan limbah cair, gas, bahan beracun dan berbahaya.

#### **4. Pekerjaan Umum**

Permasalahan pada Urusan Pekerjaan Umum, belum tuntasnya pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (CISUMDAWU), Soreang-Pasirkoja



(SOROJA), dan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), serta perkembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Di pihak lain, infrastruktur jalan yang baru selesai dibangun di Jabar Selatan sudah mulai mengalami kerusakan di berbagai titik akibat kondisi fisik dasar dan bencana geologi.

Permasalahan pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain:

(1) Pembangunan sumber daya strategis belum terlaksana secara optimal; (2) Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi; dan (3) Kondisi jaringan irigasi juga belum memadai mengingat jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat dan ringan masih sebesar 38,28%.

Permasalahan lain yaitu masih rendahnya akses masyarakat terhadap prasarana air minum yang memenuhi syarat baik di perkotaan maupun di perdesaan, antara lain disebabkan oleh makin terbatasnya sumber air baku untuk air minum, masih rendahnya komitmen Kabupaten/kota dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan air minum, masih rendahnya kinerja kelembagaan pengelola Sistem Penyediaan Air Minum, serta kenaikan jumlah penduduk yang relatif tinggi. Sedangkan permasalahan dalam pengelolaan air limbah adalah masih kurangnya kinerja pengelolaan air limbah domestik karena tidak seluruh sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik menunjukkan kinerja baik sehubungan anggaran untuk operasional dan maintenance di masing-masing Kabupaten/kota sangat kurang.

## 5. Penataan Ruang

Permasalahan pada Urusan Penataan Ruang, tingginya alih fungsi lahan produktif. Luas kawasan lindung sampai dengan akhir Tahun 2014 baru mencapai 37,2% dari luas Jawa Barat, belum mencapai 45% seperti yang ditargetkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat. Implementasi pengembangan PKN secara fungsi dan peran yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat belum optimal terutama yang terkait dengan skala kegiatan ekonomi, pelayanan infrastruktur, serta daya dukung dan daya tampung ruangnya. Secara umum sistem kota hampir seluruhnya mengalami masalah dalam penyediaan sistem sarana dan prasarana. Perbedaan ketersediaan sarana dan prasarana antar wilayah menyebabkan terjadinya

kesenjangan antar wilayah terutama antara wilayah Jawa Barat bagian utara dengan bagian selatan serta antara bagian barat, tengah dan timur.

Sementara itu kondisi PKW secara umum menunjukkan masih diperlukan perbaikan dan dukungan bagi peningkatan kinerjanya di Jawa Barat. Secara umum integrasi antar provinsi baik PKN dan PKW masih rendah. Selain itu masih tingginya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana yang dihadapi Jawa Barat memerlukan upaya yang lebih kuat untuk pemulihan lingkungan dan pengurangan resiko bencana.

#### 6. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan pada Urusan Perencanaan adalah sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antar pusat dan daerah belum optimal; kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih rendah.

#### 7. Perumahan

Permasalahan pada Urusan Perumahan, hingga saat ini tingkat okupansi rumah berkategori sehat di Jawa Barat masih rendah. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi mendorong kebutuhan rumah yang semakin besar. Tahun 2013, kebutuhan akan rumah berkualifikasi sehat mencapai 2,9 juta unit. Sementara kesanggupan penyedia rumah setiap tahunnya hanya 350 ribu unit. Permasalahan penduduk yang berdampak pada penataan kawasan pemukiman yang sehat dan layak di Jawa Barat cukup kompleks. Sebaran penduduk yang kurang merata menyebabkan pembangunan kawasan tidak seimbang. Penduduk masih terkonsentrasi dalam jumlah besar di sejumlah daerah tertentu seperti di cekungan Bandung, Wilayah Bogor, Depok, Bekasi dan Cirebon.

#### 8. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda.

#### 9. Penanaman Modal

Permasalahan pada Urusan Penanaman Modal adalah kualitas infrastruktur pendukung investasi masih belum memadai dan belum merata; kepastian hukum dan jaminan keamanan berusaha belum optimal.

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah anggaran untuk Pencetakan 100 Ribu Wirausahawan Baru belum memadai, sesuai dengan target tahunan, yaitu 3000 orang/tahun, hanya bisa memfasilitasi untuk 300 orang wirausahawan baru; rendahnya SDM, akses pasar, penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan; rendahnya inovasi dan pengembangan produk

11. Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah penduduk migran belum terdokumentasikan secara baik; pengendalian penduduk belum optimal.

12. Ketenagakerjaan

Permasalahan pada Urusan Ketenagakerjaan adalah kualitas tenaga kerja masih rendah; tingginya tingkat pengangguran terbuka usia muda dengan pendidikan SMA ke bawah; rendahnya akses terhadap lapangan kerja; tingginya tingkat pertumbuhan angkatan kerja baru dan arus migrasi masuk.

13. Ketahanan Pangan

Permasalahan pada Urusan Ketahanan Pangan adalah belum seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat, memiliki Kelembagaan Ketahanan Pangan yang memadai (setingkat eselon II) sehingga pelaksanaan program belum berjalan secara sinergis dan optimal; belum semua Kabupaten/Kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan, sementara yang sudah terbentukpun belum berfungsi sebagaimana mestinya.

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah jumlah populasi wanita rawan sosial ekonomi yang ditangani tidak seimbang dengan jumlah populasi yang ada; masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pelaporan peristiwa tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan korban trafficking sehingga data dan penanganan korban sulit dijangkau; meningkatnya permasalahan sosial perempuan dan anak

belum dapat ditangani secara optimal karena fasilitas sarana prasarana rumah perlindungan/rumah aman bagi perempuan dan anak masih terbatas.

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah masih tingginya laju pertumbuhan penduduk yang menurut data statistik terakhir sebesar 1,9% (BPS, Sensus Penduduk 2010). Hal ini antara lain disebabkan masih tingginya total fertility rate (TFR) yakni 2,4 (BPS, Sensus Penduduk 2010), dan masih rendahnya peran serta pria dalam ber-KB, yakni hanya 2,1 % dari keikutsertaan wanita. Di samping itu ancaman dalam kesehatan reproduksi remaja khususnya wanita yang ditandai dengan makin meningkatnya jumlah kawin muda, *trafficking*, penderita HIV dan AIDs, seks pra nikah, serta kasus narkoba.

16. Perhubungan

Permasalahan pada Urusan Perhubungan, belum berkembangnya sistem transportasi masal dan integrasi antar moda angkutan; masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan dan masih tingginya overloading angkutan barang; belum memadainya keberadaan bandar udara untuk menampung penumpang dan barang baik domestik maupun internasional; belum tersedianya pelabuhan laut internasional dan belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau.

17. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pada Urusan Komunikasi dan Informatika adalah pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam penyelenggaraan pemerintah belum optimal; penyebaran informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal.

18. Pertanahan

Permasalahan pada Urusan Pertanahan adalah banyaknya tanah belum bersertifikat; penyelesaian tanah provinsi yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan utama adalah pendidikan politik masyarakat masih rendah; terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat; sinergitas berbagai stakeholder dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Jawa Barat belum optimal; sarana dan prasarana operasional Satlinmas dan penanganan di daerah bencana masih kurang.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian

Permasalahan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah; kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*; masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur; pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat; sumber pendapatan daerah dari BUMD masih terbatas; pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat; belum optimalnya penerapan standar operasional prosedur untuk tiap-tiap proses penyelenggaraan perizinan dan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas. Serta terbatasnya Sarana dan Prasarana kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program termasuk aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki masih belum memadai dalam memperlancar pelayanan publik

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pada Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa adalah minimnya sarana dan prasarana di pedesaan; belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas aparatur desa; rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha; rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa akan potensi alam dan budaya desanya.

22. Sosial

Permasalahan pada Urusan Sosial adalah kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial; belum optimalnya

pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

23. Kebudayaan

Permasalahan pada Urusan Kebudayaan adalah masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal; kurangnya eksplorasi dan inventarisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Jawa Barat; belum terbentuknya skema implementasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal pada tingkatan sosial di Jawa Barat; rendahnya apresiasi dan kecintaan terhadap budaya lokal, dan sejarah Lokal; masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan latar belakang seni sehingga pengelolaan aspek kesenian dirasakan belum optimal.

24. Statistik

Permasalahan pada Urusan Statistik adalah masih rendahnya akses masyarakat terhadap data statistik; referensi data pembangunan yang beragam

25. Kearsipan

Permasalahan utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan

26. Perpustakaan

Permasalahan pada Urusan Perpustakaan adalah keterbatasan sarana dan prasarana; keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan

27. Perikanan dan Kelautan

Permasalahan pada Urusan Perikanan dan Kelautan adalah masih rendahnya kualitas SDM; terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perikanan tanangkap; kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran; (4) Kurangnya tenaga penyuluh.

28. Pertanian

Permasalahan pada Urusan Pertanian adalah masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian; rusaknya kondisi infrastruktur jalan, kesuburan lahan dan irigasi ke sentra produksi; tingginya konversi lahan pertanian dan tidak jelasnya status lahan HGU di Jabar Selatan; rendahnya perlindungan terhadap petani produsen; aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan terbatas; masih tingginya impor bahan pangan (daging, beras, dan

hortikultura); masih tingginya kehilangan hasil produksi pertanian; ketersediaan benih bersertifikat; keterbatasan SDM.

29. Kehutanan

Permasalahan pada Urusan Kehutanan adalah Ipkindo sebagai organisasi profesi penyuluhan kehutanan masih perlu penguatan perannya dalam pengembangan kegiatan penyuluhan kehutanan; masih kurang tersedianya sarana dan prasarana dalam pengembangan Sentra Penyuluhan Kehutanan Perdesaan (SPKP).

30. Perindustrian

Permasalahan utama pada Urusan Perindustrian kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk; masih rendahnya kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh pengusaha IKM kerajinan; masih kurangnya perhatian di bidang kualitas dan desain produk oleh sebagian besar pengusaha.

31. Perdagangan

Permasalahan pada Urusan Perdagangan adalah: lemahnya pengawasan barang/jasa di pasar-pasar tradisional dan toko modern serta di pusat pembelanjaan dan pertokoan; terbatasnya sarana perdagangan/distribusi; kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM; kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan sektor hulu dan hilir tidak jelas; SDM yang menangani Perlindungan Konsumen masih kurang memadai.

32. Pariwisata

Permasalahan pada Urusan Pariwisata adalah fasilitas pendukung pariwisata dan infrastruktur pariwisata, aksesibilitas menuju obyek wisata dan pengemasan kawasan-kawasan wisata di Jawa Barat belum memadai; upaya promosi yang masih belum terintegrasi baik dengan Pemerintah Pusat, antar instansi pemerintah di provinsi, assosiasi pariwisata maupun industri pariwisata; perlu ditingkatkan penyebaran bahan promosi cetak, perluasan *media campaign* melalui elektronik, meningkatkan kegiatan melalui event di dalam dan luar negeri, dukungan sarana promosi yang representative, meningkatkan kerjasama program pemasaran dan melanjutkan diplomasi budaya dan pariwisata.

### 33. Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, belum optimalnya cakupan pelayanan elektrifikasi rumah, terbatasnya pemanfaatan energi baru terbarukan, serta belum optimalnya konservasi energi dan sumber daya mineral. Faktor-faktor penghambat penyediaan energi listrik di Jawa Barat diantaranya kondisi geografis Provinsi Jawa Barat yang berupa pegunungan, tidak meratanya pusat-pusat beban listrik, rendahnya tingkat permintaan listrik di beberapa wilayah, tingginya biaya marginal pembangunan sistem suplai energi listrik, serta terbatasnya kemampuan finansial. Sementara permasalahan pemanfaatan energi baru terbarukan khususnya energi panas bumi adalah karena tumpang tindih lahan antara lahan yang diperuntukkan untuk instalasi panas bumi dengan lahan konservasi (hutan konservasi).

### 34. Ketrasmigrasian

Permasalahan pada Urusan Ketrasmigrasian adalah kesiapan tempat transmigran tidak sesuai dengan yang diharapkan; kesiapan sumber daya manusia yang dikirim menjadi transmigran.



### BAB III

## RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

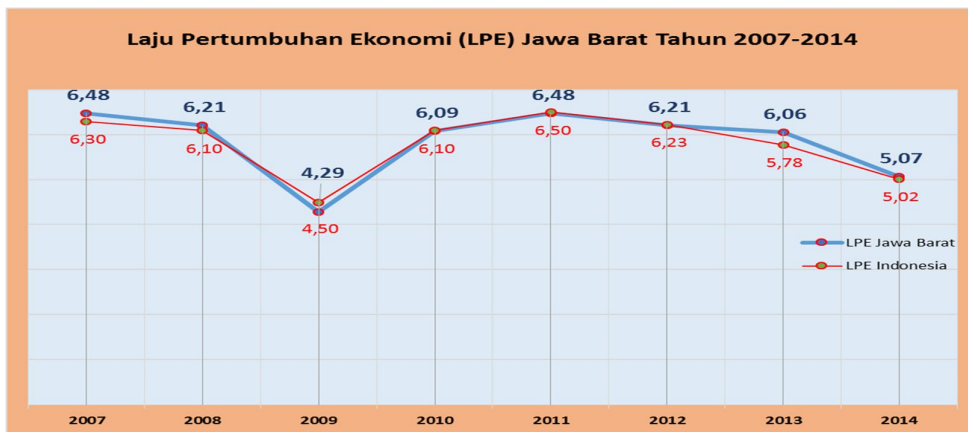
### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik Perekonomian Daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Jawa Barat tahun 2014 berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian tahun 2015-2016. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian Jawa Barat serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

#### 3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2014 sebesar 5,07%, melambat dibanding tahun 2013 yang tumbuh sebesar 6,06%. Perlambatan pertumbuhan PDRB tersebut terutama didorong oleh melemahnya konsumsi rumah tangga meskipun investasi dan konsumsi pemerintah meningkat. Tetapi secara akumulasi, Jawa Barat memiliki intensitas aktivitas perekonomian Jawa Barat yang cukup tinggi. Dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dan masih menjadi tujuan utama investasi PMA dan PMDN, kemampuan ekonomi Jawa Barat tumbuh di atas nasional. Pencapaian kinerja perekonomian Jawa Barat sendiri, tidak lepas dari upaya menjaga stabilitas perekonomian daerah. Fakta inilah yang membentuk daya saing Jabar berada pada urutan ke-4 di Indonesia.

**Gambar 3.1.**

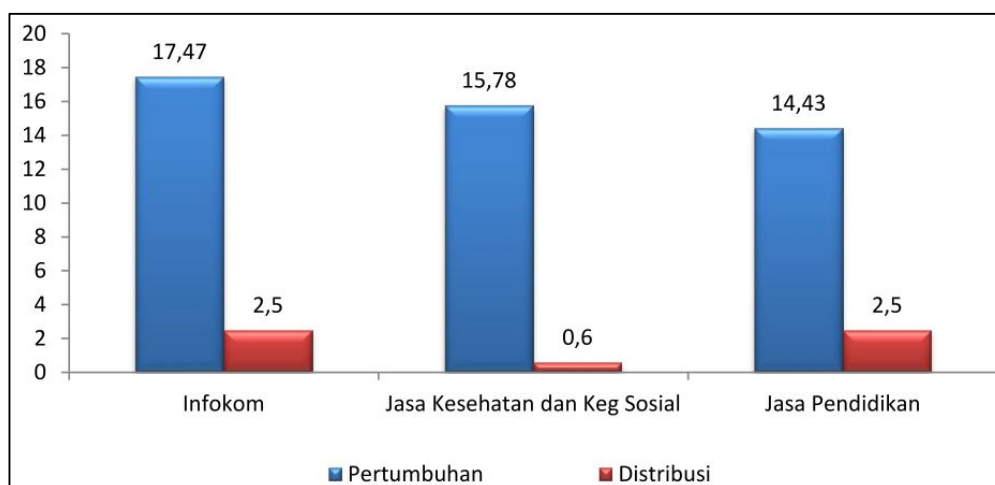


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2015

Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 17,47 persen, diikuti oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 15,78 persen dan Jasa Pendidikan sebesar 14,43 persen. Sedangkan struktur perekonomian Jawa Barat menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu Industri Pengolahan (43,57%); Perdagangan Besar-Eceran dan reparasi Mobil-Sepeda Motor (15,24 persen) dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (8,72 persen).

**Gambar 3.2.**

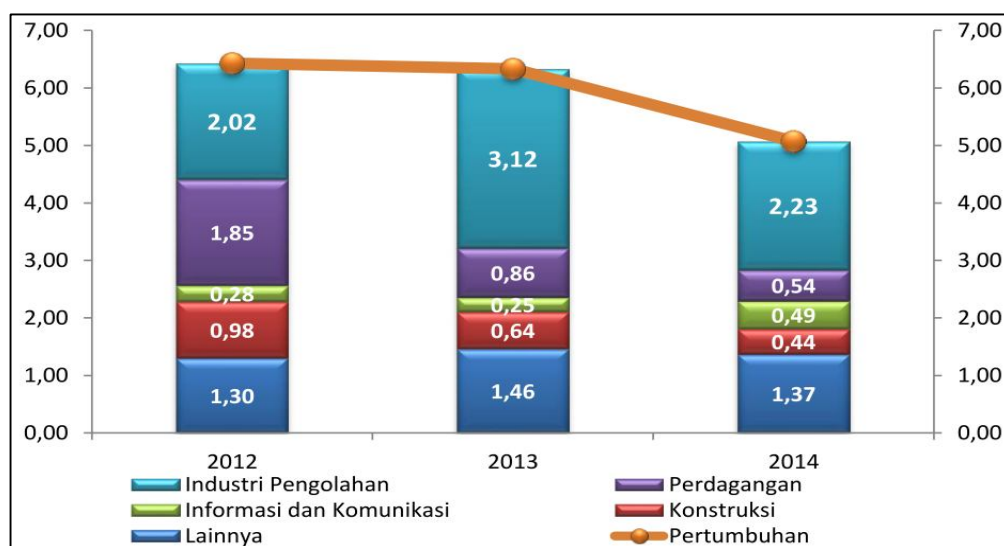
**Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa Lapangan Usaha 2014**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2015

**Gambar 3.3.**

**Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha**

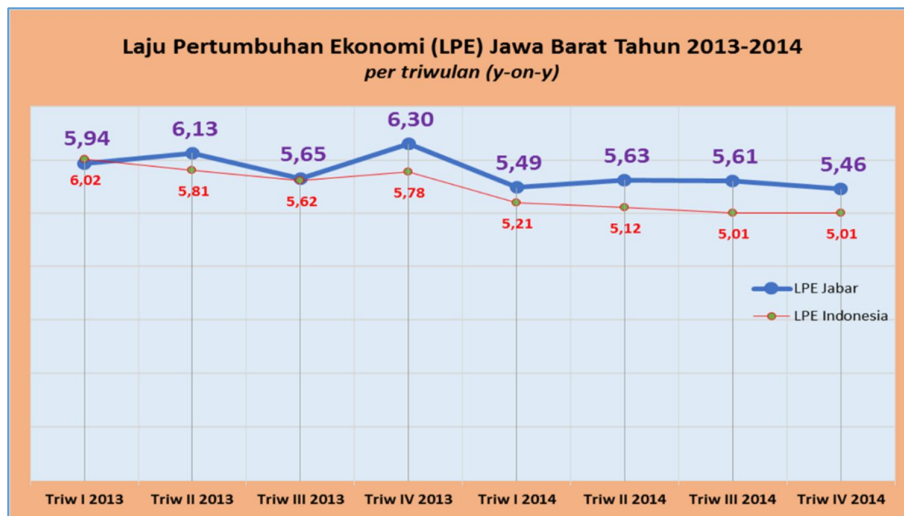


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2015

Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2014, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,23 persen, diikuti Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,54 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 0,49 persen dan Konstruksi sebesar 0,44 persen.

Pada triwulan IV-2014 Ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,46 persen bila dibandingkan triwulan IV-2013 (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha kecuali Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh minus 1,80 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh minus 0,59 serta Pertambangan dan Penggalan tumbuh minus 0,13 persen. Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 18,47 persen, diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 16,96 persen dan Jasa Pendidikan sebesar 16,02 persen.

**Gambar 3.4.**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2015

**Tabel 3.1.**

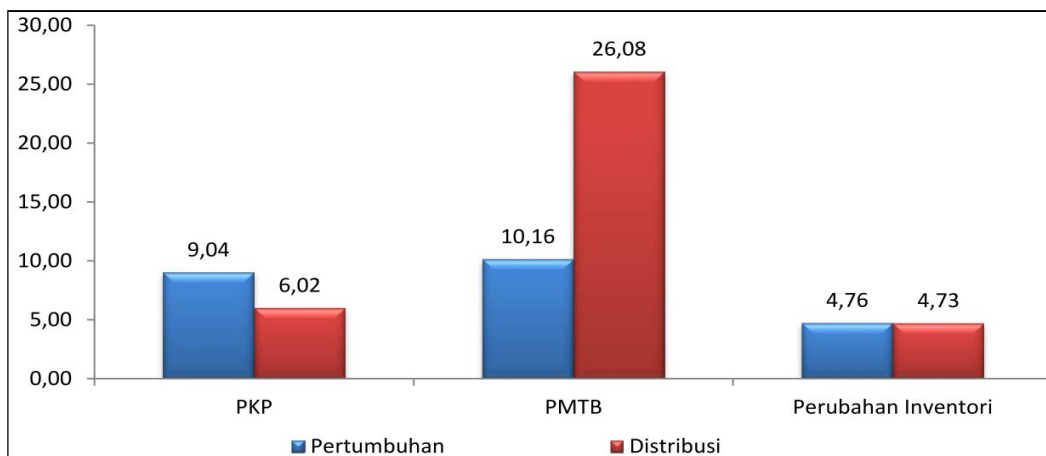
**Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2014 Menurut Lapangan Usaha  
Tahun Dasar 2010**

Komponen		Triw III-2014 terhadap Triw II-2014	Triw IV-2014 terhadap Triw III-2014	Triw IV-2014 terhadap Triw IV-2013	Laju Pertumbuhan 2014	Sumber Pertumbuhan 2014
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,87	-28,26	-0,59	0,47	0,04
B	Pertambangan dan Penggalian	7,30	-9,67	-0,13	1,57	0,04
C	Industri Pengolahan	-0,40	1,38	4,33	5,11	2,23
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,75	3,11	-1,80	4,30	0,02
E	Pengadaan Air	0,57	6,87	11,21	5,95	0,00
F	Konstruksi	3,50	6,73	6,19	5,45	0,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,08	3,20	5,85	3,31	0,54
H	Transportasi dan Pergudangan	4,03	1,83	8,80	7,50	0,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,53	-4,42	3,13	6,00	0,14
J	Informasi dan Komunikasi	6,18	5,84	18,47	17,47	0,49
K	Jasa Keuangan	2,68	2,05	8,35	4,12	0,10
L	Real Estate	3,79	0,79	6,16	4,46	0,05
M,N	Jasa Perusahaan	1,36	1,36	6,55	6,92	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,61	5,23	6,21	0,72	0,01
P	Jasa Pendidikan	2,01	2,07	16,02	14,43	0,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,38	2,52	16,96	15,78	0,10
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,86	2,29	8,41	8,80	0,16
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1,93	-0,64	5,46	5,07	5,07

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2015

Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 dari sisi pengeluaran sebesar 5,07 persen terjadi pada seluruh komponen. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,55 persen, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 10,16 persen dan Perubahan Inventori sebesar 4,76 persen.

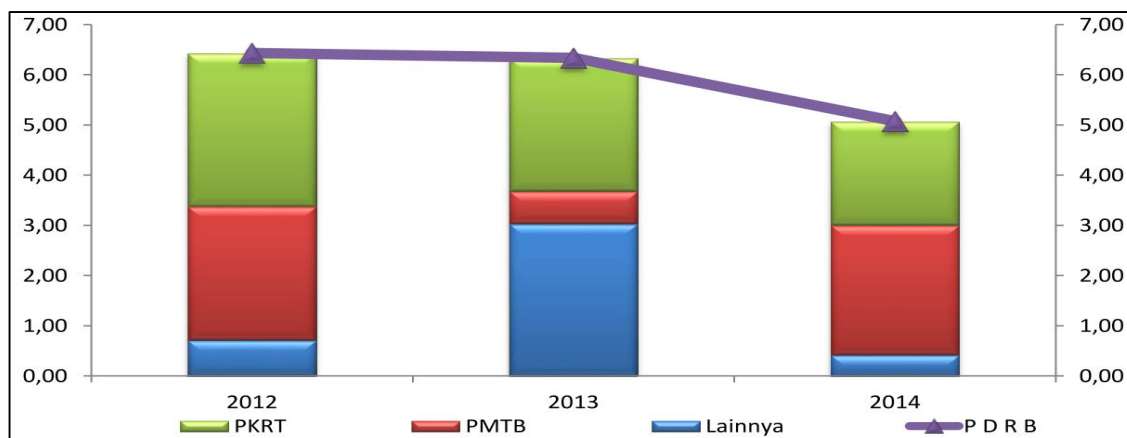
**Gambar 3.5.**  
**Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa Komponen 2014**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2015

Struktur Ekonomi Jawa Barat tahun 2014 menurut pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (62,92 persen), diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (26,08 persen) dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (6,09 persen).

**Gambar 3.6.**  
**Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2015

Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2014, Komponen PMTB sebesar 2,58 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,07 persen.

**Gambar 3.2.**

**Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010  
Tahun 2014**

Komponen	Triw III-2014 terhadap Triw II-2014	Triw IV-2014 terhadap Triw III-2014	Triw IV-2014 terhadap Triw IV-2013	Laju Pertumbuhan 2014	Sumber Pertumbuhan 2014
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,38	0,24	3,63	3,25	2,07
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-27,13	5,81	-12,43	3,49	0,02
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,41	25,39	2,49	9,04	0,49
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,59	9,87	12,86	10,16	2,58
5. Perubahan Inventori	-35,41	4,86	-10,62	4,76	0,22
6. Ekspor Barang dan Jasa	2,94	2,12	11,66	14,83	5,28
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-1,73	15,66	10,69	15,89	5,58
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>1,93</b>	<b>-0,64</b>	<b>5,46</b>	<b>5,07</b>	<b>5,07</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2015

Tingkat inflasi Jawa Barat (*y on y*) selama dua belas bulan terakhir tercatat sebesar 7,41 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 9,15 persen. Laju inflasi ditunjukkan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan Jawa Barat yang meliputi 7 (tujuh) kota yaitu Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kota Depok.

**Gambar 3.7.**

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2014

Adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) memicu kenaikan beberapa harga komoditas pada bulan Desember 2014, sehingga memberikan andil terhadap kenaikan IHK Gabungan di Jawa Barat. Tercatat pada

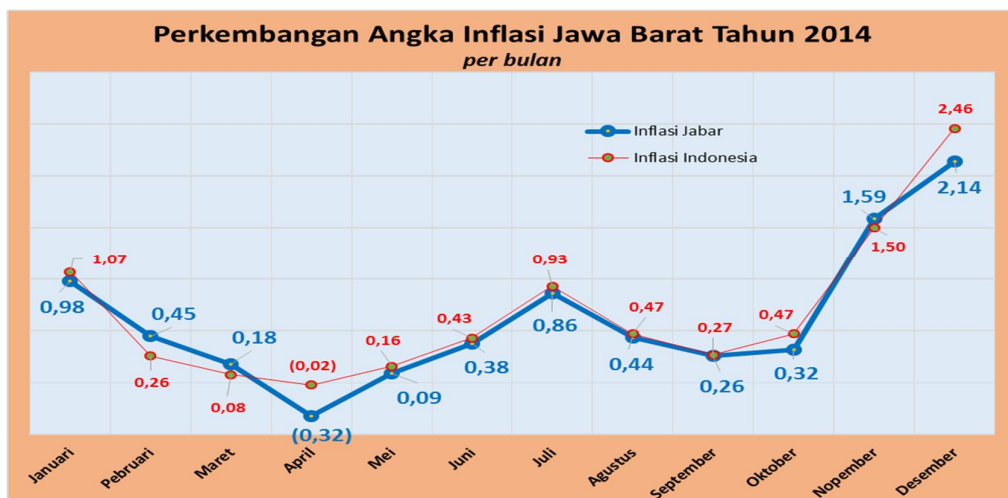
Desember 2014 mengalami inflasi sebesar 2,14 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,34 pada November 2014 menjadi 117,81 pada Desember 2014. Dengan demikian laju inflasi tahun kalender 2014 “year to date” sebesar 7,41 persen dan laju inflasi tahun ke tahun “ year on year” (Desember 2014 terhadap Desember 2013) sebesar 7,41 persen.

Dari tujuh kelompok pengeluaran, semuanya mengalami inflasi antara lain Kelompok Bahan Makanan sebesar 2,83 persen, Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,52 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar sebesar 0,99 persen, Kelompok Sandang sebesar 0,34 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 1,20 persen, Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga sebesar 0,24 persen, dan Kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 6,22 persen.

Dari tujuh kota pantauan IHK di Jawa Barat November 2014, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tasikmalaya sebesar 2,44 persen, diikuti Kota Sukabumi sebesar 2,43 persen, Kota Bandung sebesar 2,34 persen, Kota Depok sebesar 2,13 persen, Kota Bekasi sebesar 1,99 persen, Kota Bogor sebesar 1,86 persen, dan Kota Cirebon sebesar 1,78 persen.

Kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan menjadi penyumbang inflasi tertinggi, dengan inflasi sebesar 6,22 persen. Sub kelompok yang mengalami inflasi tertinggi pada kelompok ini adalah sub kelompok transport. Adapun komoditi yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi adalah angkutan dalam kota, bensin, solar dan angkutan antar kota.

**Gambar 3.8.**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2014

Namun disayangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup memuaskan dan PDRB per kapita yang terus meningkat, belum disertai dengan kondisi sosial ekonomi yang baik pula. Ketimpangan pendapatan tercermin dalam Indeks Gini (IG) selama periode tahun 2012-2013. Pada tahun 2012 dan 2013 Indeks Gini mencapai 0,41. Kondisi secara umum distribusi pendapatan semakin tidak merata dalam lima tahun terakhir. Fakta ketimpangan pendapatan yang memburuk terkait erat dengan akses masyarakat marjinal terhadap sumberdaya ekonomi produktif yang masih terbatas.

Tidak hanya ketimpangan pendapatan yang terjadi, juga ketimpangan wilayah. Hal ini tercermin dalam perbedaan nilai PDRB antar kabupaten kota yang cukup tinggi. Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor merupakan wilayah industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat. Kemudian Kota Bandung sebagai kota jasa yang juga turut menyumbang relatif besar dibanding kota lainnya.

Gambaran kondisi sosial ekonomi lainnya, dapat dilihat berdasarkan indikator ketenagakerjaan dan kemiskinan. Peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja yang meningkat. Selama kurun waktu 2013-2014 terjadi penurunan jumlah penganggur. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2014 mengalami peningkatan, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat mengalami penurunan dibanding tahun 2013.

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, artinya kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Jawa Barat pada September tahun 2014 sebesar 4,23 juta orang (9,18 persen).

**Tabel 3.3.**

**Indikator Ketenagakerjaan dan Kemiskinan di Jawa Barat Tahun 2013-2014**

<b>Indikator</b>	<b>Tahun 2013</b>	<b>Tahun 2014</b>
Ketenagakerjaan :	<i>Data Agustus</i>	<i>Data Agustus</i>
1. Angkatan Kerja (juta org) :	2013	2014
• Bekerja (juta org)	<b>20,28</b>	21,00
• Penganggur (juta org)	<b>18,41</b>	19,23
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	<b>1,87</b> <b>63,01</b>	1,77 62,77
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	<b>9,22</b>	8,45



Indikator	Tahun 2013	Tahun 2014
Kemiskinan :	<i>Data Sept 2013</i>	<i>Data Sept 2014</i>
1. Jumlah Penduduk (juta org)	4,32	4,23
2. Persentase Penduduk Miskin (persen)	9,61	9,18

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2014

Memperhatikan kondisi perekonomian Jawa Barat tahun 2014, maka perkiraan kondisi ekonomi regional Jawa Barat pada tahun 2016 sebagaimana ditunjukkan pada tabel.

**Tabel 3.4.**

**Perkiraan Indikator Ekonomi Regional Makro Tahun 2016**

No.	Indikator	Perkiraan Capaian Tahun 2016
1.	a. Jumlah Penduduk (jiwa)	<b>47.577.005</b>
	b. Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	<b>1,60 – 1,90%</b>
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)	<b>6,30 – 6,90%</b>
3.	Inflasi (persen)	.....
4.	Nilai PDRB perkapita adhk 2000 (Rp. Juta)	.....
5.	Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk	<b>8,20 – 5,90 %;</b>
6.	Laju Pertumbuhan Investasi (persen)	<b>5,5 – 6,0</b>
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	<b>7,50 – 7,00%</b>
8.	Nilai Investasi/PMTB adhb (Rp. Trilyun)	<b>226,4 – 246,4</b>

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dan Press Realease Tim Ekonomi Makro, 2014

Jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 46.800.123 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar ..... persen. Indikator perkembangan ekonomi yang digambarkan dengan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB dan investasi pada tahun 2015 sebagai berikut: laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh sebesar 5,6 persen sampai dengan 6,3 persen dengan nilai PRDB per kapita atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp. 9,5 juta sampai dengan Rp. 11,0 juta, sedangkan inflasi diperkirakan sebesar 4,7 persen hingga 5,5 persen. Laju pertumbuhan investasi diperkirakan mencapai angka 5,5 persen sampai dengan 6,0 persen, dengan nilai investasi/pembentukan modal tetap bruto atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 198,6 trilyun sampai dengan Rp. 208,6 trilyun. Kondisi kemiskinan dan ketenagakerjaan pada tahun 2015 digambarkan dengan indikator persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka, persentase

penduduk miskin diperkirakan sebesar 6,8 persen – 5,9 persen sedangkan tingkat pengangguran terbuka diperkirakan berada pada kisaran 8,2 persen hingga 8,4 persen.

### 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016

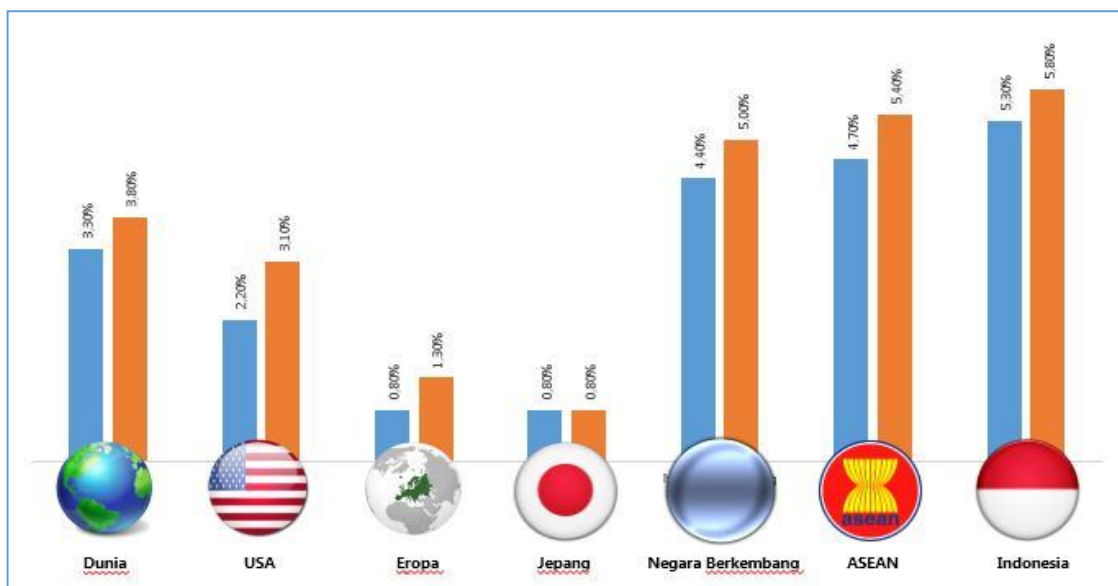
Tantangan dan prospek perekonomian Jawa Barat, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan regional Jawa Barat sendiri.

#### 3.1.2.1. Global dan Nasional

Proyeksi perekonomian global dan nasional tahun 2015 berdasarkan sumber dari IMF, ditunjukkan oleh gambar 1 berikut ini.

**Gambar 3.9.**

#### **Proyeksi Perekonomian Global dan Nasional Tahun 2015**



Sumber Data: IMF (2014)

Berdasarkan gambar tersebut, kondisi ekonomi internasional dan nasional secara umum diperkirakan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi global diprediksi akan meningkat dari 3,3 persen pada 2014 menjadi 3,8 persen pada tahun 2015. Begitupun dengan Amerika Serikat yang pertumbuhan ekonominya diperkirakan akan meningkat dari 2,2 persen menjadi 3,1 persen. Perekonomian Eropa juga akan memiliki kondisi perekonomian yang lebih baik, LPE positif sebesar 0,8 persen pada tahun 2014 diperkirakan akan meningkat menjadi 1,3 persen di tahun 2015. Jepang diperkirakan akan tetap tumbuh stabil di angka 0,8 persen, walaupun dalam dua triwulan

terakhir pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi sehingga target tersebut masih dalam skenario pesimis.

Di negara berkembang pertumbuhan PDB secara keseluruhan diperkirakan akan meningkat dari 4,4 persen pada tahun 2014 menjadi 5 persen pada tahun 2015, sedangkan ASEAN diproyeksikan akan mengalami peningkatan dari 4,7 persen menjadi 5,4 persen. Kondisi tersebut jelas sangat menguntungkan bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia karena diharapkan dapat memicu peningkatan ekspor dan investasi di berbagai sektor.

Membaiknya kondisi perekonomian secara global, diharapkan mampu mendorong kondisi perekonomian Indonesia menuju 5,8% pada tahun 2015 (ADB, 2014). Angka tersebut mendukung target pertumbuhan ekonomi yang tertuang dalam RAPBN 2015 yang berada dikisaran 5,4% - 5,8%. Angka tersebut akan memberikan dampak positif terhadap perkiraan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang akan berada diatas 5,8% mengingat Jawa Barat selalu berada di atas nasional dalam hal pencapaian pertumbuhan ekonomi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat memberikan stimulus positif terhadap indikator makro ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan mengingat Jawa Barat harus berupaya keras untuk dapat memperbaiki *Quality of performance* (kinerja) yang masih rendah. Hal ini ditunjukan dengan walaupun pertumbuhan ekonomi relatif tinggi namun masih disertai dengan rendahnya kualitas dari indikator pembangunan yang ada seperti tingginya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Gini Rasio).

### **3.1.2.2. Jawa Barat**

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat hingga triwulan III tahun 2014 mencapai 5,61 %. Sementara pada triwulan II sebesar 5,63% dan triwulan I hanya 5,49%. Dengan pencapaian demikian, tampaknya hingga akhir tahun 2014, LPE Jabar tidak akan lebih dari 5,8%. Inflasi posisi Oktober 2014 (yoy) sebesar 4,04 %. Kenaikan BBM sebesar Rp 2000 pada bulan November akan meningkatkan inflasi sehingga di akhir tahun kemungkinan besar di atas 5%. Tingkat pengangguran sebesar 8,45% pada posisi Agustus 2014, menurun cukup signifikan dibandingkan akhir tahun 2013 yang mencapai 9,22%. Tingkat kemiskinan posisi Maret 2014 masih berada di level 9,44%, tidak jauh berbeda dengan akhir tahun 2013, yakni 9,61%.

**Tabel 3.5.****Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Jawa Barat Tahun 2015-2016**

No.	Indikator	Proyeksi	
		2015	2016
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,6 – 6,3	6,3 – 6,9
2.	Inflasi (persen)	4,7 – 5,5	4,5 – 5,5
3.	Kemiskinan	6,8 – 5,9	5,9 – 5,5
4.	Laju Pertumbuhan Investasi (persen)	9,3 – 9,5	9,3 – 9,5
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	8,2 – 8,4	7,5 – 7,0

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 Press Realease Tim Ekonomi Makro, 2014

Hasil analisis tren, LPE Jawa Barat di Tahun 2015 berada di rentang 5,65% - 6,35%. Meningkatnya LPE dibanding ini terkait peluang pertumbuhan tinggi di sektor-sektor non *tradeable* terutama sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Jasa-jasa. Selain itu meningkatnya LPE dunia akan mendorong peningkatan ekspor Jabar dan investasi yang masuk.

Proyeksi angka tersebut cukup rasional jika dikaitkan dengan kemampuan menyerap investasi selama ini sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Rata-rata efisiensi investasi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Jawa Barat 2009-2013 sebesar 3,08. Pertumbuhan dalam range 5,5%-6,0% yang membutuhkan investasi antara Rp 70-80 trilyun rupiah (harga konstan). Angka tersebut tidak sulit dicapai jika upaya kinerja menarik investasi selama ini dapat dipertahankan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkeinginan untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan agar Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015 tetap di atas nasional. Kedepan Jawa Barat akan mulai *concern* kepada sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan dan pangan, agar tidak hanya memproduksi raw material namun harus sudah mulai mengangkat value. Selain itu sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dan industri kreatif akan mendapatkan prioritas mengingat dua sektor tersebut merupakan sektor yang paling memiliki potensi dalam pembangunan ekonomi Jawa Barat.

Untuk inflasi Jawa Barat tahun 2015 diperkirakan 6,0%-6,4% karena masih adanya efek kenaikan harga pasca kenaikan harga BBM November 2014. Hasil perhitungan Tim Ekonomi Makro Bappeda Provinsi Jawa Barat memang agak berbeda, karena kenaikan harga BBM 1% akan meningkatkan inflasi Jawa Barat sebesar 0,054%, sehingga prediksi inflasi tahun 2015 di kisaran 4,7%-5,5%.

Tidak mungkin di tahun 2015 meningkat lagi lebih dari 5,5%, apalagi jika pemerintah kembali menyesuaikan harga BBM dengan penurunan harga minyak mentah dunia, sangat dimungkinkan inflasi berada di kisaran 4%. Meski sempat menghentak publik, kebijakan kenaikan BBM di akhir tahun oleh Pemerintah Jokowi telah dilaksanakan. Sektor pemerintah dan swasta harus dapat mempersiapkan perencanaan pembangunan dan bisnis dengan lebih baik di awal. Kinerja inflasi memang ditentukan oleh kebijakan harga yang diputuskan oleh pemerintah. Karena itu inflasi Jabar pernah tinggi saat ada pengurangan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah pada 2008 dan 2013.

Sementara untuk angka pengangguran, berdasarkan pola sebelumnya, pada 2015, diperkirakan tingkat pengangguran terbuka akan mengalami penurunan yang tidak terlalu besar dan berada di kisaran 8,2%-8,4%. Dari 9 sektor lapangan usaha, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran masih tetap menduduki potensi penyerapan tenaga kerja yang paling besar. Dalam beberapa waktu terakhir mulai ada pembangunan hotel-hotel berbintang di wilayah Karawang dan Cirebon. Beberapa program pemerintah dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur akan membantu dalam penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui program seperti pembangunan waduk dan saluran irigasi.

Tahun 2015 juga memberikan tantangan dengan mulai berlakunya agenda Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada Desember 2015. Tantangan utama yang dihadapi Jawa Barat adalah bagaimana menciptakan produk inovatif yang berdaya saing tinggi dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, infrastruktur, dan teknologi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya keras mempersiapkan usaha mikro kecil dan menengah melalui peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan industri kreatif serta terus menerus memperkenalkan kepada masyarakat hasil produknya. Jawa Barat merupakan bagian dari masyarakat global, untuk itu perlu mempersiapkan diri lebih awal untuk menghadapi tantangan dalam persaingan MEA 2015.

Dari kondisi dan tantangan perekonomian global, nasional dan Jawa Barat, maka proyeksi makro ekonomi Jawa Barat Tahun 2015 dan 2016 terdapat pada Tabel 3.7.

Adapun analisis SWOT untuk tantangan perekonomian Jawa Barat Tahun 2014-2016 terlihat pada tabel 3.8.

**Tabel 3.6.****SWOT Ekonomi Jawa Barat Tahun 2014-2016**

<b>VARIABEL</b>	<b>SUB VARIABEL</b>
<b>KEKUATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah penduduk dan tingginya kunjungan penduduk luar wilayah merupakan potensi pasar</li> <li>2. Minat perusahaan yang akan melakukan investasi di Jabar tinggi (info BKPPMD Jabar)</li> <li>3. Ekspektasi positif pelaku usaha dan konsumen positif terhadap perekonomian Jabar ke depan (survei BI)</li> <li>4. Permintaan akan meningkat sejalan dengan kenaikan pendapatan</li> <li>5. Infrastruktur meningkat (kualitas dan kuantitas)</li> <li>6. Kredit meningkat</li> </ol>
<b>KELEMAHAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konflik dalam penetapan UMK yang mempengaruhi produksi</li> <li>2. Perubahan cuaca akan berdampak pada produksi</li> <li>3. Potensi dampak lanjutan perubahan harga-harga yang diatur pemerintah terhadap ongkos produksi dan volume produksi</li> <li>4. Adanya ketimpangan yang cukup besar pada PDRB antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat.</li> <li>5. Proporsi angka kemiskinan dan pengangguran walaupun ada kecenderungan menurun tetapi pada beberapa tahun ke depan diperkirakan masih relative besar, sehingga program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja harus masih menjadi prioritas.</li> </ol>
<b>PELUANG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mulai pulihnya permintaan ekspor Eropa dan Amerika</li> <li>2. Ekspansi fiskal pemerintah pusat dan daerah berdampak positif terhadap sektor usaha</li> <li>3. Stabilitas politik yang terjaga berdampak terhadap stabilitas ekonomi</li> </ol>
<b>TANTANGAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga stabilitas nilai tukar dan stabilitas harga</li> <li>2. Memperbaiki kualitas pelayanan birokrasi</li> <li>3. Peningkatan target indeks daya beli masyarakat Jawa Barat tahun 2014, sehingga perlu adanya upaya-upaya yang kongkrit untuk mencapai target tersebut.</li> <li>4. tantangan perubahan iklim dan <i>out break</i> hama penyakit, dikhawatirkan produksi pangan Jawa Barat akan mengalami</li> </ol>

VARIABEL	SUB VARIABEL
	<p>penurunan pada beberapa tahun ke depan. Perlu adanya upaya peningkatan produksi pangan melalui perbaikan system perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitas sarana produksi.</p> <p>5. Kelangkaan energi pada beberapa tahun mendatang diperkirakan akan semakin terasa, sehingga untuk antisipasinya perlu ada upaya peningkatan eksplorasi dan pengembangan sumber energy alternative.</p> <p>6. Terjadinya penurunan daya saing beberapa produk andalan Jawa Barat di Pasar Global seperti tekstil dan lain-lain, perlu ada upaya peningkatan daya saing produk Jawa Barat.</p> <p>7. Di bidang teknologi, peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan masih relative rendah, sehingga perlu adanya upaya peningkatan peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan Jawa Barat.</p> <p>8. Tuntutan upah minimum kerja semakin mencuat di beberapa daerah industri.</p> <p>9. Penciptaan keterkaitan industri pengolah dengan sumber daya lokal.</p> <p>10. Penciptaan keterkaitan pembangunan perkotaan dan pedesaan.</p>

Sumber : Tim Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat, 2014.

Khusus untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Jawa Barat mempunyai potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang dapat dianggap sebagai prospek dalam mengahafapi tantangan tersebut.

**Tabel 3.7.**

**Prospek Perekonomian Jawa Barat**

No	Bidang/fenomena	Uraian
<b>INTERNAL</b>		
1	Pertanian/pangan	Jawa Barat memiliki lahan pertanian yang cukup luas, dengan jumlah petani yang cukup banyak, serta komoditas yang cukup beragam ditunjang keberadaan Waduk Jatigede.
2	Industri	Jawa Barat memiliki industri yang banyak baik skala besar, menengah, kecil dan mikro.

No	Bidang/fenomena	Uraian
3	Energi	Jawa Barat memiliki sumber daya alam sumber energy alternative yang cukup banyak, baik dari bahan tambang maupun komoditas pertanian.
4	Teknologi	Jawa Barat memiliki Perguruan tinggi ternama dan lembaga litbang departemen maupun non departemen yang cukup banyak.
<b>EKSTERNAL</b>		
1	Kelangkaan pangan di tingkat global dan nasional	Merupakan peluang bagi pertanian Jawa Barat dalam pemasaran produk pertanian dan olahannya.
2	Pergeseran kekuatan ekonomi ke Asia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jawa Barat sebagai kawasan industry terbesar di Indonesia mempunyai peluang dalam peningkatan sector industry.</li> <li>Pada tanggal 14 Januari 2010 Atase Perekonomian China (mewakili Pusat Perdagangan Luar Negeri China) melakukan pertemuan bisnis dengan Kamar Dagang dan Industri Jabar. China merencanakan akan membuka pabrik tekstil di Jawa Barat sebagai bentuk investasi China di bidang manufaktur di Indonesia.</li> </ul>
3	Kesiapan Jawa Barat menghadapi <i>Asean Economic Community (AEC)</i> pada tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jawa Barat memiliki penduduk dan tenaga kerja yang banyak, harus dipersiapkan peningkatan daya saingnya (skill, dll), supaya berkontribusi dominan terhadap lapangan kerja <i>AEC</i>.</li> <li>Program Jabar mengembara pada tahun 2013 harus mampu mempersiapkan tenaga Jawa Barat dalam kancah <i>AEC</i>.</li> </ul>
4	MP3EI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan untuk MP3EI untuk jangka pendek berupa kebijakan Jawa Barat dalam penciptaan iklim usaha yang lebih baik, diharapkan akan meningkatkan kinerja industri Jawa Barat.</li> </ul>



Tahun 2016 merupakan tahapan ke-3 pada rangkaian pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018, sekaligus merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2014-2019. Ada beberapa rekomendasi implementasi RPJMN dalam konteks kepentingan pembangunan ekonomi regional Jawa Barat, sebagai berikut:

1. Produk pangan harus jadi perhatian dan komitmen karena jumlah penduduk besar. Implikasinya, alokasikan anggaran yang memadai.
2. Berdasarkan hasil kajian Tabel Input Output Jabar, sektor pertanian memiliki nilai *backward linkage* yang besar namun relative kecil untuk angka *forward linkage*. Artinya potensi pertanian Jabar perlu didorong untuk industrialisasi (agroindustri).
3. Penekanan pembangunan sektor pertanian seyogianya tidak hanya di aspek produksi, namun juga sisi pasar. Harus dibangun institusi pasar sebagai option market yang akan meningkatkan pendapatan petani dan menjamin redistribusi pendapatan antara pedagang dengan petani yang lebih adil.
4. Review Program yang ada di RPJMD saat ini agar lebih fokus untuk peningkatan produktivitas dan perwujudan option market output sektor pertanian Jabar.
5. Guna peningkatan daya saing industri Jabar, berikan insentif bagi industri yang menggunakan komponen lokal relative tinggi (diatas 60%).
6. Menjelang implementasi UU tentang Desa, siapkan kebijakan untuk mengembangkan instrumen mendorong pembangunan perdesaan. Diantaranya, dorong agar BUMDES dikelola secara professional, misalnya oleh sarjana desa dan para pendamping dari LSM.
7. Dana alokasi desa (sesuai janji gubernur) arahkan untuk mendukung program pembangunan lainnya dalam konteks misalnya peningkatan ketahanan pangan, atau yang lainnya sesuai prioritas utama target pembangunan desa yang bersangkutan.
8. Untuk implementatif sebuah kebijakan, harus fokus pada data mikro (lingkup data lebih detil).
9. Produktivitas perekonomian regional dibangun atas kekuatan kinerja ekonomi di level mikro, arahkan kegiatan untuk peningkatan produktivitas sub sektor yang lebih mikro.
10. Dalam membangun kedaulatan pangan, ciptakan instrumen pasar yang dapat memperbaiki harga jual komoditas yang dihasilkan petani. Pilihannya, Bulog harus bisa beli komoditas tersebut atau melalui BUMD.
11. Dalam membangun kedaulatan energi, optimalkan eksploitasi panas bumi yang ada di wilayah Jawa Barat.

12. Dalam pengelolaan pembangunan, selain pengaturan pembagian peran, perlu dipertegas siapa yang bertanggungjawab dalam menentukan *action and cut*.
13. Dalam memanfaatkan meluasnya pasar MEA, perlu dibangun komunikasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan Bea Cukai, selain dilakukan promosi produk Jawa Barat secara gencar. Hal penting lain adalah menyebarluaskan informasi tentang fasilitas sesuai kesepakatan dagang yang dapat dinikmati oleh para eksportir.
14. Dalam rangka meningkatkan investasi, promosi peluang investasi harus terus ditingkatkan. Perkuat dengan kebijakan yang lebih pro bisnis.
15. Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan pembenahan karakter SDM nya untuk lebih produktif.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kebijakan keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2018, tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Provinsi Jawa Barat. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Sehingga pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

#### **3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri

dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil, dan; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat dan Dana Insentif Daerah. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Secara keseluruhan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun meningkat, hal tersebut terlihat dari kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan peningkatan, sedangkan kelompok Dana Perimbangan menunjukkan kecenderungan penurunan khususnya pada komponen Dana Alokasi Umum. Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat "*limitative*". Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan dana perimbangan yang menunjukkan kecenderungan menurun.

Realisasi dan target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu tahun 2013-2016, tercantum pada tabel 3.11. di bawah ini:

**Tabel 3.11.**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2013-2016**

NO	URAIAN	Jumlah							
		Realisasi		Target RKPD	Target APBD	Target RPJMD	Target RKPD		
		Tahun 2013 (3)	Tahun 2014 (4)	Tahun 2015 (5)	Tahun 2015 <sup>(4)</sup> (6)	Tahun 2016 <sup>(4)</sup> (6)	Tahun 2016 <sup>(5)</sup> (7)		
(1)	(2)								
1	PENDAPATAN	19.237.611.310.213	22.289.914.810.695	16.799.366.531.262	23.914.485.396.100	18.336.616.979.271	22.787.018.968.640		
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	12.360.109.870.372	15.016.974.003.384	14.416.031.751.655	15.851.202.863.984	15.769.911.949.595	15.058.153.651.900		
1.1.1.	Pajak Daerah	11.236.145.853.981	13.753.760.402.652	13.498.655.298.000	14.942.465.917.000	14.747.275.516.400	14.135.949.526.000		
1.1.2.	Retribusi Daerah	63.654.937.210	70.083.042.728	61.031.112.794	62.037.466.984	62.971.902.181	58.062.156.300		
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan	261.601.089.168	304.380.444.819	286.420.295.187	277.345.935.000	312.799.604.274	151.210.340.250		
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	798.707.990.013	888.750.113.185	569.925.045.674	569.353.545.000	646.864.926.739	712.931.629.350		
1.2.	Dana Perimbangan	2.950.532.545.672	3.260.505.636.017	2.365.498.833.770	2.528.916.817.680	2.547.442.208.172	2.228.913.066.740		
1.2.1.	Dana Bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	1.398.007.484.672	1.494.604.220.017	861.084.826.845	1.201.632.432.680	910.038.002.035	925.258.711.740		
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.472.453.011.000	1.687.686.386.000	1.504.414.006.925	1.303.654.355.000	1.637.404.206.137	1.303.654.355.000		
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	80.072.050.000	78.215.030.000		23.630.030.000	-	-		
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.926.968.894.169	4.012.435.171.294	17.835.945.837	5.534.365.714.436	19.262.821.504	5.499.952.250.000		
1.3.1.	Hibah	20.092.101.669	22.232.854.794	17.835.945.837	24.447.464.436	19.262.821.504	2.612.250.000		
1.3.2.	Dana Darurat								
1.3.3.	Dana Bagi hasil Pajak dari Prov. dan Pemda Lainnya								
1.3.4.	Dana Peny. dan Otonomi khusus	3.906.876.792.500	3.990.202.316.500		5.509.918.250.000		5.497.340.000.000		
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Prov/kab/ kota/ lainnya								
1.3.6.	Lain-lain Penerimaan								
1.3.7.	Dana Transfer Pusat								
1.3.8.	Dana Insentif Daerah (DID)								

Keterangan :

1. Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013
2. LKPD Gubernur Jawa Barat Tahun 2014 (data realisasi s.d. Akhir Tahun 2013 belum diaudit BPK)
3. Target pada RKPD 2015 belum mencantumkan transfer dana BOS dari pemerintah (Dana Penyesuaian Otonomi Khusus)
4. Perda APBD TA. 2015 dengan mencantumkan transfer Dana Penyesuaian Otonomi Khusus (dana BOS dari Pemerintah) sebesar 5.509.918.250.000
5. Perda RPJMD 2013-2018 data untuk Proyeksi RKPD Tahun 2016 belum mencantumkan transfer dana BOS dari pemerintah (Dana Penyesuaian Otonomi Khusus)
6. Target RKPD Tahun 2016 angka masih sangat sementara.

Bila memperhatikan kecenderungan realisasi pendapatan daerah kurun waktu 2013-2014 dan target Tahun 2015 terlihat bahwa terdapat peningkatan yang bervariasi. Capaian sampai dengan 2014 didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah yang cukup baik. Namun demikian, mengingat peningkatan pendapatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, perlu ada upaya-upaya peningkatan pendapatan yang lebih intensif dilakukan disertai dengan peningkatan pelayanan publik serta upaya intensifikasi/ekstensifikasi yang lebih aktif, diharapkan pada tahun 2015 pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Untuk tahun 2016, target pendapatan daerah diproyeksikan meningkat bila dibandingkan target tahun 2015. Besarnya target pendapatan daerah ini disebabkan peningkatan penerimaan dari sektor pajak yang mengalami kenaikan tarif.

### **3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Memantapkan Kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil;
2. Intensifikasi pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Koordinasi dan perhitungan bersama antara Pusat-Daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan (Pajak Rokok, pajak ekspor/perusahaan).
4. Meningkatkan Deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam membayar pajak dan retribusi;
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan asset daerah secara profesional.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari: Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk dana perimbangan dan Kabupaten/Kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang Provinsi.

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah tersebut di atas, maka untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
  1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
  2. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
  3. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
  4. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Gerai Samsat dan *Samsat Mobile*, layanan SMS, dan pengembangan Samsat Outlet;
  5. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh Kantor Bersama/Samsat dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008;
  6. Penyebarluasan informasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
  7. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya antara lain : pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan.
  8. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

9. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.
- b. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan, melalui:
  1. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
  2. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
  3. Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
  4. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak),

### **3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja Daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2012, pada dasarnya terdapat dua jenis belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, dan Belanja Modal.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2016 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Belanja daerah secara nominal, untuk semua jenis belanja mengalami kenaikan kecuali Belanja Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial. Pada Belanja Tidak Langsung, terlihat bahwa Belanja Pegawai, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, sedangkan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Sub sidi mengalami penurunan. Sementara itu, Belanja Langsung untuk semua komponen mengalami kenaikan yang bervariasi. Dalam kurun waktu tahun 2013-2014 dan target 2015, komposisi rata-rata Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) adalah 78% dan 22%. Sedangkan untuk target tahun 2016 komposisinya diproyeksikan sekitar 79% dan 21%. Besarnya persentase BTL dikarenakan dalam BTL tersebut terdapat komponen Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota yang alokasi dananya mencapai sekitar 25,84%.

Pada Tahun 2016, penganggaran Belanja Langsung dilaksanakan melalui: (1) Belanja Langsung di seluruh OPD/Biro Provinsi Jawa Barat; dan (2) Belanja Tugas Pembantuan Provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan Belanja Pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh Daerah), ruang fiskal daerah Jawa Barat menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2016 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Alokasi belanja



daerah harus sudah dilengkapi dengan : 1) Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, 2) Dokumen Rencana Implementasi Pekerjaan (DRIMP) 3) Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), 4) Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, serta Audit Program.

Kebijakan belanja daerah untuk tahun 2016 antara lain melalui :

1. Program dan kegiatan prioritas: RPJMD 2013-2018, dengan pembagian: 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pada OPD/Biro;
2. Dukungan RPJMN 2015 – 2019 dan RKP 2016;
3. Program implementasi janji Gubernur;
4. Realisasi 10 **Common Goals** (prioritas) berupa pembangunan Tematik Sektoral dan Pembangunan Tematik Kewilayahan;
5. Penggunaan dana Fungsi pendidikan **20%** dari total belanja;
6. Penggunaan dana Fungsi kesehatan **10%**;
7. Penggunaan dana Infrastruktur **minimal 10%** dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan UU No 28/2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Penggunaan dana Fungsi perekonomian dan infrastruktur penunjang perekonomian secara bertahap **10%**;
9. Dukungan pelaksanaan PON XIX Tahun 2016 sebagai tuan rumah;
10. Bantuan keuangan Kab/Kota, bantuan Desa, Hibah, Bansos dan Subsidi;
11. Penggunaan Dana DAK, DBHCHT, BOS Pusat, Pajak Rokok.
12. Pendukung untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah.
13. Pendukung diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2016.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir, maka arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2016 dituangkan dalam Tabel 3.12.

**Tabel 3.9.**  
**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah**  
**Tahun 2013-2016**

URAIAN	Realisasi		Target			
	Tahun 2013	Tahun 2014	RKPD 2015	APBD 2015	RPJMD 2013-2018 Untuk Tahun 2016	Target RKPD Tahun 2016)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>14.724.113.007.857</b>	<b>16.959.626.420.346</b>	<b>20.233.336.880.458</b>	<b>19.626.961.424.258</b>	<b>13.080.607.311.974</b>	<b>19.600.711.191.071</b>
Belanja Pegawai	1.535.932.801.908	1.570.351.720.049	2.239.293.500.287	1.750.356.995.858	2.628.821.731.230	1.794.115.920.754
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	2.940.521.000	6.805.400.000	20.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Belanja Hibah	5.673.020.648.350	6.188.036.513.290	2.387.414.592.770	7.154.144.995.000	2.239.750.000.000	7.247.340.000.000
Belanja Bantuan Sosial	13.600.215.000	2.871.320.000	1.014.394.000	12.000.000.000	27.604.343.734	12.000.000.000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.994.277.231.373	5.461.539.028.033	4.942.206.394.594	6.134.790.633.400	5.436.427.034.054	5.650.669.268.200
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/ Kab/Kota dan Pemerintah Desa	3.504.341.590.226	3.729.892.360.076	10.578.570.425.900	4.448.668.800.000	2.666.682.872.764	4.786.586.002.116
Belanja Tidak Terduga	-	130.078.898	64.837.572.907	117.000.000.000	71.321.330.194	100.000.000.000
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.672.632.315.322</b>	<b>3.958.806.966.130</b>	<b>8.784.841.677.380</b>	<b>5.126.796.908.842</b>	<b>5.327.330.996.469</b>	<b>6.046.900.000.000</b>
Belanja Pegawai	426.605.110.043	305.002.725.902	-	237.420.633.895	620.899.249.670	-
Belanja Barang Dan Jasa	1.973.247.376.538	2.223.243.629.502	-	2.656.963.529.978	2.792.489.047.567	-
Belanja Modal	1.272.779.828.741	1.430.560.610.726	-	2.232.412.684.969	1.913.942.699.232	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>18.396.745.323.179</b>	<b>20.918.433.386.476</b>	<b>29.018.178.557.838</b>	<b>24.753.758.333.100</b>	<b>18.407.938.308.444</b>	<b>25.647.611.191.071</b>

Keterangan: :

1. Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013
2. LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2014 (data realisasi s.d. Akhir Tahun 2013 belum diaudit BPK)
3. Target pada RKPD 2015 belum mencantumkan transfer dana BOS dari pemerintah (Dana Penyesuaian Otonomi Khusus)
4. Perda APBD TA. 2015 dengan mencantumkan transfer Dana Penyesuaian Otonomi Khusus (dana BOS dari Pemerintah) sebesar 5.509.918.250.000
5. Perda RPJMD 2013-2018 data untuk Proyeksi RKPD Tahun 2016 belum mencantumkan transfer dana BOS dari pemerintah (Dana Penyesuaian Otonomi Khusus)
6. Target RKPD Tahun 2016 angka masih sangat sementara.

### **3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), Hasil penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/ kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Investasi (Penyertaan modal dan pembelian surat berharga/ saham), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan.

Pada tahun 2016 kebijakan penerimaan pembiayaan daerah selain SiLPA antara lain direncanakan melalui penerbitan surat utang daerah (obligasi daerah) untuk operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk Investasi berupa penyertaan modal ke BUMD dan pembelian surat berharga (pembelian saham), penguatan Lembaga Penjaminan Kredit, penyediaan Dana Kolateral dan Dana (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan/ LPDP) Jabar dengan prinsip kehati-hatian.

Khusus untuk Investasi pembelian surat berharga (pembelian saham) sesuai peraturan Pemerintah PP No.1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Permendagri No 52 Tahun 2012 menyatakan bahwa Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkirakan surplus serta Pemerintah Daerah harus memenuhi kewajibannya untuk melayani masyarakat dan membangun daerah melalui APBD terlebih dahulu, sebelum merencanakan untuk berinvestasi. Apabila APBD diperkirakan surplus saat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka rencana investasi pemerintah daerah akan disetujui dengan membuat perencanaan dan kajian investasi. Sedangkan kebijakan pengeluaran

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik);

2. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah;
3. Pemerintah Daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dll;
4. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian;
5. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan mampu menarik investor menanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan Obligasi Daerah.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel 3.13 sebagai berikut:

**Tabel 3.13.**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2013 – 2016**

URAIAN (1)	Jumlah				
	Realisasi Tahun 2013 <sup>1)</sup> (2)	Tahun 2014 <sup>2)</sup> (3)	Target RKPD Tahun 2015 <sup>3)</sup> (4)	Target APBD Tahun 2015 <sup>4)</sup> (5)	Target RPJMD Tahun 2016 <sup>5)</sup> (6)
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	2.916.306.755.414	3.586.471.831.054	2.824.496.958.503	1.400.000.000.000	2.500.368.504.423
Koreksi		(91.787.889.250)			
Pencairan Dana Cadangan					
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
Penerimaan Pinjaman Daerah					
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	18.324.088.606				
Penerimaan Piutang Daerah					
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.934.630.844.020</b>	<b>3.494.683.941.804</b>	<b>2.824.496.958.503</b>	<b>1.400.000.000.000</b>	<b>2.500.368.504.423</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
Pembentukan Dana Cadangan					
Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah	119.025.000.000	358.575.000.000	27.560.412.000	450.000.000.000	24.804.370.800
Pembayaran Pokok Utang					
Pemberian Pinjaman Daerah					
Sisa Lebih Perhitungan					
Dana Bergulir	70.000.000.000	100.000.000.000		50.000.000.000	
Pembelian saham BUB)					100.000.000.000
Dana kolateral					150.000.000.000
Dana LPDP Jabar					100.000.000.000
					75.000.000.000
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>189.025.000.000</b>	<b>458.575.000.000</b>	<b>27.560.412.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>625.000.000.000</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>2.745.605.844.020</b>	<b>3.036.108.941.804</b>	<b>2.796.936.546.503</b>	<b>900.000.000.000</b>	<b>1.875.000.000.000</b>

Keterangan: :

1. Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013
2. LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2014 (data realisasi s.d. Akhir Tahun 2013 belum diaudit BPK)
3. Target pada RKPD 2015 belum mencantumkan transfer dana BOS dari pemerintah (Dana Penyesuaian Otonomi Khusus)
4. Perda APBD TA. 2015 dengan mencantumkan transfer Dana Penyesuaian Otonomi Khusus (dana BOS dari Pemerintah) sebesar 5.509.918.250.000
5. Perda RPJMD 2013-2018 data untuk Proyeksi RKPD Tahun 2016 belum mencantumkan transfer dana BOS dari pemerintah (Dana Penyesuaian Otonomi Khusus)
6. Target RKPD Tahun 2016 angka masih sangat sementara.

### 3.3. Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sumber pendanaan daerah selain APBD, juga dari Pemerintah Pusat (APBN) berupa Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang pengalokasiannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat serta dana yang bersumber dari swasta, dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).

#### 3.3.1. APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berupa dana APBN Dekonsentrasi yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada OPD Provinsi dan dana APBN Tugas Pembantuan, yang dikelola oleh OPD di Kabupaten/Kota maupun oleh OPD Provinsi. Besarnya alokasi APBN yang masuk ke Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Perkembangan alokasi APBN di Jawa Barat selama kurun waktu 5 (Lima) tahun (2011 s.d 2015) dapat dilihat pada tabel 3.14.

**Tabel 3.14.**  
**Jumlah Dana APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 – 2015**

Pagu Dana	Jenis APBN		Jumlah
	Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan	
<b>2011</b>	1.449.149.555.000,00	703.128.287.000,00	<b>2.152.277.842.000,00</b>
<b>2012</b>	1.444.391.659.000,00	992.337.059.000,00	<b>2.436.728.718.000,00</b>
<b>2013</b>	1.057.619.548.000,00	864.220.603.000,00	<b>1.921.840.151.000,00</b>
<b>2014</b>	360.214.143.000,00	900.244.748.000,00	<b>1.260.458.891.000,00</b>
<b>2015</b>	535.487.821.000,00	685.366.350.000,00	<b>1.220.854.171.000,00</b>

Distribusi alokasi dana APBN berupa Dana Dekonsentrasi yang masuk ke Provinsi Jawa Barat melalui OPD Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 3.15.

**Tabel 3.15.****Alokasi Dana Dekonsentrasi berdasarkan OPD di Provinsi Jawa Barat****Tahun 2011-2015**

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	OPD	PAGU ANGGARAN (Dalam Ribuan Rupiah)					JUMLAH
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Biro Pemerintahan Umum	2,327,498.00	8,669,000.00	5,728,414.00	1,826,092.00	1,566,952.00	20,117,956.00
2	Bappeda	367,755.00	1,025,000.00	3,103,290.00	3,144,471.00	1,108,291.00	8,748,807.00
3	BPMPD	26,611,360.00	69,848,391.00	73,791,998.00	83,131,605.00	11,103,800.00	264,487,154.00
4	Bandiklatda	139,000.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00	1,105,000.00
5	Bakesbangpol	-	-	1,419,645.00	-	-	1,419,645.00
6	Bapusipda	11,974,321.00	5,716,635.00	5,434,799.00	379,630.00	579,245.00	24,084,630.00
7	BKPD	16,439,982.00	26,114,700.00	24,978,450.00	14,660,500.00	14,355,000.00	96,548,632.00
8	BPLHD	500,000.00	6,850,000.00	7,000,000.00	4,700,000.00	1,700,000.00	20,750,000.00
9	Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan	-	-	-	46,430,713.00	47,482,610.00	93,913,323.00
10	BPBD	-	277,240.00	600,000.00	-	553,000.00	1,430,240.00
11	BPPKB	-	-	-	-	900,000.00	900,000.00
12	BKPPMD	300,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,045,407.00	2,845,407.00
13	BPPT	-	600,000.00	500,000.00	-	-	1,100,000.00
14	Dinas Pendidikan	1,218,647,284.00	1,062,478,174.00	688,797,836.00	3,334,247.00	172,601,837.00	3,145,859,378.00
15	Dinas Kesehatan	19,869,708.00	29,926,417.00	39,784,318.00	43,605,189.00	73,032,682.00	206,218,314.00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13,119,613.00	30,369,724.00	14,061,907.00	11,692,289.00	21,911,558.00	91,155,091.00
17	Dinas Sosial	28,119,570.00	28,848,675.00	24,766,107.00	36,414,570.00	50,707,104.00	168,856,026.00
18	Dinas Olahraga dan Pemuda	7,392,332.00	7,700,000.00	9,976,354.00	9,717,198.00	23,489,934.00	58,275,818.00
19	Dinas Permukiman dan Perumahan	7,191,598.00	9,200,173.00	5,960,000.00	7,734,478.00	7,294,859.00	37,381,108.00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4,363,400.00	8,349,047.00	8,533,706.00	9,223,180.00	8,111,982.00	38,581,315.00
21	Dinas Koperasi dan UKM	6,616,317.00	11,436,367.00	5,571,507.00	7,676,220.00	8,667,861.00	39,968,272.00
22	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	1,000,000.00	779,435.00	1,106,676.00	1,542,489.00	1,461,850.00	5,890,450.00
23	Dinas Perikanan dan Kelautan	13,418,675.00	17,651,476.00	16,127,972.00	12,462,342.00	12,694,737.00	72,355,202.00
24	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	51,522,332.00	91,960,908.00	89,211,025.00	34,539,127.00	39,781,871.00	307,015,263.00
25	Dinas Perternakan	8,543,770.00	14,152,752.00	16,067,766.00	13,212,660.00	16,969,000.00	68,945,948.00
26	Dinas Perkebunan	2,807,570.00	4,373,980.00	4,707,013.00	4,238,790.00	5,304,742.00	21,432,095.00
27	Dinas Kehutanan	5,099,330.00	5,322,065.00	5,984,545.00	5,079,367.00	3,107,000.00	24,592,307.00
28	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2,778,140.00	2,000,000.00	2,737,500.00	3,900,000.00	4,584,500.00	16,000,140.00
29	Inspektorat	-	-	380,000.00	-	-	380,000.00
30	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	547,220.00	827,486.00	600,000.00	1,974,706.00
31	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-	4,530,499.00	4,530,499.00
Jumlah		1,449,149,555	1,444,391,659	1,057,619,548	360,214,143	535,487,821	4,846,862,726

Distribusi alokasi dana APBN Tugas Pembantuan yang masuk ke Provinsi Jawa Barat melalui OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 3.16.

**Tabel 3.16.**  
**Alokasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2011-2015**

NO.	PROVINSI, KAB/KOTA	PAGU ANGGARAN (Dalam Ribuan Rupiah)					JUMLAH
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Kota Bandung	7,876,397.00	8,287,050.00	6,748,728.00	75,900,870.00	1,702,230.00	100,515,275.00
2	Kota Banjar	2,997,500.00	1,681,700.00	1,436,478.00	1,477,220.00	514,944.00	8,107,842.00
3	Kota Bekasi	8,343,650.00	6,464,124.00	2,674,650.00	2,860,650.00	-	20,343,074.00
4	Kota Bogor	9,530,227.00	4,838,500.00	4,101,030.00	3,515,920.00	1,178,094.00	23,163,771.00
5	Kota Cimahi	675,000.00	1,160,850.00	1,149,150.00	1,227,150.00	-	4,212,150.00
6	Kota Cirebon	3,720,974.00	2,628,050.00	1,917,300.00	3,309,560.00	-	11,575,884.00
7	Kota Depok	4,738,750.00	2,787,600.00	2,758,800.00	2,950,800.00	706,584.00	13,942,534.00
8	Kota Sukabumi	2,894,358.00	3,774,750.00	2,120,678.00	1,418,250.00	-	10,208,036.00
9	Kota Tasikmalaya	5,886,425.00	2,402,100.00	2,541,428.00	4,153,430.00	514,944.00	15,498,327.00
10	Kabupaten Bandung	19,938,513.00	15,854,880.00	19,344,678.00	17,162,820.00	17,576,368.00	89,877,259.00
11	Kabupaten Bandung Barat	13,476,475.00	12,737,025.00	12,992,552.00	16,824,410.00	14,846,895.00	70,877,357.00
12	Kabupaten Bekasi	12,330,050.00	14,996,502.00	9,805,102.00	4,131,850.00	3,142,850.00	44,406,354.00
13	Kabupaten Bogor	23,233,260.00	16,028,950.00	21,437,735.00	16,465,155.00	8,180,305.00	85,345,405.00
14	Kabupaten Ciamis	18,564,530.00	18,667,200.00	30,908,870.00	28,353,555.00	19,291,382.00	115,785,537.00
15	Kabupaten Cianjur	16,637,418.00	35,291,388.00	25,426,276.00	49,665,905.00	47,247,410.00	174,268,397.00
16	Kabupaten Cirebon	29,741,065.00	35,072,049.00	29,411,250.00	18,520,780.00	6,389,799.00	119,134,943.00
17	Kabupaten Garut	31,014,443.00	30,002,821.00	22,724,007.00	38,938,285.00	39,129,170.00	161,808,726.00
18	Kabupaten Indramayu	24,304,005.00	40,855,289.00	30,563,840.00	44,294,655.00	33,026,556.00	173,044,345.00
19	Kabupaten Karawang	33,822,753.00	31,333,553.00	16,155,662.00	14,886,950.00	7,671,834.00	103,870,752.00
20	Kabupaten Kuningan	19,552,695.00	35,203,957.00	13,527,715.00	11,042,605.00	7,777,688.00	87,104,660.00
21	Kabupaten Majalengka	16,574,801.00	12,583,249.00	12,183,650.00	11,955,020.00	12,541,076.00	65,837,796.00
22	Kabupaten Purwakarta	9,510,593.00	8,464,800.00	5,136,770.00	8,632,680.00	3,949,310.00	35,694,153.00
23	Kabupaten Subang	24,894,139.00	16,133,738.00	11,200,330.00	19,234,520.00	13,297,444.00	84,760,171.00
24	Kabupaten Sukabumi	31,370,590.00	45,305,727.00	30,454,044.00	45,806,120.00	5,586,556.00	158,523,037.00
25	Kabupaten Sumedang	26,310,985.00	28,180,164.00	18,248,600.00	12,454,500.00	11,490,018.00	96,684,267.00
26	Kabupaten Tasikmalaya	19,351,273.00	14,759,170.00	16,721,220.00	14,541,55.00	15,518,497.00	80,892,115.00
27	Kabupaten Pangandaran	-	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
28	Provinsi Jawa Barat	285,837,418.00	46,841,873.00	512,530,060.00	30,519,133.00	412,086,396.00	2,187,814,880.00
Jumlah		703,128,287.00	992,337,059.00	864,220,603.00	900,244,748.00	685,366,350.00	4,145,297,047.00



### **3.3.2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)**

#### **3.3 2..1. Kebijakan Fasilitas TJSLP dan PKBL Provinsi Jawa Barat**

Kebijakan fasilitas TJSLP/PKBL Jawa Barat didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program TJSLP/PKBL yang dimiliki oleh dunia usaha (BUMD.BUMN,SWASTA) di Provinsi Jawa Barat harus difasilitasi dengan sistematis sehingga memberikan kontribusi yang besar pada pembangunan daerah, oleh karena itu diperlukan sebuah upaya terstruktur untuk mengembangkan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan para pelaku dunia usaha. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur desa dan kota sebagai aspek pembangunan daerah menjadi salah satu Program TJSLP/PKBL yang dimiliki oleh dunia usaha di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan inisiasi untuk menjalin kerjasama yang sinergis dengan dunia usaha yang ada di Jawa Barat. Upaya sistematis dimaksud telah diwujudkan melalui deklarasi “**Komitmen Bandung**” pada tanggal 14 Januari 2011, untuk pengembangan Program CSR dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa Barat, dengan dua misi utama yakni misi kemanusiaan dan lingkungan serta pengembangan program CSR/TJSLP lainnya (infrastruktur desa dan kota,pemberdayaan masyarakat dll), melalui kemitraan antara Dunia Usaha (BUMD,BUMN,SWASTA) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

#### **3.3 2..2. Realisasi Program TJSLP/PKBL Jawa Barat Tahun 2014**

Rincian alokasi anggaran TJSLP/PKBL perusahaan-perusahaan di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 3.17., 3.18., dan 3.19.

**Tabel 3.17.**

**Rekapitulasi Jumlah Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Jabar  
Sumber Dana Perusahaan BUMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 s/d 2014**

NO	NAMA PERUSAHAAN	Nilai Investasi TJSL-PKBL				Jumlah
		2011 (Rp.)	2012 (Rp.)	2013 (Rp.)	2014 (Rp.)	
1	PD. Jasa & Kepariwisata (JAWI)	18.500.000	33.500.000	66.185.000	69.347.500	<b>187.532.500</b>
2	PT. Bank BJB. Tbk	2.750.000.000	1.650.000.000	11.892.560.360	17.308.357.887	<b>33.600.918.247</b>
3	PT. Jasa Sarana	1.350.000.000	-	-	-	<b>1.350.000.000</b>
<b>Jumlah</b>		<b>4.118.500.000</b>	<b>1.683.500.000</b>	<b>11.958.745.360</b>	<b>17.377.705.387</b>	<b>35.138.450.747</b>

**Tabel 3.18.**

**Rekapitulasi Jumlah Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Jabar  
Sumber Dana Perusahaan BUMN Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 s/d 2014**

NO	NAMA PERUSAHAAN	Nilai Investasi TJSL-PKBL				Jumlah
		2011 (Rp.)	2012 (Rp.)	2013 (Rp.)	2014 (Rp.)	
1	Perum Perhutani Unit III	449.810.437.295	-	666.297.850	286.050.000	<b>450.762.785.145</b>
2	PT. ADHI KARYA	300.000.000	-	2.293.278.750	857.500.000	<b>3.450.778.750</b>
3	PT. ANEKA TAMBANG (ANTAM) TBK	1.050.000.000	2.550.000.000	7.032.576.514	4.825.862.901	<b>15.458.439.415</b>
4	PT. Angkasa Pura II (Husen Sastranegara)	-	-	1.939.214.444	2.561.011.155	<b>4.500.225.599</b>
5	PT. Asuransi Abri (ASABRI)	-	-	411.844.000	330.380.000	<b>742.224.000</b>
6	PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	-	-	392.000.000	406.277.000	<b>798.277.000</b>
7	PT. BANK MANDIRI Tbk.	2.250.000.000	1.950.000.000	-	-	<b>4.200.000.000</b>
8	PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI)	-	150.000.000	-	2.274.197.834	<b>2.424.197.834</b>
9	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)	1.200.000.000	-	4.302.463.267	3.930.637.000	<b>9.433.100.267</b>
10	PT. Bank Tabungan Negara Kanwil	-	-	-	-	<b>-</b>

NO	NAMA PERUSAHAAN	Nilai Investasi TJSL-PKBL				Jumlah
		2011 (Rp.)	2012 (Rp.)	2013 (Rp.)	2014 (Rp.)	
	Bandung					
11	PT. BIO FARMA	-	450.000.000	-	-	450.000.000
12	PT. HUTAMA KARYA	300.000.000	-	-	-	300.000.000
13	PT. Indofarma	-	-	-	-	-
14	PT. Jasa Marga Cab. Purbaleunyi	150.000.000	-	1.211.496.550	403.521.250	1.765.017.800
15	PT. Jasa Raharja	150.000.000	-	-	2.976.220.000	3.126.220.000
16	PT. LEN Industri (Persero)	-	-	-	597.125.000	597.125.000
17	PT. Pegadaian (Persero)	-	-	815.467.000	278.877.700	1.094.344.700
18	PT. Pelabuhan Indonesia II	-	-	-	-	-
19	PT. Pelindo II (Persero) Cirebon	300.000.000	-	607.750.000	-	907.750.000
20	PT. Pembangunan Perumahan	-	-	-	-	-
21	PT. Perkebunan Nusantara VIII	750.000.000	1.800.000.000	-	-	2.550.000.000
22	PT. PERTAMINA (SR PP Regions JBB)	4.500.000.000	1.200.000.000	-	-	5.700.000.000
23	PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang	-	-	7.730.088.764	6.394.406.448	14.124.495.212
24	PT. Perum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO)	-	-	-	413.264.000	413.264.000
25	PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)	150.000.000	-	1.384.500.000	4.816.309.099	6.350.809.099
26	PT. PINDAD	-	-	658.520.500	321.128.750	979.649.250
27	PT. POS INDONESIA KANWIL BANDUNG	-	-	-	-	-
28	PT. Prashada Pamunah Limbah (PPLI/WMI)	-	-	-	976.900.000	976.900.000

NO	NAMA PERUSAHAAN	Nilai Investasi TJSL-PKBL				Jumlah
		2011 (Rp.)	2012 (Rp.)	2013 (Rp.)	2014 (Rp.)	
29	PT. Pupuk Kujang	300.000.000	-	-	1.990.361.400	<b>2.290.361.400</b>
30	PT. SUCOFINDO	-	-	1.206.000.000	1.361.000.000	<b>2.567.000.000</b>
31	PT. Taspen (Persero)	-	-	-	-	-
32	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk	-	-	19.050.335.00 0	43.348.378.00 0	<b>62.398.713.000</b>
33	PT. WASKITA KARYA	300.000.000	-	-	-	<b>300.000.000</b>
34	PT. WIJAYA KARYA	900.000.000	-	-	-	<b>900.000.000</b>
35	PT. Yodya Karya (Persero)	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>462.410.437.295</b>	<b>8.100.000.000</b>	<b>49.701.832.63 9</b>	<b>79.349.407.53 7</b>	<b>599.561.677.471</b>

**Tabel 3.19.**

**Rekapitulasi Jumlah Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Jabar  
Sumber Dana PMDN/PMA Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 s/d 2014**

NO	NAMA PERUSAHAAN	Nilai Investasi TJSL-PKBL				Jumlah
		2011 (Rp.)	2012 (Rp.)	2013 (Rp.)	2014 (Rp.)	
1	Chevron Geothermal Indonesia Ltd. (Drajat - Garut)	-	-	-	2.520.500.000	<b>2.520.500.000</b>
2	Chevron Geothermal Indonesia Ltd. (Salak)	1.800.000.000	-	-	-	<b>1.800.000.000</b>
3	Forum Ciayumajakuning	600.000.000	-	-	-	<b>600.000.000</b>
4	PT. Alfamart	-	-	-	-	-
5	PT. Astra International	-	-	3.050.000.000	-	<b>3.050.000.000</b>
6	PT. Bank Danamon, Tbk Kanwil Jabar	-	-	-	-	-
7	PT. Belfoods Indonesia	-	-	-	-	-
8	PT. BUMN Hijau Lestari	-	-	-	2.274.197.834	<b>2.274.197.834</b>
9	PT. Coca Cola Amatil	-	-	-	-	-

NO	NAMA PERUSAHAAN	Nilai Investasi TJSL-PKBL				Jumlah
		2011 (Rp.)	2012 (Rp.)	2013 (Rp.)	2014 (Rp.)	
	Indonesia					
10	PT. Horiguchi Engineering Indonesia	-	-	-	-	-
11	PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (Citeureup-Bogor)	-	-	13.136.388.056	1.795.685.995	<b>14.932.074.051</b>
12	PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (Palimanan-Cirebon)	-	-	4.945.596.334	5.719.631.634	<b>10.665.227.968</b>
13	PT. Indofood	-	-	-	-	-
14	PT. Indonesia Power UBP Kamojang	-	-	-	4.540.341.000	<b>4.540.341.000</b>
15	PT. Jababeka Tbk.	1.800.000.000	750.000.000	0	4.503.420.000	<b>7.053.420.000</b>
16	PT. Karawang International Industrial (KIIC)	-	-	-	539.566.300	<b>539.566.300</b>
17	PT. Marunda Center	-	-	367.595.220	1.344.864.427	<b>1.712.459.647</b>
18	PT. Menara Terus Makmur	-	-	-	-	-
19	PT. MEGAOPOLIS MANUNGGAL (MM 2100) INDUSTRI TOWN	4.350.000.000	600.000.000	-	-	<b>4.950.000.000</b>
20	PT. PG Rajawali II (Cirebon)	-	-	-	-	-
21	PT. PIKIRAN RAKYAT BANDUNG	150.000.000	-	-	-	<b>150.000.000</b>
22	PT. Pindo Deli	-	-	-	-	-
23	PT. Putera Sampoerna Foundation	-	-	-	4.083.810.000	<b>4.083.810.000</b>
24	PT. Sang Hyang Seri	-	-	-	-	-
25	PT. Sari Ater	-	-	149.847.500	94.209.000	<b>244.056.500</b>
26	PT. Sinkona Indonesia Lestari	-	-	-	-	-
28	PT. Telkomsel	-	-	-	-	-
29	PT. Tirta Investama - Danone Aqua	-	-	-	1.831.410.714	<b>1.831.410.714</b>
30	PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia	-	-	-	-	-
31	PT. Trans Retail	-	-	-	-	-

NO	NAMA PERUSAHAAN	Nilai Investasi TJSL-PKBL				Jumlah
		2011 (Rp.)	2012 (Rp.)	2013 (Rp.)	2014 (Rp.)	
	Indonesia					
32	PT. PP - NK	300.000.000	-	-	-	300.000.000
33	Star Energy Geothermal Indonesia (Wayang Windu)	450.000.000	-	-	-	450.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>9.450.000.000</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>21.649.427.110</b>	<b>29.247.636.904</b>	<b>61.697.064.014</b>

Rencana Program dan Kegiatan Fasilitas TJSLP/PKBL Jabar Tahun 2014, tetap akan melanjutkan pengembangan misi TJSLP/PKBL Jabar: untuk kemanusiaan dan lingkungan serta pengembangan program TJSLP/PKBL Lainnya (infrastruktur desa dan kota, pemberdayaan masyarakat dll).

### 3.3.3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

Pinjaman/hibah luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan diberbagai sektor. Pinjaman/hibah luar negeri diperlukan karena adanya kebutuhan investasi untuk membangun ekonomi dan adanya keterbatasan sumber dana pemerintah untuk investasi.

Pinjaman/Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Sumber PHLN adalah Negara Asing, Lembaga Multilateral, Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan Asing. Jenis PHLN meliputi pinjaman lunak, Fasilitas Kredit Ekspor, Pinjaman Komersial dan Pinjaman Campuran.

Sumber pendanaan pembangunan melalui DIPA APBN di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013, 2014 s.d. 2015, dapat dilihat pada tabel 3.20.

**Tabel 3.20.**

**Rekapitulasi DIPA Berdasarkan Jenis Kewenangan  
Tahun 2013, 2014 s.d. 2015 di Provinsi Jawa Barat**

No.	Jenis Kewenangan	Pagu DIPA		
		2013	2014	2015
1.	Kantor Pusat	197.871.981.200	223.517.576.000	271.182.054.550
2.	Kantor Daerah	20.080.695.000	79.902.785.000	129.321.699.000
3.	Dekonsentrasi	70.133.817.000	84.411.656.000	9.466.928.000
4.	Tugas Pembantuan	9.762.311.000	-	-
5.	Urusan Bersama	233.277.500.000	80.305.287.000	5.658.450.000
	<b>Jumlah</b>	<b>531.126.304.200</b>	<b>468.137.304.000</b>	<b>415.629.131.550</b>

**Sumber :** Kanwil XII Ditjen Perbendaharaan Bandung

Dari jumlah tersebut, jumlah alokasi PHLN yang masuk ke Jawa Barat pada Tahun 2013, 2014 s.d. 2015, dapat dilihat pada tabel 3.21.

**Tabel 3.21.**

**Alokasi Dana PHLN berdasarkan Kementerian/Lembaga  
Tahun 2013, 2014 s.d. 2015 di Provinsi Jawa Barat**

No.	Kementerian/Lembaga	Besaran Anggaran (Rp)		
		2013	2014	2015
1.	Kementerian Dalam Negeri	158.845.103.000	83.823.116.000	14.836.290.000
2.	Kementerian Pertanian	603.600.000	650.000.000	-
3.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	13.375.975.000	75.675.785.000	128.311.699.000
4.	Kementerian Kesehatan	7.314.925.000	588.540.000	289.088.000
5.	Kementerian Kehutanan	14.604.906.000	8.054.000.000	6.210.000.000
6.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1.900.000.000	-	-
6.	Kementerian Pekerjaan Umum	327.497.685.200	274.556.663.000	228.882.054.550
7.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	6.984.110.000	24.789.200.000	37.100.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>531.126.304.200</b>	<b>468.137.304.000</b>	<b>415.629.131.550</b>

**Sumber :** Kanwil XII Ditjen Perbendaharaan Bandung

Dari Tabel 3.21 diatas dapat terlihat bahwa Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh alokasi pendanaan PHLN terbesar, apabila dibandingkan dengan alokasi

Kementerian/Lembaga lainnya. Sedangkan Kementerian yang memperoleh alokasi pendanaan PHLN terkecil adalah Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan.

Program dan Kegiatan yang bersumber dari PHLN yang dialokasikan untuk Provinsi Jawa Barat dari Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut :

**Alokasi Dana PHLN Berdasarkan Kementerian Tahun 2013 di Provinsi Jawa Barat**

NO	NAMA KEMENTERIAN	NAMA SATKER	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PAGU
1	Kementerian Dalam Negeri	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)	62.373.795.000
		Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	7.703.808.000
		Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab. Sukabumi	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	18.638.500.000
		Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cianjur	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	15.515.000.000
		Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kab. Subang	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	2.867.000.000
		Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab. Sumedang	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	10.151.000.000
		Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab. Garut	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	18.885.000.000
		Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Kuningan	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	14.293.000.000
		Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab. Bandung Barat	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	8.418.000.000
2	Kementerian Pertanian	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kab. Karawang	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	201.200.000
		Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Karawang	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	0
		Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kab. Cirebon	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	201.200.000
		Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Majalengka	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	201.200.000
3	Kementerian	Universitas Pajajaran	Program Pendidikan	Peningkatan Mutu Prodi	5.097.391.000



NO	NAMA KEMENTERIAN	NAMA SATKER	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PAGU
	Pendidikan Dan Kebudayaan		Tinggi	Profesi Kesehatan dan Mutu Pendidikan Kesehatan	
		Politeknik Negeri Bandung	Program Pendidikan Tinggi	Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik	4.251.961.000
		Politeknik Manufaktur Bandung	Program Pendidikan Tinggi	Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik	2.150.000.000
		Pppptk Ilmu Pengetahuan Alam Bandung	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	264.687.000
		LPMP Jawa Barat	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan	1.400.516.000
		LPMP Jawa Barat	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan	211.420.000
4	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Prop. Jawa Barat	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Penyehatan Lingkungan	56.214.000
		Dinas Kesehatan Kab. Bandung	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Penyehatan Lingkungan	1.472.089.000
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Penyehatan Lingkungan	2.893.311.000
		Dinas Kesehatan Kab. Karawang	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Penyehatan Lingkungan	2.893.311.000
5	Kementerian Kehutanan	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat	Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam	4.891.020.000
		Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional	1.813.700.000
		Pusat Penelitian Dan Pengembangan Perubahan Iklim Dan Kebijakan	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan	Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan	7.900.186.000
6	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan Dan Pengurangan Kemiskinan Di Kab. Sumedang	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	50.000.000
		Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan Dan Pengurangan Kemiskinan Di Kab. Sumedang	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	850.000.000
		Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan	50.000.000

NO	NAMA KEMENTERIAN	NAMA SATKER	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PAGU
		Ketahanan Pangan Dan Pengurangan Kemiskinan Kab. Karawang	Budidaya	Lingkungan Pembudidayaan Ikan	
		Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan Dan Pengurangan Kemiskinan Kab. Karawang	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	950.000.000
7	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembinaan Pamsimas	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	0
		Pembinaan Pamsimas	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	0
		Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	0
		Penataan Bangunan Dan Lingkungan Jawa Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	77.798.560.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Bogor	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	12.510.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Sukabumi	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	5.325.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Cianjur	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	2.355.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Bandung	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan	17.430.000.000

NO	NAMA KEMENTERIAN	NAMA SATKER	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PAGU
				Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Garut	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	6.720.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Tasikmalaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	3.450.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Ciamis	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	2.205.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Kuningan	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	2.625.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Cirebon	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	20.640.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Majalengka	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	6.075.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Sumedang	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	2.550.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Indramayu	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan	5.505.000.000

NO	NAMA KEMENTERIAN	NAMA SATKER	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PAGU
				Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Subang	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	3.330.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Purwakarta	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	2.610.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Karawang	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	3.795.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Bekasi	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	3.225.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	7.755.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	2.985.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bandung	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	7.830.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Cirebon	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan,	2.220.000.000

NO	NAMA KEMENTERIAN	NAMA SATKER	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PAGU
				Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bekasi	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	3.480.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Depok	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	2.910.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Cimahi	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	990.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Tasikmalaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	9.375.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Banjar	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	1.845.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Bandung Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	4.770.000.000
		Snvt Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citarum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	89.374.439.000
		Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	254.000.000
		Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu	0
		Balai Besar Wilayah	Program Pengelolaan	Pengelolaan dan	2.228.683.000

NO	NAMA KEMENTERIAN	NAMA SATKER	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PAGU
		Sungai Cimanuk-Cisanggarung	Sumber Daya Air	Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	
		Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Air	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum	Penelitian dan Pengembangan Subbidang Sumber Daya Air	13.332.003.200
8	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	Pusat Pendidikan Dan Latihan Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	Penyusunan dan Evaluasi Rencana	6.984.110.000
<b>T O T A L</b>					<b>531.126.304.200</b>

Sumber : Kanwil XII Ditjen Perbendaharaan Bandung

### Alokasi Dana PHLN Berdasarkan Kementerian Tahun 2014 di Provinsi Jawa Barat

NO	NAMA KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA SATKER	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PAGU
1	Kementerian Dalam Negeri	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)	75.025.520.000
	Kementerian Dalam Negeri	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	8.797.596.000
2	Kementerian Pertanian	Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian	Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing	Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	650.000.000
3	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Pppptk Ilmu Pengetahuan Alam Bandung	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	23.599.920.000
	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Pppptk Tk Dan Plb Bandung	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	23.721.420.000
	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Lpmp Jawa Barat	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan	6.407.740.000
	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Politeknik Negeri Bandung	Program Pendidikan Tinggi	Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik	12.683.705.000
	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Politeknik Manufaktur Bandung	Program Pendidikan Tinggi	Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik	9.263.000.000
4	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Prop. Jawa Barat	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Penyehatan Lingkungan	588.540.000
5	Kementerian Kehutanan	Pusat Penelitian Dan Pengembangan Perubahan Iklim Dan Kebijakan	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan	Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan	4.477.000.000

NO	NAMA KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA SATKER	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PAGU
				Kebijakan Kehutanan	
	Kementerian Kehutanan	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat	Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam	2.077.000.000
	Kementerian Kehutanan	Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional	1.500.000.000
6	Kementerian Pekerjaan Umum	Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Cimanuk Cisanggarung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	4.186.238.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Penataan Bangunan Dan Lingkungan Jawa Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	91.563.874.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Snvt Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citarum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	79.130.976.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Ii Provinsi Jabar	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	50.000.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Sukabumi	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.760.000.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Bandung	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	880.000.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Garut	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.760.000.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Tasikmalaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	880.000.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Kuningan	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.760.000.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Cirebon	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.760.000.000

NO	NAMA KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA SATKER	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PAGU
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Sumedang	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.760.000.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Subang	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	880.000.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Purwakarta	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	880.000.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Bekasi	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.760.000.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bandung	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan	0
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Cirebon	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan	0
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Bandung Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.760.000.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan	0
	Kementerian Pekerjaan Umum	Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu	720.732.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu	2.759.556.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Karawang	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	5.649.037.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Bekasi	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	5.106.250.000



NO	NAMA KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA SATKER	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PAGU
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	12.278.750.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	4.726.250.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bandung	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	12.397.500.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Cirebon	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	3.145.000.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bekasi	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	5.510.000.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Depok	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	4.607.500.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Cimahi	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	1.567.500.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Tasikmalaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	14.843.750.000
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Banjar	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	2.921.250.000

NO	NAMA KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA SATKER	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PAGU
	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Bandung Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	7.552.500.000
7	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	Pusat Pendidikan Dan Latihan Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	24.789.200.000
					<b>468.137.304.000</b>

Sumber : Kanwil XII Ditjen Perbendaharaan Bandung

## Alokasi Dana PHLN Berdasarkan Kementerian Tahun 2015 di Provinsi Jawa Barat

NO	NAMA KEMENTERIAN	NAMA SATKER	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PAGU
1	Kementerian Dalam Negeri	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	9.177.840.000
		Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab. Bandung Barat	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	5.658.450.000
2	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Politeknik Negeri Bandung	Program Pendidikan Tinggi	Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa	16.490.090.000
		Politeknik Manufaktur Bandung	Program Pendidikan Tinggi	Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa	10.220.000.000
		Pppptk Ilmu Pengetahuan Alam Bandung	Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	38.456.792.000
		PPPPTK Tk Dan Plb Bandung	Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	42.656.072.000
		LPMP Jawa Barat	Program Pengembangan SDM Pendidikan dan	Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan	12.947.710.000

NO	NAMA KEMENTERIAN	NAMA SATKER	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PAGU
			Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan		
		PPPPTK Bidang Mesin Dan Teknik Industri Bandung	Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.960.940.000
		PPPPTK Pertanian Cianjur	Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.580.095.000
3	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Prop. Jawa Barat	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Penyehatan Lingkungan	289.088.000
4	Kementerian Kehutanan	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat	Program Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam	650.000.000
		Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	Program Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Taman Nasional	360.000.000
		Pusat Penelitian Dan Pengembangan Perubahan Iklim Dan Kebijakan	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan	Peningkatan Kapasitas Penyusunan Kebijakan Kehutanan dan Penanganan Perubahan Iklim	5.200.000.000
5	Kementerian Pekerjaan Umum	Penataan Bangunan Dan Lingkungan Jawa Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	122.892.250.000
		Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan	250.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Sukabumi	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	220.000.000

NO	NAMA KEMENTERIAN	NAMA SATKER	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PAGU
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Bandung	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	220.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Garut	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	220.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Tasikmalaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	110.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Kuningan	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	220.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Cirebon	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	220.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Sumedang	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan	5.100.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Sumedang	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	220.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Subang	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	110.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Purwakarta	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	110.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Bekasi	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	220.000.000
		Pembangunan Infrastruktur	Program Pembinaan dan Pengembangan	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan	5.100.000.000

NO	NAMA KEMENTERIAN	NAMA SATKER	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PAGU
		Permukiman Kota Bandung	Infrastruktur Permukiman	Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan	
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Cirebon	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan	5.100.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Bandung Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	220.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan	7.225.000.000
		Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Citanduy	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu	2.961.750.000
		SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citarum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	78.163.054.550
6	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	Pusat Pendidikan Dan Latihan Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	37.100.000.000
					<b>415.629.131.550</b>

Sumber : Kanwil XII Ditjen Perbendaharaan Bandung

Dengan melihat uraian tabel tersebut diatas, pengelolaan Program dan Kegiatan PHLN yang bersumber dari Kementerian/Lembaga, diserahkan dan dikelola sepenuhnya oleh Satker di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, adalah :

Data pagu Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri (PHLN) berdasarkan Kementerian/Lembaga yang dialokasikan di Jawa Barat 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2013, 2014 dan 2015, yaitu sbb :

### Rekapitulasi PHLN (2013-2015)

No	Uraian	2013	2014	2015
1	Pinjaman Luar Negeri	Rp. 419.838.670.200,-	Rp. 396.318.088.000,-	Rp. 122.936.987.000,-
2	Hibah Luar Negeri	Rp. 111.287.634.000,-	Rp. 71.169.216.000,-	Rp. 292.692.144.550,-
<b>Jumlah</b>		Rp. 531.126.304.200,-	Rp. 468.137.304.000,-	Rp. 415.629.131.550,-

## **BAB IV**

### **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Pembangunan Daerah tahun 2016 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yang menekankan pada diversifikasi pembangunan Jawa Barat menuju pematapan pembangunan secara menyeluruh, untuk mencapai Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yaitu:

***"Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua"***

Untuk mempercepat pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, ditetapkan 5 misi yang memiliki tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, sebagai berikut:

**1. Misi Pertama**, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing. Misi ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018 yaitu Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), memiliki spirit juara dan siap berkompetisi serta didukung dengan ketahanan keluarga yang kokoh. Tujuannya adalah Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai IPTEK, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya, dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata;
- 2) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata;
- 3) Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK;
- 4) Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi Pertama adalah :

**Bidang Pendidikan**, strategi pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dengan biaya terjangkau dengan arah kebijakan (1) pendidikan

gratis Dasar dan Menengah (SD,SLTP, dan SLTA) dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas Dua Belas Tahun pada tahun 2018; (2) peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi serta pesantren (3) pendidikan terjangkau bagi anak-anak buruh dan TKI; (4) penyediaan beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, keluarga atlet berprestasi, dan guru serta mahasiswa di PTN/PTS. Strategi kedua meningkatkan jumlah dan kualitas Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSNN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP dengan arah kebijakan perwujudan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSNN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP yang berkualitas. Strategi ketiga, Menyelenggarakan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan dengan arah kebijakan peningkatan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Strategi keempat, Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan usia dini dengan arah kebijakan Peningkatan pendidikan usia dini di Jawa Barat. Strategi kelima, mengembangkan pendidikan inklusif dengan arah kebijakan peningkatan pemerataan dan mutu Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan berkebutuhan khusus. Strategi keenam, menuntaskan buta aksara dengan arah kebijakan terwujudnya masyarakat Jawa Barat bebas dari buta aksara, untuk upaya peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) bagi penduduk usia 15 tahun ke atas dilaksanakan melalui program paket A, B, dan paket C serta program khusus bentuk Provinsi Jawa Barat berupa Pendidikan SMP-IPM dan SMA/SMKIPM secara serempak di seluruh Kabupaten dan Kota dan keaksaraan usaha mandiri bagi penduduk buta aksara dewasa. **Bidang Kesehatan** melalui strategi pertama, Memperkuat pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan dengan arah kebijakan Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan. Strategi kedua Memperkuat pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, gangguan mental serta gangguan gizi dengan arah kebijakan penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular gangguan mental serta gizi masyarakat. Strategi ketiga, Memperkuat pembiayaan dan sumber daya kesehatan dengan arah kebijakan Penguatan Pembiayaan dan sumber daya kesehatan. Strategi keempat, Memperkuat manajemen, regulasi, teknologi informasi kesehatan, dan penelitian pengembangan kesehatan dengan arah kebijakan Penguatan Manajemen, regulasi, sistem informasi bidang kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan. **Bidang Ketenagakerjaan** melalui strategi pertama,



meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan arah kebijakan peningkatan daya saing tenaga kerja.Strategi kedua, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dengan arah kebijakan perlindungan, pengawasan, dan memberikan bantuan hukum bagi tenaga kerja Jawa Barat. Strategi ketiga, perluasan lapangan kerja dengan arah kebijakan (a) Peningkatan penempatan tenaga kerja; (b) Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus. **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** melalui strategi pertama, meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan dengan arah kebijakan peningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian perempuan.Strategi kedua, mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dengan arah kebijakan terwujudnya pemberdayaan gender/pemberdayaan perempuan.Strategi ketiga, mencegah dan menangani perdagangan perempuan dan anak (trafficking) dengan arah kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (trafficking). Strategi keempat, Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) arah kebijakan perwujudan kota dan kabupaten di Jawa Barat sebagai Kota Layak Anak.

**Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera** melalui strategi pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB dengan arah kebijakan Revitalisasi Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.Strategi kedua, mewujudkan keluarga berkualitas (sehat, sejahtera, dan mandiri) dengan arah kebijakan pengokohan ketahanan keluarga baik ketahanan fisik, ekonomi, dan sosial psikologi.**Bidang Perpustakaan** melalui strategi mendukung perpustakaan di Jawa Barat dan meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis informasi dan teknologi dengan arah kebijakan Terwujudnya perpustakaan Jawa Barat bertaraf internasional guna mendukung masyarakat gemar membaca.**Bidang Ketransmigrasian** melalui strategi pertama, menata persebaran penduduk baik di dalam maupun ke luar wilayah provinsi, dengan arah kebijakan (a) kerjasama bidang ketransmigrasian serta pengembangan kawasan transmigrasi; (b) Peningkatan kemampuan dan kemandirian calon transmigran, masyarakat Kawasan transmigrasi Lokal (*Resettlement*), dan warga sekitar.

**2. Misi Kedua**, Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan. Misi ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018, yaitu Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non-pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tujuannya adalah Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah, dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur;
- 2) Meningkatnya daya saing usaha pertanian;
- 3) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi;
- 4) Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan;
- 5) Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kedua adalah:

**Bidang Pekerjaan Umum** melalui strategi meningkatkan ekonomi perdesaan dengan arah kebijakan (a) dukungan pembangunan jalan di sentra pertanian, wisata, dan industri manufaktur, (b) dukungan sarana irigasi di sentra pertanian lahan sawah. **Bidang Penataan Ruang** melalui strategi menguatkan ekonomi regional, dengan arah kebijakan (a) pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur, Metropolitan Bandung Raya, dan Metropolitan Cirebon Raya; (b) pengembangan pusat pertumbuhan Pangandaran, Palabuhanratu, dan Rancabuaya. **Bidang Penanaman Modal** melalui strategi pertama, meningkatkan investasi daerah dengan arah kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Strategi kedua, meningkatkan produktivitas BUMD dan lembaga keuangan lainnya dengan arah kebijakan Meningkatkan peran, kinerja, dan daya saing BUMD dalam pengokohan ekonomi Jawa Barat. **Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** melalui strategi pertama, meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM dengan arah kebijakan : (a) peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM; (b) peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk, dan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM. **Bidang Ketenagakerjaan** melalui strategi, memperluas kesempatan kerja dengan arah kebijakan penempatan dan perluasan kesempatan kerja. **Bidang Ketahanan Pangan** melalui strategi, meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman, dan keamanan pangan, dengan arah

kebijakan peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses, dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan. **Bidang Perikanan dan Kelautan** melalui strategi, meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan terutama perikanan komersil di Pantai Selatan dan Pantai Utara melalui gerakan pengembangan perikanan pantai utara dan pantai selatan (GAPURA) dengan arah kebijakan (a) peningkatan produksi perikanan dan kelautan; (b) peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan. **Bidang Pertanian** melalui strategi pertama, mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dengan arah kebijakan mencetak lahan sawah baru untuk mencapai lahan pertanian berkelanjutan. Strategi kedua, meningkatkan produksi, inovasi, dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan, dengan arah kebijakan (a) peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan; (b) peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan; (c) peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak; (d) peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak sumber daya dan kelembagaan pertanian (e) pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan.

**Bidang Kehutanan**, melalui strategi, meningkatkan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, dengan arah kebijakan peningkatan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. **Bidang Perindustrian** melalui strategi, meningkatkan daya saing industri, dengan arah kebijakan (a) peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan-kemitraan antar industri; (b) peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki). **Bidang Perdagangan** melalui strategi, meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional, dengan arah kebijakan (a) peningkatan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri; (b) peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien; (c) penggunaan produk dalam

negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan pasar tradisional. **Bidang Pariwisata** melalui strategi, meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat, dengan arah kebijakan pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali.

**3. Misi Ketiga**, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik. Misi ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota. Tujuan dan sasaran dari Misi Ketiga adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan partisipatif, dengan sasaran Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik;
- 2) Terwujudnya pemerintahan yang modern, dengan sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan berbasis IPTEK;
- 3) Terwujudnya profesionalisme pemerintahan yang didukung oleh aparatur yang kompeten dengan sasaran Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur;
- 4) Meningkatkan stabilitas di daerah dengan sasaran Meningkatnya stabilitas tbumtranmas, kesadaran politik, dan hukum.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi Ketiga adalah:

**Bidang Perencanaan Pembangunan** melalui Strategi Pertama Meningkatkan kerjasama pembangunan, dengan arah kebijakan (a) Peningkatan Kerjasama Kemitraan Strategis lintas provinsi, pemerintahan pusat, dan kabupaten/kota, (b) Peningkatan Kualitas pengelolaan kerjasama Jawa Barat melalui aliansi strategis multi pihak dalam dan luar negeri. Strategi kedua, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan arah kebijakan (a) Peningkatan kualitas perencanaan daerah, (b) Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah, (c) Peningkatan kualitas penelitian dan riset perencanaan pembangunan daerah. **Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**, dengan strategi meningkatnya pengelolaan kependudukan di Jawa Barat dengan arah kebijakan Pengendalian dan penataan kependudukan. **Bidang Komunikasi dan Informatika** melalui strategi meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan informasi, dengan arah kebijakan: (1) pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan; (2) peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik menuju cyber province. **Bidang Pertanahan** melalui strategi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dengan arah kebijakan mewujudkan tertib administrasi pertanahan. **Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri** melalui strategi pertama, Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan arah kebijakan (a) Peningkatan pembinaan tibumtranmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya, (b) Peningkatan kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS Se Jawa Barat. Strategi kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara, dengan arah kebijakan (a) Meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik, (b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik, (c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu. Strategi ketiga, Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara, dengan arah kebijakan Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan Negara. **Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**, melalui Strategi pertama, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan arah kebijakan (a) Penataan struktur organisasi yang proporsional, (b) Peningkatan pelayanan administrasi organisasi, (c) Penuntasan kejelasan batas administrasi daerah, (d) Percepatan Penanganan dan Pelayanan kepada masyarakat, (e) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pengembangan zona integritas, (f) Mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, (g) Pengaturan pengelolaan keuangan daerah, (h) Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, (i) Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat, (j) Peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi, (k) Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dalam menyelesaikan aset-aset daerah yang bermasalah, (l) Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), (m) Peningkatan Pengawasan

internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, (n) Penataan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Strategi kedua, Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, dengan arah kebijakan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparat. Strategi ketiga, Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah, dengan arah kebijakan (a) Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku aparatur berbasis kompetensi, (b) Meningkatkan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja. Strategi keempat, Menata sistem hukum di daerah, dengan arah kebijakan (a) Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, (b) Peningkatan Penyelarasan peraturan daerah, (c) Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya. Strategi kelima, Meningkatkan budaya taat hukum, dengan arah kebijakan peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundangan dan HAM. Strategi keenam, Meningkatnya kualitas lembaga legislatif dengan arah kebijakan peningkatan kapasitas lembaga legislatif dan intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, melalui strategi meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat, dengan arah kebijakan (a) Peningkatan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan kemampuan keuangan dan sarana prasarana pemerintahan desa, (b) Peningkatan pembinaan bagi aparat desa, (c) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan (d) Meningkatkan Infrastruktur Perdesaan, dan (e) Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan. **Bidang Statistik**, melalui strategi Meningkatkan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah dengan arah kebijakan Peningkatan pengelolaan Satu Data Pembangunan. **Bidang Kearsipan**, melalui strategi Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah dengan arah kebijakan Mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. **Misi Keempat**, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018 yaitu Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah

dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dan sasaran dari Misi Keempat adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan, dengan sasaran Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana;
- 2) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar, dengan sasaran *pertama*, Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat, dan *Kedua*, Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keempat adalah :

**Bidang Lingkungan Hidup** dengan strategi pertama, menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana dengan arah kebijakan (a) peningkatan pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah serta penerapan teknologi bersih untuk industri; (b) peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Strategi kedua, meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan lindung dengan arah kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutan. Strategi ketiga, meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup dengan arah kebijakan : (a) peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, dan (b) peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut. **Bidang Pekerjaan Umum** dengan strategi pertama, meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang, dengan arah kebijakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Strategi kedua, meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air dengan arah kebijakan: (a) Peningkatan konservasi sumber daya air (b) Peningkatan pendayagunaan sumber daya air; (c) Pengendalian daya rusak air. Strategi ketiga, meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman dengan arah kebijakan (a) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum; (b) peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik; (c) peningkatan cakupan layanan persampahan; (d) peningkatan ketersediaan drainase perkotaan, dan (e) pengembangan lingkungan permukiman sehat, yang disertai dengan peningkatan perilaku dan keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas sanitasi. Strategi keempat, Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi dan kinerja

pengelolaan bangunan, gedung/rumah Negara dengan arah kebijakan (a) Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi; (b) peningkatan pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara. **Bidang Penataan Ruang** melalui strategi, meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang melalui proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing dengan arah kebijakan peningkatan kinerja penataan ruang. **Bidang Perumahan** melalui strategi pertama, meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dengan arah kebijakan (a) peningkatan ketersediaan rumah layak huni untuk rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR); (b) peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian. **Bidang Perhubungan** melalui strategi mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta mengembangkan sistem transportasi publik regional yang nyaman dengan arah kebijakan (a) Pengembangan sistem transportasi darat melalui pengembangan sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport) dan angkutan Kereta Api; (b) pengembangan sistem transportasi udara; (c) pengembangan sistem transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya, dan (d) peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan. **Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**, melalui strategi pertama meningkatkan penyediaan infrastruktur energi ketenagalistrikan, dengan arah kebijakan meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan. Strategi kedua, mengembangkan sumber energi baru terbarukan dan konservasi energi, sumber daya mineral, geologi, dan air tanah, dengan arah kebijakan (a) meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan; (b) meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber energi panas bumi; (c) Meningkatkan upaya pengelolaan, pengusahaan, dan nilai tambah sumber daya mineral, geologi, dan air tanah.

- 5. Misi Kelima,** Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018 yaitu kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya



seni dan warisan budaya dan meningkatkan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal. Tujuan dan sasaran Misi Kelima adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan sasaran Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 2) Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga, dengan sasaran Meningkatkan peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu;
- 3) Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing, dengan sasaran Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan olah raga, seni, budaya, dan pariwisata; dan
- 4) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar manusia, dengan sasaran kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kelima adalah :

**Bidang Pemuda dan Olahraga** melalui strategi pertama, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga dengan arah kebijakan pendudukan pembangunan gelanggang olahraga di kota/kabupaten. Strategi kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan dengan arah kebijakan peningkatan pembinaan olahragawan. Strategi ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dengan arah kebijakan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Strategi keempat, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri dengan arah kebijakan (a) Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan; (b) peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif.

**Bidang Kebudayaan** melalui strategi pertama, Meningkatkan apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal dengan arah kebijakan (a) peningkatan pelestarian dan perlindungan budaya lokal. Strategi kedua, Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah, dengan arah kebijakan terwujudnya Jawa Barat sebagai pusat budaya. Strategi ketiga, Meningkatkan budaya masyarakat Jawa Barat dengan arah kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya dengan. Strategi keempat, Meningkatkan Apresiasi masyarakat terhadap seni dan perfilman daerah dengan arah kebijakan peningkatan pelestarian dan perlindungan seni dan perfilman daerah, peningkatan pelestarian seni dan perfilman

daerah.Strategi kelima, Meningkatkan pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam bidang seni dan budaya, dengan arah kebijakan Peningkatan perlindungan dan pengakuan atas seni dan budaya Jawa Barat. Strategi keenam, Meningkatkan SDM Bidang Seni dan Budaya, dengan arah kebijakan Peningkatan penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni, budaya, dan pariwisata, serta masyarakat.

**Bidang Sosial** melalui strategi pertama, mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial dan memberikan pelayanan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), melalui sistem panti dan luar panti atau berbasiskan masyarakat/ komunitas, serta bantuan kepada korban bencana dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya. dengan arah kebijakan Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial terhadap PMKS dan penghargaan kepada para Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/Janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial. Strategi kedua, meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS, dengan arah kebijakan pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial.Strategi ketiga, Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat, dengan arah kebijakan Penanggulangan korban bencana. **Bidang Agama** melalui strategi kesatu, meningkatkan kerukunan antar agama dan pemahaman pengamalan agama dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama.Strategi kedua, meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan dengan arah kebijakan penguatan lembaga keagamaan.

Untuk mendukung tujuan dan pencapaian sasaran misi, kebijakan umum pembangunan Jawa Barat diarahkan untuk :

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kualitas dan sebaran layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia Jawa Barat;

2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan dimaknai melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal;
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik dimaknai melalui kebijakan penyelenggaraan good governance yang bermutu, akuntabel, toleran, dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kuantitas, kualitas, dan pelayanan infrastruktur wilayah serta pengendalian tata ruang berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana serta peningkatan penciptaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
5. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal dimaknai melalui kebijakan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis potensi lokal.

Kebijakan operasional pembangunan di Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. **Melanjutkan** : melanjutkan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah selesai untuk selanjutnya dimanfaatkan dan direplikasi ke berbagai daerah;
2. **Menuntaskan**: menuntaskan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah dimulai dilaksanakan namun belum selesai untuk segera dapat dimanfaatkan;
3. **Memberi dukungan** : memberi dukungan, pada program-program pembangunan yang dilakukan langsung oleh komunitas berbasis masyarakat, akademisi, dan institusi pendidikan/riset serta dunia usaha;
4. **Reposisi** : reposisi dengan menerapkan strategi baru untuk program-program pembangunan yang sudah baik namun belum bisa dilaksanakan pembangunannya karena mengalami hambatan;
5. **Reorientasi** : melakukan reorientasi dengan menyusun program-program baru bersifat terobosan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang perlu segera dilaksanakan bersama bupati dan walikota dengan dukungan dari masyarakat

Menindaklanjuti kebijakan umum dan operasional pembangunan, Pemerintah

Provinsi Jawa Barat mengarahkan pembangunan pada tiga *fokus kebijakanyaitu* :

1. pembangunan berbasis sektoral melalui 10 (sepuluh) *Common Goals*, yaitu :
  - a) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan;
  - b) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan;
  - c) Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku;
  - d) Meningkatkan ekonomi pertanian;
  - e) Meningkatkan ekonomi non pertanian;
  - f) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan;
  - g) Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan, dan olahraga;
  - h) Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan;
  - i) Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan; dan
  - j) Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan;

Untuk fokus pembangunan sektoral, dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) strategi yaitu:

**Pertama**, pelibatan komunitas berbasis masyarakat dengan prinsip penguatan aktor lokal (*strengthening lokal actor*); **Kedua**, integrasi seluruh potensi nyata pembangunan dan daya saing di seluruh kabupaten/kota; **Ketiga**, penerapan manajemen pemerintahan model hibrida sebagai penghela percepatan pembangunan, yaitu mengkombinasi manajemen berbasis daerah otonom Kabupaten/Kota dengan manajemen kewilayahan; **Keempat**, penguatan komitmen pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas pemerintahan; serta **Kelima**, peningkatan peran multi pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan mutu serta akuntabilitas pembangunan.



**Gambar 4.1. Common Goals Tahun 2013-2018**

2. Pembangunan berbasis Program dan Kegiatan Unggulan Jawa Barat berdasarkan SK Gubernur No. 500/Kep. 66-Org/2014, yang akan disinergikan dan diwujudkan melalui Rencana Aksi Multipihak-Implementasi Pekerjaan (RAM-IP), dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah, dengan pembagian sebagai berikut :
  - a. Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM
    - (1) Infrastruktur Desa dan Perdesaan.
    - (2) Rehab 100 ribu Rumah Rakyat Miskin.
    - (3) Revitalisasi 50 ribu Posyandu Multifungsi
    - (4) Meningkatkan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
    - (1) 100.000 wirausaha baru.
    - (2) Mempersiapkan Cetak Sawah Baru 100.000 Ha (2015) (Nasional).
    - (3) Kontribusi Surplus 10 Juta Ton Beras (Nasional).
    - (4) Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu.
    - (5) Destinasi Wisata Dunia.
    - (6) Pengembangan Kawasan Industri Manufaktur.
    - (7) Ketahanan Pangan (Nasional).
    - (8) Pembangunan TOL dan Jalan Lintas Cepat.

- (9) Pembangunan Bandara Internasional Kertajati (BIJB Kertajati) dan Aerocity Kertajati.
- (10) Penanganan limbah di Kawasan Kahatex Rancaekek, Kawasan Industri Kulit Sukaregang Garut, Limbah Batubara, serta Penambangan Pasir Besi .
- (11) Penanganan Banjir Cileuncang di Kota Bandung dan Kota Bekasi.
- (12) Pengelolaan Terintegrasi DAS Citarum, DAS Ciliwung dan DAS Cimanuk.
- (13) Perwujudan Kawasan Lindung 45% (Jabar Green Province).
- (14) TPPAS Legok Nangka di Kab. Bandung dan TPPAS Nambo di Kab. Bogor.
- (15) Kemandirian Energi Perdesaan.
- (16) Sanitasi Lingkungan Kab/Kota.
- (17) Rasio Elektrifikasi Rumah
- (18) Penyelesaian Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede.

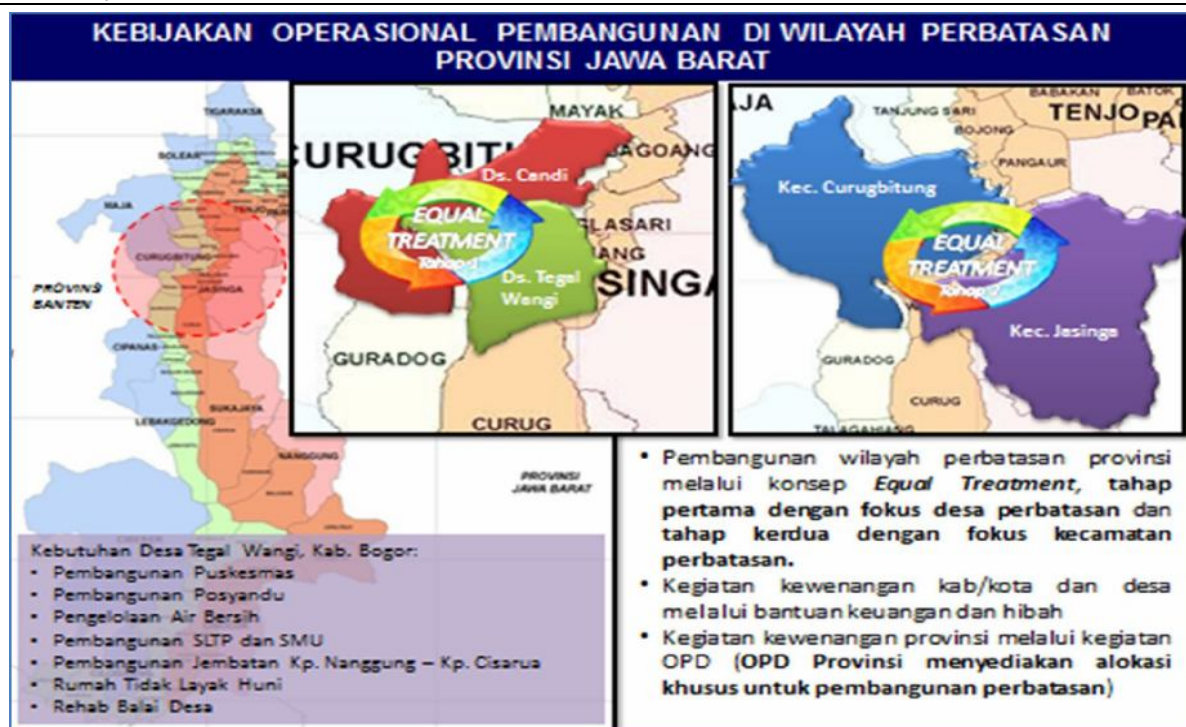
c. Asisten Kesejahteraan Rakyat

- (1) Sekolah Gratis SD/SLTP/SLTA.
- (2) Beasiswa Pendidikan untuk Pemuda, Tenaga Medis, Keluarga Atlet Berprestasi dan Guru.
- (3) 2 juta serapan tenaga kerja.
- (4) Pembangunan Gelanggang Olahraga di Kab/kota.
- (5) Pembangunan Pusat seni dan Budaya.
- (6) Pengurangan Kemiskinan.
- (7) Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (8) Pembangunan Venues dan Pelaksanaan PON XIX.
- (9) Pembangunan Masjid Monumental Jawa Barat.di 5 Wilayah.
- (10) Pembangunan Kampus Baru Perguruan Tinggi Di Luar Domisili (PDD) di Jawa Barat.
- (11) Pembangunan Ruang Kelas Baru
- (12) Pembangunan Kobong Pondok Pesantren

d. Asisten Administrasi

- (1) Modernisasi Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
- (2) Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Meningkatkan Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- (3) Pembangunan Monorel di Metropolitan Bandung Raya.

3. pembangunan berbasis kewilayahan, yang berdasarkan pada tata ruang, wilayah koordinasi pemerintahan pembangunan (WKPP) dan wilayah perbatasan antar provinsi. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan adalah:
- 1) Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan;
  - 2) Peningkatan percepatan pembangunan wilayah tertinggal agar dapat sejajar dengan wilayah lainnya melalui pendekatan peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarananya;
  - 3) Peningkatan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sektor lainnya dengan tidak merubah karakteristik perdesaan, dan peningkatan pembangunan desa di wilayah perbatasan melalui Tematik Wilayah Desa Perbatasan, antara lain : Peningkatan kebutuhan ruang kelas dan tenaga pengajar dalam rangka mendukung program wajib belajar 9 tahun; Ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di perbatasan; Penguatan infrastruktur jalan dan jembatan lintas perbatasan; Terjaminnya ketersediaan layanan listrik dan air bersih; Peningkatan pendapatan masyarakat daerah perbatasan melalui pengembangan kewirausahaan dan komoditas unggulan; dan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan publik;
  - 4) Peningkatan kerjasama antar daerah khususnya di kawasan metropolitan dan penanganan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi untuk menciptakan sinergitas dan integrasi wilayah, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya.
  - 5) Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan provinsi



**Gambar 4.2.**  
**Kebijakan Operasional Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat**

Kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah di Jawa Barat tidak terlepas dari kebijakan kewilayahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam pembagian kawasan andalan. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), menetapkan kawasan andalan di Provinsi Jawa Barat yaitu Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur dan sekitarnya), Kawasan Sukabumi dan sekitarnya, Kawasan Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka), Kawasan Cekungan Bandung, Kawasan Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumajakuning), dan Kawasan Priangan Timur-Pangandaran. Selain itu, ditetapkan pula Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai simpul-simpul pusat permukiman yang berfungsi sebagai pusat pelayanan wilayah di Jawa Barat. PKN meliputi PKN Jabodetabek (mencakup Provinsi Jabar, DKI, dan Banten), PKN Bandung Raya (mencakup Kabupaten/Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, 5 kecamatan di Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi), dan PKN Cirebon (mencakup Kabupaten/Kota Cirebon). PKW meliputi PKW Sukabumi, PKW Palabuhanratu, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Kadipaten, PKW Pangandaran, PKW Indramayu, dan PKW Tasikmalaya.



Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat Tahun 2009-2029 menetapkan Wilayah Pengembangan (WP), yang lebih ditekankan pada peningkatan kegiatan ekonomi yang diharapkan memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat. Penetapan pusat pelayanan diterapkan dalam sistem perkotaan sistem provinsi yang ditentukan berdasarkan potensi wilayah, aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan, dan kegiatan produksi serta perkembangan daerah sekitarnya yang tetap dipertahankan. PKW Palabuhanratu dan PKW Pangandaran dipromosikan menjadi Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp) yang ditetapkan masing-masing dengan fungsi khusus, yaitu bisnis kelautan dan pariwisata.

Fokus dan rencana pengembangan di setiap WP meliputi:

**1. Wilayah Pengembangan Bodebekpunjur (Kabupaten dan Kota Bogor, Bekasi, Kota Depok, dan kawasan Puncak di Kabupaten Cianjur), difokuskan pada :**

- Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok, diarahkan sebagai kota terdepan yang berbatasan dengan ibukota negara yang merupakan bagian dari pengembangan KSN Jabodetabekpunjur untuk mendorong pengembangan PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan, jasa, dan industri padat tenaga kerja.
- Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, diarahkan menjadi kawasan penyangga dalam sistem PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, serta untuk mengembangkan sektor industri ramah lingkungan dan hemat penggunaan air tanah, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non logam untuk mendukung pembangunan di Bodebekpunjur
- Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lindung di KSN Jabodetabekpunjur.
- Rencana pengembangan :
  - a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
  - c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai, dan protein hewani);
  - d. Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi;

- e. Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;
- f. Peningkatan fungsi kawasan lindung;
- g. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
- h. Pengembangan energi baru terbarukan;
- i. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
- j. Peningkatan investasi padat karya;
- k. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan;
- l. Pengendalian pencemaran air;
- l. Penataan daerah otonom.
- m. Pembangunan pusat seni dan budaya

**2. Wilayah Pengembangan Sukabumi (Kabupaten dan Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur), difokuskan pada :**

- Kota Sukabumi, diarahkan untuk pengembangan pusat pengolahan pusat pengolahan agribisnis dan peternakan, agropolitan, wisata agro, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, serta perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Sukabumi;
- Kabupaten Sukabumi, diarahkan untuk pengembangan agribisnis, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata pantai, wisata agro, wisata minat khusus, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Palabuhanratu dan simpul layanan wilayah sekitarnya, pengembangan wilayah pesisir selatan melalui pengembangan wisata pantai dan minat khusus serta perikanan tangkap, serta pertambangan mineral logam dan non-logam serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi yang diarahkan untuk kegiatan bisnis kelautan skala nasional dan internasional di PKNp Palabuhanratu; dan
- Kabupaten Cianjur, diarahkan untuk pengembangan agribisnis, pertanian, perkebunan, kehutanan, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata agro, wisata alam, industri kreatif, pengembangan wilayah pesisir untuk perikanan tangkap, wisata minat khusus, serta pertambangan mineral logam dan non-logam.

- Rencana Pengembangan :
  - a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
  - c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi dan protein hewani);
  - d. Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
  - e. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
  - f. Pengembangan energi baru terbarukan;
  - g. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
  - h. Penataan daerah otonom;
  - i. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir.
  - j. Pembangunan pusat seni dan budaya

**3. Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning (Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Majalengka, dan Kuningan), difokuskan pada :**

- Kota Cirebon, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (hinterland), serta menjadi simpul utama pelayanan jasa dan perdagangan, dan industri di Daerah bagian timur, serta untuk kegiatan wisata budaya dan religi;
- Kabupaten Cirebon, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor industri, bisnis kelautan dan pertanian, dan kegiatan pertambangan mineral;
- Kabupaten Indramayu, diarahkan menjadi PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta diarahkan untuk kegiatan utama pertanian lahan basah berkelanjutan, bisnis perikanan dan kelautan, industri, pertambangan terutama minyak, gas, agribisnis dan agroindustri;
- Kabupaten Majalengka, diarahkan menjadi lokasi Bandara Internasional Jawa Barat dan Aerocity di Kertajati, daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, serta untuk kegiatan agrobisnis dan industri bahan bangunan, dan pertambangan mineral serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi di PKW Kadipaten;
- Kabupaten Kuningan, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana pendukung, serta diarahkan untuk menampung kegiatan sektor pertanian, wisata alam, agroindustri, dan daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, termasuk perlindungan sumber air; dan

- Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana, untuk kegiatan utama agribisnis dan industri, serta kegiatan pertambangan mineral.
- Rencana Pengembangan :
  - a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
  - c. Peningkatan investasi;
  - d. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani);
  - e. Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
  - f. Peningkatan fungsi kawasan lindung;
  - g. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
  - h. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
  - i. Pengembangan energi baru terbarukan
  - j. Pembangunan infrastruktur transportasi;
  - k. Penataan daerah otonom.
  - l. Pengembangan wisata sejarah dan ziarah
  - m. Pembangunan pusat seni dan budaya
  - n. Peningkatan dukungan terkait rencana pembangunan Waduk Kuningan

**4. Wilayah Pengembangan Kawasan Khusus Cekungan Bandung(Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan sebagian Kabupaten Sumedang), difokuskan pada:**

- Kota Bandung, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif dan teknologi tinggi, dan pariwisata;
- Kabupaten Bandung, diarahkan sebagai bagian dari PKN, dengan kegiatan utama industri non-polutif, agro industri, wisata alam, pertanian dan perkebunan;
- Kabupaten Bandung Barat, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan kegiatan utama industri non-polutif, pertanian, industri kreatif dan teknologi tinggi;
- Kota Cimahi, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif; dan

- Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai PKL, dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, serta pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, agrobisnis, dan industri non-polutif.
- Rencana Pengembangan :
  - a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
  - c. Pengendalian pencemaran (air, udara, dan sampah);
  - d. Pembangunan infrastruktur transportasi;
  - e. Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;
  - f. Peningkatan mutu air baku;
  - g. Pengendalian pencemaran air;
  - h. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
  - i. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
  - j. Pengembangan energi baru terbarukan;
  - k. Pengembangan jasa dan perdagangan;
  - l. Penataan daerah otonom.
  - m. Pembangunan pusat seni dan budaya

**5. Wilayah Pengembangan Priangan Timur - Pangandaran (Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Pangandaran), difokuskan pada :**

- Kota Tasikmalaya, diarahkan sebagai bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta pusat pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan jasa;
- Kabupaten Tasikmalaya, diarahkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, agroindustri, perikanan dan industri pengolahan perikanan, pusat pengembangan industri kerajinan, wisata alam, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam;
- Kabupaten Garut, diarahkan untuk kegiatan dan industri pengolahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, wisata alam dan minat khusus, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta kegiatan wisata minat khusus di PKWp Rancabuaya;

- Kabupaten Ciamis, diarahkan untuk kegiatan dan industri pengolahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, wisata pantai, serta kegiatan pertambangan mineral non-logam serta penyediaan sarana dan prasarana PKW Pangandaran yang terintegrasi serta pengembangan PKNp Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional;
- Kota Banjar, diarahkan sebagai PKWp dengan sarana dan prasarana perkotaan yang terintegrasi, kegiatan perdagangan, jasa, dan sebagai pintu gerbang Daerah berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.
- Rencana Pengembangan :
  - a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
  - c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai, dan protein hewani);
  - d. Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
  - e. Peningkatan fungsi kawasan lindung;
  - f. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
  - g. Pengembangan energi baru terbarukan;
  - h. Pengembangan pariwisata berbasis *biodiversity*;
  - i. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
  - j. Penataan daerah otonom.
  - k. Pembangunan pusat seni dan budaya
  - l. Peningkatan dukungan terkait rencana pembangunan Waduk Matenggeng.

**6. Wilayah Pengembangan Purwasuka (Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang), difokuskan pada:**

- PKW Cikampek-Cikopo, diarahkan untuk memenuhi fungsinya sebagai PKW dengan melengkapi sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (hinterland);
- Kabupaten Purwakarta, diarahkan untuk kegiatan industri non-polutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, industri kreatif, pariwisata dan agroindustri, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam;

- Kabupaten Subang, diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, untuk kegiatan pertanian lahan basah berkelanjutan, industri non-polutif dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan sawah, kegiatan bisnis kelautan, serta kegiatan pertambangan mineral non-logam; dan
- Kabupaten Karawang, diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bodebek, untuk kegiatan pertanian lahan basah berkelanjutan, bisnis kelautan, industri non-polutif dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, serta kegiatan agroindustri.
- Rencana Pengembangan :
  - a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
  - c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai, dan protein hewani);
  - d. Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
  - e. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
  - f. Pengembangan energi baru terbarukan;
  - g. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
  - h. Penataan daerah otonom;
  - i. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir.

Kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah di Jawa Barat juga memperhatikan kebijakan pengembangan Jawa Barat Selatan yang mengarahkan pengembangan yang difokuskan pada sektor prioritas berbasis potensi sumberdaya lahan, pesisir dan laut, serta kebijakan pengembangan Jawa Barat Bagian Utara yang mengarahkan pengembangan yang difokuskan pada sektor prioritas berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, potensi ketersediaan infrastruktur, sumberdaya lahan pertanian pangan berkelanjutan, pesisir dan kelautan, sumberdaya manusia, dan inovasi. Selain itu kebijakan pengembangan metropolitan dan pusat pertumbuhan di Jawa Barat ditetapkan untuk mendorong perwujudan percepatan pembangunan di seluruh wilayah di Jawa Barat, yaitu :

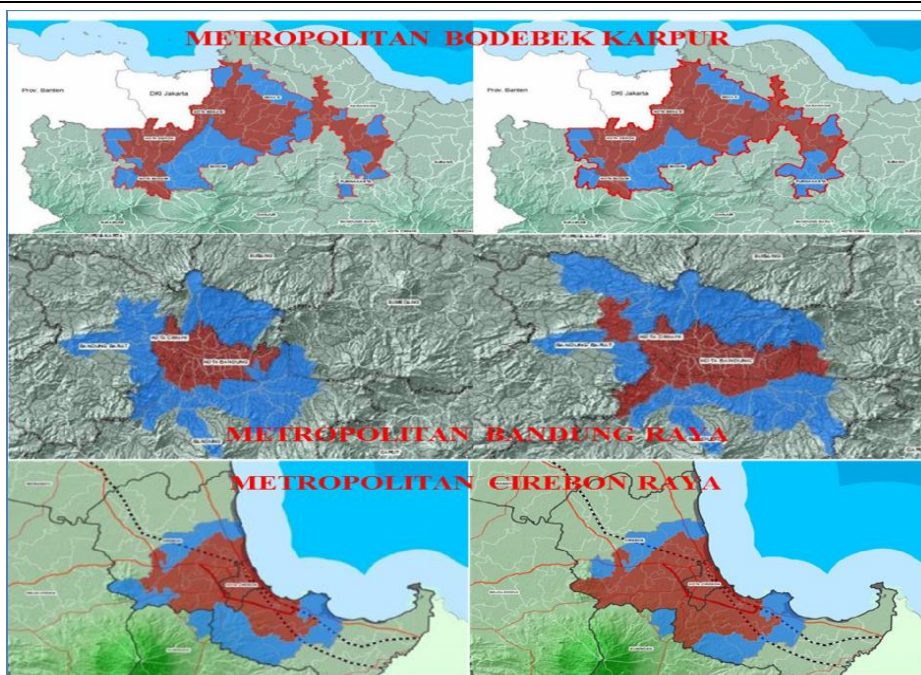
1. Metropolitan Bodebekkarapur sebagai metropolitan mandiri berbasis industri manufaktur, jasa, keuangan, serta perdagangan, hotel, restoran, dan pariwisata.

2. Metropolitan Bandung Raya sebagai metropolitan modern berbasis wisata perkotaan, industri kreatif, dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS).
3. Metropolitan Cirebon Raya sebagai metropolitan budaya dan sejarah berbasis pariwisata, industri, dan kerajinan.
4. Pusat pertumbuhan Pangandaran sebagai pusat pertumbuhan berbasis sektor pariwisata dan perikanan.
5. Pusat pertumbuhan Palabuhanratu sebagai pusat pertumbuhan berbasis sektor pariwisata dan perikanan.
6. Pusat pertumbuhan Rancabuaya sebagai pusat pertumbuhan berbasis sektor pariwisata dan perkebunan.

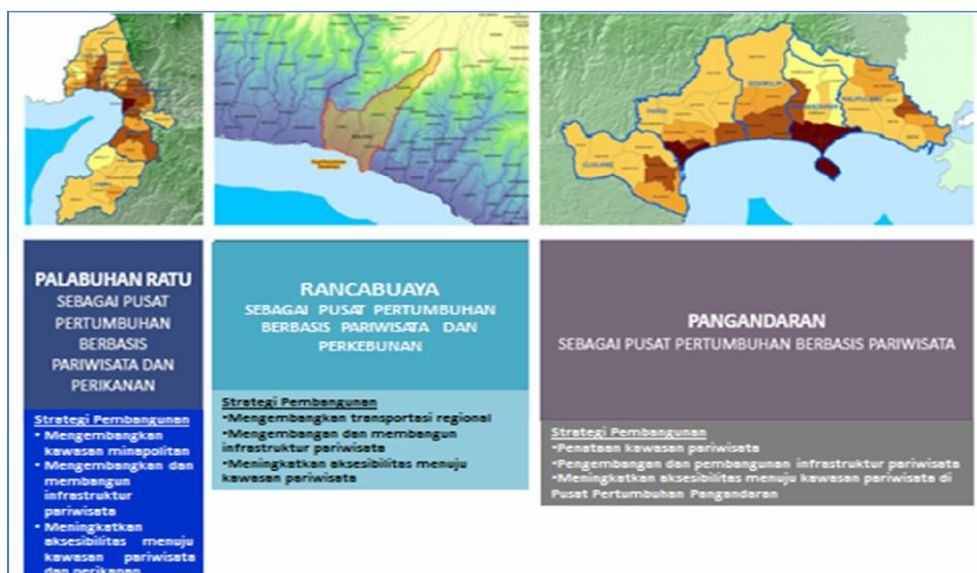
Pengembangan Metropolitan Bodebekkarpur, Bandung Raya, dan Cirebon Raya sebagai penghela pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernisasi, dan keberlanjutan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat, dan mengakselerasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur-infrastruktur strategis yang menghubungkan dan berada di wilayah metropolitan di Provinsi Jawa Barat. Metropolitan Bodebekkarpur akan dikembangkan sebagai Metropolitan Mandiri dengan menggunakan pendekatan *Twin Metropolitan Bodebek Karpur – DKI Jakarta*. Manajemen pengembangan metropolitan akan dilakukan dengan model hibrida yaitu mengkombinasikan antara manajemen pembangunan berbasis daerah otonom kabupaten/kota dengan manajemen pembangunan lintas kabupaten/kota berbasis Metropolitan dengan mengedepankan peran Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.







**Gambar 4.5.**  
**Peta Metropolitan di Jawa Barat**



**Gambar 4.6.**  
**Pengembangan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat**

Kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah diatas merupakan kebijakan berbasis spasial, yang secara sektoral dirumuskan dalam tematik kewilayahan yang berdasarkan kepada wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan (WKPP), sebagai berikut :

## **I. WKPP I (Wilayah Bogor )**

1. Mengembangkan sentra ternak sapi potong, sapi perah, ayam ras, dan unggas lokal;
2. Mengembangkan agribisnis ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar regional dan global;
3. Mengembangkan pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan varietas unggul lainnya;
4. Mengembangkan agrowisata koridor Bogor-Puncak-Cianjur; ekowisata pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhan Ratu dan mengelola cagar biosfer Cibodas
5. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru (*growth center*) Pelabuhan Ratu dan Metropolitan BODEBEK KARPUR.

## **II. WKPP II (Wilayah Purwakarta)**

1. Mengembangkan industri manufaktur;
2. Mengembangkan industri keramik dan gerabah;
3. Mengembangkan industri perberasan dan makanan, olahan berbasis bahan baku lokal, perkebunan, budidaya ikan air tawar dan air payau, serta ternak sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam ras serta unggas lokal;
4. Mengembangkan wisata sejarah dan wisata ziarah (*pilgrimage*);
5. Mengembangkan metropolitan BODEBEK KARPUR.

## **III. WKPP III (Wilayah Cirebon)**

1. Mengembangkan industri mangga gedong gincu dan industrialisasi perikanan ;
2. Mengembangkan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija;
3. Mengembangkan industri batik dan rotan, serta industri makanan olahan berbahan baku lokal;
4. Melestarikan keraton, wisata sejarah, wisata ziarah (*pilgrimage*) dan mengembangkan ekowisata;
5. Mengembangkan Metropolitan Cirebon Raya serta Kawasan BIJB dan *Aerocity* Kertajati.

## **IV. WKPP IV (Wilayah Priangan)**

1. Mengembangkan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor;
2. Mengembangkan klaster unggas, perikanan budidaya air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi potong, domba Garut, kambing, dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak;

3. Mengembangkan produksi tanaman industri (kopi, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor;
4. Mengembangkan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata;
5. Mengembangkan Metropolitan Bandung Raya, pusat pertumbuhan baru (*growth center*) Pangandaran dan Rancabuaya.

Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan provinsi mengacu pada rumusan kerjasama pembangunan wilayah perbatasan, yang meliputi :

**a. Jawa Barat dan DKI Jakarta:**

- 1) Penguatan kelembagaan dengan fokus pada revitalisasi kelembagaan BKSP Jabodetabekjur;
- 2) Penataan Ruang dengan fokus sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Jabodetabekjur;
- 3) Pengembangan transportasi regional dengan fokus pembangunan jaringan moda angkutan massal;
- 4) Penataan sumber daya air dengan fokus penataan Daerah Aliran Sungai (DAS), pengamanan air baku, serta pembangunan dan rehabilitasi situ/waduk;
- 5) Pengembangan pengelolaan persampahan dengan fokus pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;
- 6) Penanganan pendidikan dengan fokus pembangunan sarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru;
- 7) Penanganan kesehatan dengan fokus penyediaan sarana kesehatan dan penanggulangan penyakit menular;
- 8) Pengembangan ekonomi dengan fokus penetapan dan pemanfaatan kawasan ekonomi khusus;
- 9) Pengembangan agribisnis dengan fokus pembangunan rumah potong hewan regional, pelelangan ikan regional dan pasar induk regional, serta kawasan pengembangan peternakan sapi potong;
- 10) Penanganan tenaga kerja, kependudukan, dan sosial dengan fokus pembangunan sistem informasi kependudukan Jabodetabekjur dan pembangunan informasi tenaga kerja.

**b. Jawa Barat dan Jawa Tengah :**

**1) Bidang Sosial dan Pemerintahan :**

- a) Pendidikan, dengan fokus praktek kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah perbatasan, pelayanan penerimaan siswa baru, pembangunan RKB SMA/SMK dan pemberian beasiswa SMA/SMK;
- b) Kesehatan, dengan fokus kerjasama penanganan penyakit menular dan bencana, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terutama penanganan keluarga miskin, serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan khususnya untuk kesehatan ibu dan anak;
- c) Sosial, dengan fokus penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- d) Batas wilayah, dengan fokus perapatan dan perawatan pilar batas wilayah, serta pembangunan dan pemeliharaan tugu batas/gapura; dan
- e) Ketentraman dan ketertiban, dengan fokus operasi bersama Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibumtramas) serta operasi bersama penegakan Perda.

**2) Bidang Fisik :**

- a) Penataan Ruang dan Permukiman, dengan fokus koordinasi pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang kawasan strategis Jawa Tengah-Jawa Barat;
- b) Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan fokus pembangunan bendung/waduk, normalisasi serta Operasional dan Pemeliharaan (OP) sungai, rehabilitasi dan OP jaringan irigasi, konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS), dan pengadaan tanah;
- c) Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dengan fokus pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, pembangunan, penggantian dan pemeliharaan jembatan, serta pengadaan tanah;
- d) Perhubungan, dengan fokus pengembangan moda transportasi publik massal dan keberintisan.

**3) Bidang Ekonomi :**

- a) Pariwisata, dengan fokus promosi bersama pariwisata;
- b) Perdagangan, dengan fokus pelaksanaan tera dan tera ulang;
- c) Peternakan, dengan fokus penyediaan kebutuhan daging sapi lintas wilayah dan pengawasan lalu lintas ternak; dan
- d) Pertanian, dengan fokus penanganan bersama hama terpadu di wilayah perbatasan.

**c. Jawa Barat dan Banten:**

**1) Aspek Daya Saing**

- Bidang Pariwisata, dengan fokus pengembangan paket dan promosi wisata Jabar-Banten.
- Bidang UMKM, dengan fokus pengembangan pusat pemasaran dan pembinaan UMKM di wilayah perbatasan.
- Bidang Pertanian, dengan fokus penanganan hama akibat perubahan iklim, pengembangan perkebunan dan kehutanan, dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan.
- Bidang Penataan Ruang, dengan fokus integrasi penataan ruang kawasan perbatasan
- Bidang Lingkungan Hidup, dengan fokus peningkatan pemantauan kondisi lingkungan hidup, pemantauan perizinan dan pengendalian eksplorasi penambangan, serta peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bidang Perhubungan, dengan fokus pengembangan infrastruktur antar wilayah, penertiban penanganan muatan lebih lintas wilayah, peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah, dan penanganan kemacetan.
- Bidang Pekerjaan Umum, dengan fokus peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan status dan standar jalan dan jembatan, serta peningkatan infrastruktur sumberdaya air.

**2) Aspek Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum**

- Bidang Kesehatan, dengan fokus peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terutama penanganan keluarga miskin
- Bidang Pendidikan, dengan fokus peningkatan kualitas SDM terkait pelayanan mutu, dan akses pendidikan
- Bidang Sosial, dengan fokus optimaisasi penanganan masalah sosial lintas daerah
- Bidang Pemerintahan, dengan fokus penstandaran penataan dan penetapan batas wilayah.

Seluruh kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan Pusat, yang berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, yang terdiri dari 14 (empat belas) prioritas pembangunan, yaitu :

Reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan iklim usaha; energi; lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi; serta prioritas lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan; prioritas lainnya di bidang perekonomian dan prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan di daerah harus mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, yang meliputi : pro rakyat, keadilan untuk semua (*justice for all*) dan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*-MDGs). Untuk program pro rakyat, memfokuskan kepada: (a) program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga; (b) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan (c) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Program keadilan untuk semua (*Justice For All*), memfokuskan kepada : (a) program keadilan bagi anak; (b) program keadilan bagi perempuan; (c) program keadilan di bidang ketenagakerjaan; (d) program keadilan di bidang bantuan hukum; (e) program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan; dan (f) program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan.

Program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*-MDGs),memfokuskan pada : (a) program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, (b) program pencapaianpendidikan dasar untuk semua, (c) program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (d) program penurunan angka kematian anak; (e) program kesehatan ibu; (f) program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (g) program penjaminan kelestarian lingkungan hidup; (h) program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium melalui pengembangan kemitraan untuk pembangunan.

Arah kebijakan percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goals*,meliputi :

1. Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, dengan target :*pertama*, menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US\$1,00 (PPP) per kapita per hari sampai dengan 2015; *kedua*, mewujudkan kesempatan



kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda; dan *ketiga*,menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan sampai dengan Tahun 2015.

2. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua, dengan target :*pertama*, menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar.
3. Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan target :menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada Tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari Tahun 2015.
4. Program penurunan angka kematian anak, dengan target menurunkan angka kematian balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu sampai dengan Tahun 2015.
5. Program kesehatan ibu, dengan target menurunkan angka kematian ibu hingga tiga per empat sampai dengan Tahun 2015.
6. Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, dengan target :*pertama*, mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada Tahun 2015; *kedua*, mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberkolusis) hingga Tahun 2015.
7. Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup, dengan target : *pertama*, memadukan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program Nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang; *kedua*, menurunkan hingga setengah proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015; dan *ketiga*, mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada Tahun 2020.

#### **4.2. Prioritas Pembangunan Daerah**

Penetapan prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk menfokuskan rencana pembangunan di Jawa Barat dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan indikator kinerja pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Prioritas pembangunan daerah Tahun 2016 dirumuskan berdasarkan isu strategis dan target indikator pembangunan Jawa Barat Tahun 2016.



#### 4.2.1. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Penetapan isu strategis didasarkan pada situasi dan kondisi yang akan dihadapi pada Tahun 2015 dan 2016, serta mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan dan pencapaian indikator pembangunan Tahun 2013-2014.

Beberapa situasi dan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 adalah: Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), PON XIX, penanggulangan kemiskinan, *Green Province* dan pelaksanaan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan MEA pada Tahun 2015 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap semua sektor pembangunan. Hal ini dapat dilihat salah satunya dalam pergerakan pasar tenaga kerja di Indonesia, khususnya di Jawa Barat dengan semakin banyaknya tenaga kerja asing yang masuk. Oleh karena itu, sesuai dengan visi Provinsi Jawa Barat dalam RPJPD sebagai Provinsi Termaju Tahun 2025, maka pada Tahun 2016 Jawa Barat harus terus mempersiapkan diri untuk melaksanakan komitmen MEA menuju :

1. *Single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
2. Penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM);
3. Suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration* (IAI); dan
4. Integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*.

Jika Jawa Barat tidak mempersiapkan diri dengan optimal terutama dalam hal kualitas sumber daya manusia dan kualitas produk, maka akan berdampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Hal ini akan berdampak pula pada peningkatan baik jumlah pengangguran maupun jumlah keluarga miskin yang akan menjadi beban berat bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat.

Situasi khusus lainnya yang membutuhkan perhatian dan kerjasama dari seluruh stakeholder pembangunan di Jawa Barat adalah penyelenggaraan PON XIX yang akan dilaksanakan pada tanggal 9-23 September 2016. Penyelenggaraan PON XIX Tahun

2016 ini merupakan ajang pembuktian Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan misi catur sukses dalam penyelenggaraan PON XIX yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses perekonomian rakyat dan sukses administrasi di Jawa Barat. Oleh karenanya, dukungan sumber daya untuk mencapai misi catur sukses dan target Jabar Kahiji baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat menjadi sangat penting.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berinisiatif menetapkan masa depan Jawa Barat dengan skenario yang optimis menuju Jawa Barat Green Province pada tahun 2025 untuk kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. Paradigma baru dalam pola pembangunan sangat diperlukan dalam menanggapi pembangunan yang tidak berkelanjutan, yang tergambarkan dengan kerusakan dan perubahan fungsi ekologi, pencemaran dan bencana, akibat dari pertumbuhan penduduk, pembangunan, deplesi sumberdaya alam, krisis energi, dan perubahan iklim. Pada tahun 2016 Jawa Barat Green Province menuntut perwujudan yang lebih menyeluruh dan melibatkan berbagai aspek dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mewadahi persebaran dan aktivitas ekonomi dan sosial penduduk.

Kemudian berlakunya perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pemerintahan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus ditindaklanjuti dengan sinkronisasi di seluruh aspek terkait.

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi, serta hasil evaluasi pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, yaitu:

Bidang Pemerintahan: 1) Kualitas demokrasi; 2) Pemerintahan yang akuntabel dan inovatif; 3) Keamanan dan ketertiban daerah; 4) Kualitas kesejahteraan aparatur berbasis kinerja; 5) Beberapa kebijakan pascapenetapan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6) Penataan Daerah Otonom Baru; 7) Harmonisasi produk peraturan perundang-undangan daerah; 8) Pengembangan Teknologi Informasi dalam berbagai aspek; 9) Sinergitas pembangunan desa-kota; 10) Peran dan fungsi balai untuk pelayanan sosial.

Bidang Perekonomian: 1) Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat; 2) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Perikanan; 3) Pengembangan Perekonomian Wilayah Perbatasan; 4) Pengembangan Industri Wisata

Jawa Barat; 5) Ketahanan Pangan; 6) Peningkatan Investasi; 7) Peningkatan Peran dan daya saing BUMD; 8) Peningkatan Kerjasama Business to Business.

Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup: 1) Kualitas, Kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, listrik, dan persampahan); 2) Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara); 3) Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup; 4) Pengendalian dan pengawasan Penataan Ruang; 5) Alih Fungsi Lahan.

Bidang Sosial Budaya: 1) Pertumbuhan penduduk dan persebarannya; 2) Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan; 3) Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja; 4) Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana; 5) Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal; 6) Penanggulangan penduduk miskin; 7) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 8) Pembangunan pusat seni, budaya dan stadion olahraga di Kab/Kota.

Dengan memperhatikan berbagai isu strategis dan kebijakan strategi pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka tema pembangunan Jawa Barat Tahun 2016 adalah :

***“Satu Perencanaan Jabar untuk Peningkatan Daya Saing, Kemandirian dan Kesiapan dalam Persaingan Global”***

Berdasarkan tema tersebut maka arah kebijakan pembangunan Tahun 2016 memiliki sasaran utama, yaitu (a) peningkatan daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta penerapan budaya IPTEK, peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata; (b) peningkatan jumlah dan kualitas wirausahawan, peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi, serta peningkatan pembangunan ekonomi perdesaan dan regional untuk mewujudkan Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur; (c) peningkatan kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan, mewujudkan perluasan partisipasi publik, peningkatan stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peningkatan kesadaran politik dan hukum, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK; (d) peningkatan kualitas dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis; (e) peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana; (f) peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan olah raga, seni, budaya dan pariwisata; (g) peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah perbatasan provinsi

Prioritas pembangunan di berbagai bidang pada tahun 2016 yang berbasis sektoral melalui 10 (sepuluh) *Common Goals*, berbasis tematik kewilayahan, dan berbasis pembangunan wilayah perbatasan antar provinsi. Pembangunan sektoral, dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) strategi yaitu: **Pertama**, pelibatan komunitas berbasis masyarakat dengan prinsip penguatan aktor lokal (*strengthening lokal actor*); **Kedua**, integrasi seluruh potensi nyata pembangunan dan daya saing di seluruh kabupaten/kota; **Ketiga**, penerapan manajemen pemerintahan model hibrida sebagai penghela percepatan pembangunan, yaitu mengkombinasi manajemen berbasis daerah otonom Kabupaten/Kota dengan manajemen kewilayahan; **Keempat**, penguatan komitmen pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas pemerintahan; serta **Kelima**, peningkatan peran multi pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan mutu serta akuntabilitas pembangunan. Penjabaran tematik sektoral untuk 10 (sepuluh) *Common Goals* adalah sebagai berikut:

**1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan, dengan sasaran:**

- a. Menyelenggarakan pendidikan formal dasar dan menengah, dengan kegiatan tematik adalah Jabar bebas putus jenjang sekolah;
- b. Menyelenggarakan pendidikan nonformal Paket A, B, dan C plus kewirausahaan, dan keaksaraan fungsional (KF), dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas;
- c. Mengembangkan pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusif, dengan kegiatan tematik adalah Pendidikan berkebutuhan khusus;
- d. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi;
- e. Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik.

**2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, dengan sasaran:**

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada Puskesmas dan RSUD, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED, dan pemenuhan sumber daya kesehatan;

- b. Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi, dengan kegiatan tematik adalah Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak;
- c. Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjang, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Jiwa;
- d. Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan kegiatan tematik adalah Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

**3. Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku, dengan sasaran:**

- a. Meningkatnya efektivitas pergerakan orang, barang dan jasa di pusat kegiatan ekonomi, dengan kegiatan tematik adalah Penanganan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya;
- b. Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi, dengan kegiatan tematik adalah Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-Tasikmalaya serta Jabar Selatan;
- c. Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan;
- d. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi sebagai penyedia air baku serta pengendali banjir dan kekeringan, dengan kegiatan tematik adalah Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis;
- e. Terwujudnya pengembangan Kawasan Industri Terpadu dan pengembangan infrastruktur permukiman dan perumahan, dengan kegiatan tematik adalah Kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan;
- f. Terwujudnya pengembangan energi baru terbarukan, dengan kegiatan tematik adalah Jawa Barat mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik; dan
- g. Terwujudnya pengembangan penyediaan air baku, dengan kegiatan tematik adalah Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan.

**4. Meningkatkan ekonomi pertanian, dengan sasaran:**

- a. Meningkatnya produksi benih/bibit di Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional;
- b. Mengembangkan produk pertanian Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan agribisnis, *forest business*, *marine business*, dan agroindustri;
- c. Terwujudnya pengelolaan luas lahan pertanian berkelanjutan dan pengendalian stok pangan serta keanekaragaman bahan pangan pada sentra produksi, dengan kegiatan tematik adalah Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG, dan swasembada protein hewani;
- d. Terkendalinya Tingkat Kerawanan Pangan dan Kecukupan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan tematik adalah Jawa Barat bebas rawan pangan;
- e. Meningkatnya Dukungan Infrastruktur di Sentra Produksi Pangan, dengan kegiatan tematik adalah Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) disentra produksi pangan.

**5. Meningkatkan ekonomi non pertanian, dengan sasaran:**

- a. Meningkatnya perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan peningkatan kemampuan tenaga kerja, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja, dan kesempatan berusaha UMKM;
- b. Meningkatnya perbaikan iklim usaha yang kondusif untuk mempertahankan dan menumbuhkan investasi, dengan kegiatan tematik adalah Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi;
- c. Meningkatnya peran kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan skema pembiayaan alternatif;
- d. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah dan berdaya saing, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan industri manufaktur;

- e. Meningkatnya industri kreatif dan penumbuhan wirausahawan muda kreatif, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif.

**6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, dengan sasaran:**

- a. Berkurangnya kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan, dengan kegiatan tematik pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral dan non mineral.
- b. Meningkatnya luas dan fungsi kawasan lindung serta berkurangnya luasan lahan kritis, dengan kegiatan tematik adalah Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%;
- c. Meningkatnya kualitas udara dan air serta pengelolaan sampah terpadu, dengan kegiatan tematik adalah Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik, dan pengelolaan sampah regional;
- d. Meningkatnya efektivitas mitigasi dan percepatan penanganan bencana, dengan kegiatan tematik adalah Penanganan bencana longsor dan banjir.

**7. Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan, dan olahraga dengan sasaran:**

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga bertaraf internasional dan kepemudaan, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan;
- b. Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya di Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya di Jawa Barat;
- c. Meningkatnya Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya di Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat;
- d. Meningkatnya Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya di Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat;
- e. Meningkatnya Pengembangan destinasi wisata, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan destinasi wisata.

**8. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan, dengan sasaran:**

- a. Meningkatnya ketahanan keluarga dan keluarga berencana, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana;
- b. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Pengokohan Ekonomi Keluarga, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga;
- c. Meningkatnya pengelolaan kependudukan, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan pengelolaan kependudukan.

**9. Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan, dengan sasaran:**

- a. Menurunnya penduduk miskin di Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Pengurangan kemiskinan;
- b. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan sosial, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial terhadap PMKS;
- c. Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat.

**10.Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan, dengan sasaran:**

- a. Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan *Good Governance*, dengan kegiatan tematik adalah Modernisasi Pemerintahan dan profesionalisme aparatur;
- b. Meningkatnya pelayanan data informasi kepada masyarakat, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public;
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik, hukum, ketertiban, dan keamanan masyarakat serta peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan, dengan kegiatan tematik adalah Penataan sistem hukum dan penegakan hukum;



- d. Meningkatnya harmonisasi pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan, dengan kegiatan tematik adalah Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak;
- e. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Akuntabilitas Pembangunan, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan;
- f. Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintahan, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Desa.

#### **4.2.2 Program Pembangunan Daerah**

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 berjumlah 101 (seratus satu) program yang terbagi ke dalam 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, adalah sebagai berikut:

### **URUSAN WAJIB**

#### **1. Pendidikan**

- a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- b. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi;
- c. Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;
- d. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

#### **2 Kesehatan**

- a. Program Promosi Kesehatan;
- b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- c. Program Pelayanan Kesehatan;
- d. Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- e. Program Sumber Daya Kesehatan;
- f. Program Manajemen Kesehatan.

#### **3. Lingkungan Hidup**

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

- b. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;
- c. Program Pengelolaan Kawasan Lindung;
- d. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- e. Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut.

#### **4. Pekerjaan Umum**

- a. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- b. Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- d. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
- e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
- f. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya;
- g. Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai;
- h. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman;
- i. Program Pembinaan Jasa Konstruksi.

#### **5. Penataan Ruang**

- a. Program Penataan Ruang.

#### **6. Perencanaan Pembangunan**

- a. Program Kerjasama Pembangunan;
- b. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Program Penelitian, Studi, dan Survey.

#### **7. Perumahan**

- a. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

#### **8. Kepemudaan dan Olahraga**

- a. Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda;
- b. Program Pembinaan, Pemasarakatan, dan Pengembangan Olah Raga.

#### **9. Penanaman Modal**

- a. Program Peningkatan Iklim, Promosi, dan Kerjasama Investasi;
- b. Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non-Perbankan.

**10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

**11. Kependudukan dan Catatan Sipil**

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

**12. Ketenagakerjaan**

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
- c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

**13. Ketahanan Pangan**

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

**14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
- b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga.

**15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

- a. Program Pelayanan Keluarga Berencana;
- b. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

**16. Perhubungan**

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
- e. Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor.

**17. Komunikasi dan Informatika**

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

**18. Pertanian**

- a. Program Pengadaan, Penataan, dan Pengendalian Administrasi Pertanian.

## **19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

- a. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
- b. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

## **20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

- a. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;
- b. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur;
- c. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur;
- d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- f. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- g. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM;
- h. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- j. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- k. Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan.

## **21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- a. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- b. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- c. Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan;
- d. Program peningkatan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

## **22. Sosial**

- a. Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
- b. Program Pemberdayaan Sosial;
- c. Program Perlindungan Sosial;
- d. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

## **23. Kebudayaan**

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya;
- b. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya.

## **24. Statistik**

- a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

## **25. Kearsipan**

- a. Program Pengembangan Kearsipan.

## **26. Perpustakaan**

- a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

## **URUSAN PILIHAN**

### **1. Perikanan dan Kelautan**

- a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

### **2 Pertanian**

- a. Program Peningkatan Produksi Pertanian;
- b. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian;
- c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak, dan Ikan;
- d. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.

### **3. Kehutanan**

- a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

### **4 Perindustrian**

- a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- b. Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

### **5. Perdagangan**

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
- c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

### **6. Pariwisata**

- a. Program Pengembangan Destinasi Wisata;
- b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

## **7. Energi dan Sumber Daya Mineral**

- a. Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi, dan Air Tanah;
- b. Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan, dan Pemanfaatan Energi;
- c. Program Pembinaan, Pengembangan Panas Bumi dan Migas.

## **8. Ketransmigrasian**

- a. Program Pengembangan Transmigrasi;

## **9. Keagamaan**

Salah satu urusan wajib mengenai keagamaan yang merupakan kewenangan pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kotaikut berperan serta dalam penciptaan iklim kondusif, keamanan, dan kenyamanan beribadah, melalui program pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan dan Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya yang merujuk kepada beberapa pekerjaan rumah dalam membangun Jawa Barat yang masih harus dituntaskan antara lain :

- (1) Bersinergi dengan pemerintah dalam dukungan sukses implementasi program-program nasional di Jawa Barat, yang tercantum didalam, Metropolitan Priority Area, kesiapan daerah menghadapi, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai Tahun 2015, Pendidikan Menengah Universal 12 tahun, Program Pengurangan Kemiskinan, dan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- (2) Bersinergi dengan pemerintah Kabupaten/Kota melalui berbagi peran dalam skema bantuan keuangan untuk melakukan upaya khusus dalam pencapaian IPM Jawa Barat berbasis Kabupaten/Kota, mewujudkan Kawasan Lindung 45% sebagai bagian dari strategi Jabar Green Province, meningkatkan kualitas tingkat pelayanan infrastruktur dasar (kemantapan jalan, jaringan irigasi, rasio elektrifikasi rumah tangga, pemenuhan air bersih, pengelolaan sampah, dan pengendalian limbah industri), pengurangan kemiskinan dan pengangguran berbasis individu secara serentak dan bersinergi multi pihak, modernisasi layanan investasi, serta meningkatkan program pelayanan dan kemandirian bagi Masyarakat Lanjut Usia;
- (3) Sinergi Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha dalam integrasi pelayanan dasar masyarakat khususnya pendidikan dan kesehatan di kawasan industri, mendorong pelibatan dunia usaha dalam pembangunan strategis dan monumental melalui skema RAM-IP (Rencana Aksi Multipihak – Implementasi Pekerjaan);
- (4) Kerjasama pembangunan di daerah perbatasan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota berbasis desa/kecamatan dengan prinsip kesetaraan pembangunan;
- (5) Perwujudan Komitmen Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu Pembangunan Tematik Kewilayahan berbasis WKPP-I sampai dengan WKPP-IV, sebagai kegiatan pembangunan unggulan dan menjadi ikon kewilayahan pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan dan didanai bersama kabupaten/kota

melalui mekanisme seleksi dan sharing pendanaan multipihak;

- (6) Mengembangkan skema baru penanganan dan pendanaan pembangunan infrastruktur strategis melalui kerjasama Business to Business (B to B) antara lain dalam pembangunan monorel Bandung Raya dan jalan TOL;
- (7) Peningkatan akuntabilitas dan efektivitas peruntukan Bansos dan Hibah agar tepat sasaran program dan tepat penerima manfaat.

Adapun penjabarannya disajikan dalam (i) Rencana Program dan Kegiatan OPD/Biro Provinsi Jawa Barat dan (ii) Usulan Rencana Program dan Kegiatan Kategori Bantuan Keuangan, Hibah, Bantuan Sosial dan Subsidi Tahun 2016.

Mengenai penyajian Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan, serta (iii) Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Rencana Program dan Kegiatan yang Prioritas bersifat menyeluruh yaitu selain memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan didanai oleh APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan sumber pembiayaan dari APBN Tahun 2015, serta sumber pembiayaan dari partisipasi dunia usaha melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*)/TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan).

### **5.1. Rencana Program dan Kegiatan Tematik**

Rencana Program dan Kegiatan Tematik ini dikelompokkan dalam Rencana Program dan Kegiatan Tematik Sektorial serta Rencana Program dan Kegiatan Tematik Kewilayahan.



### 5.1.1. Rencana Program dan Kegiatan Tematik Sektoral

Rencana Kerja Kegiatan Tematik Sektoral merupakan rencana kerja prioritas pembangunan yang dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) *Common Goals* dengan 46 (Empat Puluh Enam) Kegiatan Tematik sektoral, sebagai berikut:

#### 1. *Common Goals* 1 **Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan**

##### a. **Sasaran 1** : Menyelenggarakan pendidikan formal menengah

##### **1) Kegiatan Tematik 1:** Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah

##### **Output :**

- a) Terwujudnya pendidikan gratis jenjang sekolah dan menengah dan sederajat
- b) Tersalurkannya Dana Bantua Pendidikan Menengah Umum ( PMU ) di Jawa Barat
- c) Terpeliharanya ruang kelas SMA/SMK atau sederajat secara efektif
- d) Terselenggaranya SMU terbuka;
- e) Tersedianya beasiswa bagi siswa sekolah menengah atas dan kejuruan dari kalangan masyarakat kurang mampu
- f) Tersedianya insentif pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK daerah terpencil dan atau perbatasan provinsi
- g) Tercapainya standar kompetensi guru
- h) Tercapainya standar akreditasi pendidikan menengah umum

##### b. **Sasaran 2:** Menyelenggarakan pendidikan nonformal Paket A, B dan C plus Kewirausahaan dan keaksaraan fungsional (KF)

##### **2) Kegiatan Tematik 2:** Peningkatan Pelayanan Pendidikan Non Formal Plus Kewirausahaan Dengan Sasaran 15 Tahun Ke Atas.

##### **Output :**

- a) Meningkatnya penduduk non usia sekolah yang menyelesaikan pendidikan non formal paket a, b dan c
- b) Terlaksananya pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
- c) Terselenggaranya pelatihan bahasa asing dan ketrampilan lainnya bagi calon tenaga kerja luar negeri

- d) Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan plus kewirausahaan.
- e) Tersedianya insentif bagi tutor dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan di daerah terpencil

**c. Sasaran 3 :** Mengembangkan pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusif

**3) Kegiatan Tematik 3 :** Pendidikan Berkebutuhan Khusus

**Output :**

- a) Tersedianya sarana pendidikan luar biasa yang memadai
- b) Terwujudnya sinergitas dan pengendalian pendidikan inklusif
- c) Terwujudnya data yang akurat dan lengkap tentang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

**d. Sasaran 4:** Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

**4) Kegiatan Tematik 4 :** Peningkatan Relevansi dan Kualitas Pendidikan Tinggi

**Output :**

- a) Tersedianya beasiswa perguruan tinggi untuk mahasiswa.
- b) Terlaksananya pengembangan iptek dan seni untuk meningkatkan daya saing jawa barat
- c) Terlaksananya penyelenggaraan kerjasama kuliah kerja nyata tematik , kerjasama penelitian dan studi

**e. Sasaran 5:** Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik

**5) Kegiatan Tematik 5 :** Peningkatan Fasilitas Pendidikan dan Kompetensi Tenaga Pendidik

**Output:**

- a) Pembangunan sarana prasarana Ruang Kelas Baru dan Ruang Kuliah Baru ( RKB ) serta revitalisasi Sarana dan prasarana pendidikan menengah dan tinggi;
- b) Terlaksananya pengembangan SDM pendidik melalui kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dan dunia usaha;

- c) Terselenggaranya Sertifikasi Kompetensi Pendidik jenjang menengah umum;

## **2. Common Goals 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan;**

- a. **Sasaran 1:** Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Serta Prasarana Kesehatan Pada Puskesmas dan RSUD

- 1) **Kegiatan Tematik 1:** Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas, Puskesmas PONED dan Pemenuhan Sumber Daya Kesehatan

### **Output:**

- a) Tersedianya Jumlah Bidan, Dokter, Dokter Gigi PTT Provinsi Sesuai Kebutuhan;
    - b) Tersedianya Insentif Bagi Dokter, Dokter Gigi dan Bidan PTT Provinsi Jawa Barat
    - c) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Rumah Sakit
    - d) Terehabilitasi dan Terlaksananya Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Kesehatan Pasca Bencana

- b. **Sasaran 2:** Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

- 2) **Kegiatan Tematik 2:** Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar Ibu dan Anak

### **Output:**

- a) Terlaksananya Gerakan Penyelamatan Masa Depan : Gizi Buruk, Posyandu, dan Penyediaan Fasilitas Perawatan Masyarakat Gakin
    - b) Terlaksananya Perlindungan Pada Ibu Hamil, Ibu Nifas, Bayi dan Anak
    - c) Terfasilitasinya Ruang Perawatan Bagi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

**c. Sasaran 3:** Terwujudnya Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang

**3) Kegiatan Tematik 3:** Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit Paru dan Rumah Sakit Jiwa

**Output:**

- a) Terfasilitasinya bagi penderita HIV AIDS, TBC, Flu Burung, Narkoba dan Kesehatan Jiwa
- b) Terlaksananya Peningkatan dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit Provinsi
- c) Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit Lansia di Jawa Barat
- d) Terlaksananya Pengembangan Klinik Lansia di Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat
- e) Terlaksananya Pengembangan Rumah Sakit Paru Provinsi
- f) Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa

**d. Sasaran 4:** Meningkatnya Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat.

**4) Kegiatan Tematik 4 :** Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

**Output :**

- a) Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular
- b) Terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi PHBS
- c) Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan KLB penyakit
- d) Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
- e) Teroptimalisasinya fungsi rujukan pelayanan kesehatan
- f) Terlaksananya upaya promotif dan preventif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

### **3. Common Goals 3 Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku**

- a. Sasaran 1:** Meningkatnya efektivitas pergerakan orang, barang dan jasa di pusat kegiatan ekonomi

**1) Kegiatan Tematik 1 :** Penanganan Kemacetan Lalu Lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya

**Output:**

- a) Terlaksananya percepatan pembangunan jalan tol strategis BIUTR dan Soreang – Pasirkoja (SOROJA).
- b) Terlaksananya percepatan pembangunan Fly Over Buah Batu, Kopo, Cimareme, dan Underpass Padalarang.
- c) Terlaksananya percepatan pembangunan jalan lintas cepat Banjaran dan Majalaya.
- d) Terlaksananya peningkatan infrastruktur transportasi ke sentra industri, sentra pertanian dan wisata.
- e) Terlaksananya pengembangan transportasi masal perkotaan di kawasan perbatasan Jabar-DKI Jakarta dan kawasan Metropolitan Bandung Raya.
- f) Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana angkutan masal di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya
- g) Tertibnya penyelenggaraan lalu lintas angkutan orang dan barang di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya melalui penyediaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.

- b. Sasaran 2:** Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi,

**2) Kegiatan Tematik 2 :** Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung - Cirebon, Cianjur – Sukabumi – Bogor, Jakarta - Cirebon, Bandung - Tasikmalaya serta Jabar Selatan

**Output:**

- a) Terlaksananya percepatan pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (CISUMDAWU), Tol Bogor –Ciawi-

- Sukabumi (BOCIMI), Tol Cimanggis – Cibitung, Tol Sukabumi – Ciranjang - Padalarang.
- b) Terlaksananya pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Tasikmalaya (CITAS).
  - c) Terlaksananya percepatan pembangunan jalan lintas cepat Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Ciamis dan Tasikmalaya
  - d) Terlaksananya peningkatan dan pelebaran jalan Kadipaten – Bts Majalengka/Indramayu – Jatibarang dan Fly Over Jatibarang
  - e) Terlaksananya pembangunan jalan Alternatif Lingkar Gentong.
  - f) Terlaksananya peningkatan jalan Cibeber – Sukanagara, Sukanagara – Sindangbarang, Bts Tangerang/Bogor – Parung dan Parung Panjang - Bunar
  - g) Terlaksananya pembangunan jalan Poros Timur Puncak Sentul-Kota Bunga dan Simpang Sukamakmur-Cariu
  - h) Terlaksananya pembangunan jalan Horisontal Poros Tengah Jonggol–Pangkalan-Purwakarta
  - i) Terlaksananya peningkatan dan pelebaran jalan vertikal Poros Timur Pangandaran–Ciamis–Cikijing-Cirebon, jalur vertikal Poros Barat Palabuhanratu - Cikidang - Cibadak - Bogor - Depok – Jakarta.
  - j) Terlaksananya pembangunan Jalur Horisontal Tengah Selatan-Selatan Jabar Selatan (Palabuhanratu - Kiaradua - Tanggeung — Cukul — Cikajang — Karangnunggal - Banjarsari –Pangandaran).
  - k) Terlaksananya peningkatan dan pelebaran jalan poros horisontal Jabar Selatan.
  - l) Terlaksananya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan *Aerocity* Kertajati
  - m) Terlaksananya pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya, Pelabuhan Laut di Palabuhanratu, Pelabuhan Laut di Pangandaran, serta pengembangan Pelabuhan Laut lainnya di Jabar Selatan dan Utara

- n) Terlaksananya pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon sebagai pintu gerbang ekonomi Jawa Barat bagian timur
- o) Terlaksananya pengembangan terminal angkutan umum regional terpadu dan modern
- p) Terlaksananya penanganan dampak sosial dan lingkungan pembangunan Waduk Jatigede
- q) Terlaksananya pengembangan Bandara Nusawiru
- r) Terlaksananya pembangunan jalur Kereta Api Stasiun Kejaksaan Cirebon – Pelabuhan Cirebon, Kadipaten – Kertajati – Arjawinangun – Cirebon, Short Cut Cibungur – Tanjung Rasa, Rancaekek – Tanjung Sari– Kertajati dan Bandung – Ciwidey,

c. **Sasaran 3:** Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan,

**3) Kegiatan Tematik 3:** Infrastruktur Jalan dan Perhubungan

**Output:**

- a) Terwujudnya kemantapan jalan provinsi diatas 97 % dan jalan kabupaten/kota diatas 75%
- b) Terlaksananya peningkatan fasilitas perhubungan (rambu, marka dan penerangan jalan umum)
- c) Pengembangan sistem transportasi darat dan perkeretaapian serta sistem transportasi masal (*Mass Rapid Transport*)
- d) Terlaksananya pengembangan sistem transportasi udara, laut, sungai, danau dan angkutan perairan lainnya
- e) Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas Lalu Lintas dan angkutan jalan di perbatasan antar Provinsi dan antar Kota/Kabupaten

d. **Sasaran 4:** Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi sebagai penyedia air baku serta pengendali banjir dan kekeringan

**4) Kegiatan Tematik 4:** Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi Strategis

**Output:**

- a) Terwujudnya kondisi baik jaringan irigasi diatas 70%
- b) Terfasilitasinya pembangunan Bendung Rengrang di Kabupaten Sumedang; Waduk Sadawarna, Waduk Kuningan, Waduk Cipanas, Waduk Matenggeng, Waduk Leuwikeris, dan Derah Irigasi Caringin
- c) Terlaksananya perlindungan dan pengelolaan situ serta mata air
- d) Terlaksananya peningkatan manajemen air untuk penanganan banjir dan kekeringan.

- e. **Sasaran 5:**Terwujudnya pengembangan infrastruktur permukiman dan perumahan

**5) Kegiatan Tematik 5:** Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Perumahan

**Output:**

- a) Terfasilitasinya pengembangan drainase perkotaan dan drainase skala metropolitan;
- b) Terfasilitasinya penyusunan rencana induk/masterplan sanitasi (limbah/sampah/drainase) kabupaten/kota
- c) Terfasilitasinya pembangunan infrastruktur dasar permukiman di daerah rawan sanitasi;
- d) Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat dalam permukiman sehat;
- e) Terlaksananya penataan kawasan permukiman kumuh;
- f) Terfasilitasinya peningkatan ketersediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR);
- g) Terfasilitasinya peningkatan ketersediaan rumah melalui pembangunan perumahan dan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);
- h) Terfasilitasinya peningkatan ketersediaan rumah melalui pembangunan hunian vertikal (rusun) di perkotaan dan kawasan rusun transit tenaga kerja;



- i) Terasilitasinya pengembangan kawasan perdesaan potensial melalui penyediaan infrastruktur permukiman;
- j) Terasilitasinya peningkatan kualitas bangunan dan lingkungan permukiman; dan
- k) Terasilitasinya ketersediaan dan peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.

f. **Sasaran 6:** Terwujudnya pengembangan energi baru terbarukan

6) **Kegiatan Tematik 6:** Jabar Mandiri Energi Perdesaan untuk Listrik dan Bahan Bakar Kebutuhan Domestik

**Output:**

- a) Terlaksananya pengembangan jaringan listrik perdesaan
- b) Terlaksananya pengembangan pemanfaatan energi alternatif perdesaan dan desa mandiri energi
- c) Terlaksananya pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan
- d) Meningkatnya upaya konservasi dan penghematan energi
- e) Terlaksananya pengembangan pemanfaatan energi panas bumi dan migas
- f) Terlaksananya pengembangan pendayagunaan potensi sumber daya mineral dan air tanah.

g. **Sasaran 7:** Terwujudnya pengembangan penyediaan air baku

7) **Kegiatan Tematik 7 :** Pemenuhan Kecukupan Air Baku dan Pengembangan Infrastruktur Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Barat

**Output:**

- a) Terasilitasinya upaya peningkatan cakupan pelayanan air minum di Metropolitan, Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.
- b) Terasilitasinya penyediaan sarana dan prasarana air bersih di perkotaan dan perdesaan terutama di wilayah rawan air minum dan wilayah tertinggal.

#### **4. Common Goals 4 Meningkatkan ekonomi pertanian;**

##### **a. Sasaran 1 : Meningkatkan produksi benih/bibit di Jawa Barat**

##### **1) Kegiatan Tematik 1: Jabar Sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional**

###### **Output:**

- a) Terwujudnya Jawa Barat menjadi penyuplai benih/bibit seluruh Indonesia
- b) Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas agro input, melalui teknologi tepat guna
- c) Terkendalinya pelestarian sumberdaya dan pemanfaatan potensi plasma nutfah
- d) Terkendalinya ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi pertanian di wilayah Jawa Barat

##### **b. Sasaran 2 : Mengembangkan produk pertanian Jawa Barat;**

##### **2) Kegiatan Tematik 2: Pengembangan Agribisnis, *Forest Business*, *Marine Business*, dan *Agroindustry***

###### **Output:**

- a) Meningkatkan nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
- b) Meningkatkan aneka usaha ekonomi produktif sekitar hutan dan pengelolaan kehutanan
- c) Meningkatkan jumlah kawasan industri pengolahan dan ketersediaan aneka produk olahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
- d) Meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam hutan
- e) Terfasilitasinya pengembangan kelembagaan kelompok tani sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
- f) Piloting penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar hutan

- c. **Sasaran 3:** Terwujudnya pengelolaan luas lahan pertanian berkelanjutan dan pengendalian stok pangan serta keanekaragaman bahan pangan pada sentra produksi.

**3) Kegiatan Tematik 3 :** Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Pemenuhan 13 Juta Ton GKG dan Swasembada Protein Hewani

**Output:**

- a) Meningkatnya lahan pertanian
- b) Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas padi
- c) Tercapainya populasi satu juta sapi dan sepuluh juta domba.
- d) Terwujudnya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian tanaman pangan dan peternakan
- e) Terwujudnya penguatan kelembagaan dan kompetensi SDM/pertanian dan peternakan
- f) Terkendalinya pasca panen dan pengolahan hasil produksi pertanian/peternakan

- d. **Sasaran 4:** Terkendalinya Tingkat Kerawanan Pangan dan Kecukupan Gizi Masyarakat

**4) Kegiatan Tematik 4:** Jawa Barat Bebas Rawan Pangan

**Output:**

- a) Terjaminnya ketersediaan pangan pokok, bahan olahan pangan
- b) Terwujudnya peningkatan penganekaragaman, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal
- c) Terfasilitasinya pemanfaatan sistem resi gudang pada sentra produksi padi.
- d) Terfasilitasinya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar dan perdagangan bahan pangan berbahaya.
- e) Terfasilitasinya distribusi pangan masyarakat
- f) Tersedianya cadangan pangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- g) Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan

- e. **Sasaran 5** : Meningkatnya Dukungan Infrastruktur di Sentra Produksi Pangan

**5) Kegiatan Tematik 5:**Meningkatnya Dukungan Infrastruktur (Jalan, Jembatan dan Irigasi) di Sentra Produksi Pangan

**Output:**

- a) Tersedianya informasi kondisi infrastruktur fisik (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan
- b) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) menuju dan di kawasan sentra produksi pangan

**5. Common Goals 5 Meningkatkan ekonomi non pertanian**

- a. **Sasaran 1:** Meningkatnya perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan kemampuan tenaga kerja

**1) Kegiatan Tematik 1:** Peningkatan Budaya Masyarakat Bekerja, Perluasan Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha UMKM

**Output**

- a) Menciptakan wirausahawan baru
- b) Meningkatnya kapasitas SDM KUMKM
- c) Meningkatnya akses teknologi tepat guna bagi kumkm
- d) Meningkatnya pemasaran dan pengembangan jaringan kumkm
- e) Pengembangan dan pendirian paviliun/gerai KUMKM Jabar

- b. **Sasaran 2** : Meningkatnya perbaikan iklim usaha yang kondusif untuk mempertahankan dan menumbuhkan investasi

**2) Kegiatan Tematik 2** : Perkuatan Peran BUMD Dalam Pembangunan dan Mewujudkan Jawa Barat Sebagai Tujuan Investasi

**Output:**

- a) Meningkatnya kontribusi keberadaan BUMD terhadap PAD per tahun
- b) Meningkatnya peran Lembaga Keuangan Non Perbankan

- c) Meningkatnya realisasi investasi (PMA + PMDN) di Jawa Barat

c. **Sasaran 3** : Meningkatnya peran kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat

**3) Kegiatan Tematik 3** : Pengembangan Skema Pembiayaan Alternatif

**Output:**

- a) Meningkatnya akses Pembiayaan bagi KUMKM melalui KCR
- b) Meningkatnya fasilitasi Pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah
- c) Meningkatnya KUMKM Berdaya Saing
- d) Meningkatnya tata Kelola Kelembagaan Koperasi

d. **Sasaran 4** : Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah dan berdaya saing

**4) Kegiatan Tematik 4** : Pengembangan Industri Manufaktur

**Output:**

- a) Berkembangnya industri-industri unggulan (industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki) dan industri potensial lainnya

e. **Sasaran 5** : Meningkatnya industri kreatif dan penumbuhan wirausahawan muda kreatif

**5) Kegiatan Tematik 5** : Pengembangan Industri Kreatif dan Wirausahawan Muda Kreatif

**Output :**

- a) Berkembangnya industri-industri unggulan (industri kreatif, industri telematika,) dan industri potensial lainnya
- b) Meningkatnya unit usaha Industri Kecil Menengah (IKM)

## **6. Common Goals 6 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan**

- a. **Sasaran 1:** Meningkatnya luas dan fungsi kawasan lindung serta berkurangnya luasan lahan kritis,

**1). Kegiatan Tematik 1:** Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Lindung 45%

**Output:**

- a) Meningkatnya pemantapan kawasan hutan di Jawa Barat
- b) Tertanggulangnya permasalahan gangguan dan perambahan kawasan hutan
- c) Terlaksananya rehabilitasi lahan di hulu DAS Besar di Jawa Barat
- d) Meningkatnya pengembangan kawasan hutan rakyat dan inisiasi menuju perspektif perdagangan karbon (carbon trade)
- e) Terkoordinasikannya kebijakan kawasan lindung, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati
- f) Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
- g) Meningkatnya pengelolaan taman hutan raya dan pengembangan hutan daerah
- h) Terlaksananya Pengembangan RTH Perkotaan
- i) Terlaksananya pengembangan *Eco-Village* (Desa Berbudaya Lingkungan) di DAS Citarum
- j) Terlaksananya pengembangan model desa konservasi di kawasan lindung
- k) Terlaksananya implementasi pengelolaan jasa lingkungan.

- b. **Sasaran 2:** Meningkatnya kualitas udara dan air serta pengelolaan limbah dan sampah terpadu

**2). Kegiatan Tematik 2:** Pengendalian Pencemaran Limbah Industri, Limbah Domestik dan Pengelolaan Sampah Regional

**Output:**

- a) Terlaksananya penanganan pencemaran secara terpadu di DAS Citarum melalui Gerakan Citarum Bestari
- b) Terlaksananya pembangunan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional di Legok Nangka di Kab. Bandung dan Nambo di Kab. Bogor
- c) Terlaksananya optimalisasi dan persiapan pasca operasionalisasi Tempat Pemrosesan Kompos (TPK) Sarimukti di Kab. Bandung Barat
- d) Terlaksananya revitalisasi TPPAS Regional Leuwigajah di Kota Cimahi dan Kab. Bandung Barat
- e) Terlaksananya penanganan air limbah domestik di PKN dan PKW melalui perluasan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah serta penyediaan instalasi pengolahan/penampungan air limbah komunal dan IPAL kawasan
- f) Terlaksananya pembinaan dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan persampahan, pengurangan timbulan sampah pada sumbernya dan meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pemanfaatan sampah
- g) Terpantaunya kualitas air sungai dan teridentifikasinya sumber-sumber pencemar di sungai-sungai strategis (Cisadane, Ciliwung, Citarum, Citanduy, Cileungsi/Bekasi, Cilamaya, Cimanuk, Cipunagara, Cibuni, Cilaki, Ciwaringin)
- h) Terpantaunya kualitas udara ambien di 10 kabupaten/kota (Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab. Purwakarta, Kab. Bandung Barat, Kab. Indramayu, Kota Bekasi, Kota Cirebon, dan Kota Bandung)
- i) Terawasinya pemanfaatan B3 dan pembuangan limbah B3 pada industri dan rumah sakit
- j) Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pengelola lingkungan

- k) Tertanganinya kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan terawasinya ketaatan industri yang telah mendapat sangsi administrasi, ADR, dan pidana
  - l) Terlaksananya pembinaan produksi bersih dan teknologi lingkungan untuk UMKM
  - m) Terlaksananya penilaian dokumen lingkungan (AMDAL) dan evaluasi izin lingkungan
  - n) Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai landasan kebijakan pembangunan daerah
  - o) Terlaksananya kampanye dan penyuluhan lingkungan
  - p) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan dalam rangka peningkatan pengawasan lingkungan.
- c. **Sasaran 3:** Meningkatnya efektivitas mitigasi dan percepatan penanganan bencana.
- 3). Kegiatan Tematik 3:** Penanganan Bencana Longsor dan Banjir
- Output:**
- a) Terlaksananya gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
  - b) Terfasilitasinya pengembangan mitigasi bencana alam geologi untuk mengurangi risiko bencana
  - c) Terlaksana dan terpantaunya implementasi rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca
  - d) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Kampung Iklim
  - e) Meningkatnya penyediaan benih/bibit tanaman hutan bersertifikat
  - f) Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Bodebekpunjur dan Kawasan Bandung Utara
  - g) Terlaksananya percepatan penanganan korban bencana alam
  - h) Terlaksananya peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana dengan bantuan *early warning system* kebencanaan.



**7. Common Goals 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olahraga**

- a. Sasaran 1:** Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana olahraga bertaraf internasional dan Kepemudaan

**1) Kegiatan Tematik 1:** Pengembangan Fasilitas Olahraga dan Kepemudaan

**Output:**

- a) Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai
- b) Tersedianya sarana dan prasarana aktivitas dan kreatifitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri

- b. Sasaran 2:** Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya di Jawa Barat

**2) Kegiatan Tematik 2:** Pelestarian Seni Budaya Tradisional dan Benda Cagar Budaya di Jawa Barat.

**Output:**

- a) Terlestarikannya seni budaya tradisional, kesejarahan, kepurbakalaan, dan museum bagi pengembangan budaya daerah.
- b) Terlindunginya situs – situs cagar budaya sebagai warisan budaya di Jawa Barat

- c. Sasaran 3:** Meningkatnya Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya di Jawa Barat,

**3) Kegiatan Tematik 3:** Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya di Jawa Barat

**Output:**

- a) Terselenggaranya pentas pengembangan dan pelestarian keragaman dan kekayaan seni budaya di Jawa Barat
- b) Terlaksananya gelar karya seni budaya kreatif daerah di Jawa Barat

**d. Sasaran 4:** Meningkatnya Pengembangan destinasi wisata 4)

**Kegiatan Tematik 4 :**Pengembangan Destinasi Wisata

**Output :**

- a) Terasilitasinya event pariwisata siap kunjung pada kawasan Objek Wisata di Jawa Barat.

**8. Common Goals 8 Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan Kependudukan**

- a. **Sasaran 1 :** Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana

**1) Kegiatan Tematik 1:** Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Program Keluarga Berencana

**Output:**

- a) Terasilitasinya Pemakaian Alat Kontrasepsi
- b) Terlaksananya Peningkatan Ekonomi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I Serta Pengembangan Bina Keluarga
- c) Terasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sebagai Motivator Ketahanan Keluarga
- d) Tersedianya Neraca Kependudukan dan Terkendalinya Penduduk Melalui KB
- e) Tersedianya Database Kependudukan
- f) Tersebaranya Informasi KB

- b. **Sasaran 2:** Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Pengokohan Ekonomi Keluarga

**2) Kegiatan Tematik 2:** Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Ekonomi Keluarga

**Output:**

- a) Terlaksananya Penerapan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender
- b) Terasilitasinya Pelayanan Lembaga Ekonomi dan Lapangan Kerja Bagi Perempuan
- c) Terasilitasinya Keterlibatan Perempuan dalam Partisipasi Politik Dan Jabatan Politik

- d) Terlindunginya Perempuan Melalui Pencegahan Kekerasan dan Perdagangan Perempuan
- e) Terfasilitasinya Lembaga-Lembaga Perlindungan terhadap Berbagai Jenis Kekerasan
- f) Tersedianya data base *Gender* dan Anak
- g) Terbentuknya Usaha Ekonomi Perempuan

**c. Sasaran 3:** Meningkatnya Pengelolaan Kependudukan

**3) Kegiatan Tematik 3:** Peningkatan Pengelolaan Kependudukan

**Output:**

- a) Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan
- b) Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan

**9. Common Goals 9 Menanggulangi Kemiskinan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Keamanan**

**a. Sasaran 1:** Meningkatkan Penurunan Penduduk Miskin Di Jawa Barat

**1) Kegiatan Tematik 1:** Pengurangan Kemiskinan

**Output:**

- a) Terfasilitasinya Bantuan Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat, Usaha Mikro dan Kecil
- b) Tersedianya Pelatihan Untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- c) Terfasilitasinya Pendampingan Usaha Untuk Kemandirian

**b. Sasaran 2:** Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial

**2) Kegiatan Tematik 2:** Peningkatan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial Terhadap PMKS;

**Output:**

- a) Terfasilitasinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Kegiatan Dalam Panti dan Luar Panti
- b) Terfasilitasinya Bantuan Kepada Korban Bencana dalam Meningkatkan Keberfungsian Sosial

- c) Terasilitasinya Para Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/Janda PKRI Dan Keluarga Pahlawan
- d) Terasilitasinya Pengembangan Fungsi Layanan Kesejahteraan Sosial

**c. Sasaran 3:** Terwujudnya Rasa Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat

**3) Kegiatan Tematik 3:** Peningkatan Ketentraman dan Keamanan Masyarakat

**Output:**

- a) Meningkatkan Jumlah Dan Kualitas Anggota Satpol PP dan Linmas
- b) Menurunnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- c) Menurunnya Jumlah Unjuk Rasa ke Tingkat Provinsi

## **10. Common Goals 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan.**

**a. Sasaran 1:** Meningkatkan kinerja aparatur dalam mewujudkan *Good Governance*

**1) Kegiatan Tematik 1:** Modernisasi Pemerintahan dan Profesionalisme Aparatur

**Output:**

- a) Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan di daerah Provinsi Jawa Barat
- b) Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah (pad), dan penggalan potensi peningkatan sumber-sumber pendapatan diluar pad (dana transfer/dana perimbangan), pemanfaatan penerbitan obligasi daerah serta optimalisasi program CSR/TJSLP bagi sektor dunia usaha di jawa barat
- c) Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan manajemen keuangan dan kekayaan daerah Provinsi Jawa Barat
- d) Tersusunnya analisis jabatan dan beban kerja
- e) Terkelolanya penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan pedoman yang ada

- f) Terfasilitasinya peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam pengadaan barang dan jasa
- g) Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (ppk) Provinsi Jawa Barat
- h) Tersusunnya data standar kompetensi jabatan yang akurat
- i) Terselenggaranya koordinasi perencanaan diklat aparatur Provinsi Jawa Barat.

**b. Sasaran 2:** Meningkatnya pelayanan data informasi kepada masyarakat

**2) Kegiatan Tematik 2:** Peningkatan Kualitas Komunikasi Organisasi dan Komunikasi Publik

**Output:**

- a) Terinformasikannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat ke Masyarakat
- b) Terselenggaranya koordinasi, komunikasi Informasi dan Kemitraan Media, dialog Interaktif masyarakat serta pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Forum Komunikasi Media Tradisional dan Pekan Informasi Nasional.

**c. Sasaran 3:** Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik, hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat serta peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan

**3) Kegiatan Tematik 3:** Penataan Sistem Hukum dan Penegakan Hukum

**Output:**

- a) Terfasilitasinya peningkatan kapasitas parpol dan masyarakat sipil serta terfasilitasinya peningkatan FKUB dan FKDM
- b) Tersusunnya produk hukum yang mengakomodasi nilai-nilai agama, kearifan lokal dan nilai-nilai hidup lainnya yang berkeadilan
- c) Tersusunnya legal opinion perkara tata usaha negara.
- d) Tersusunnya peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum dan ham

- e) Tersusunnya produk hukum sebagai pelaksanaan peraturan daerah baik dalam bentuk peraturan kepala daerah maupun keputusan kepala daerah yang bersifat penetapan (*beschikking*) atau pengaturan (*regeling*).
- f) Terdokumentasikannya peraturan perundang-undangan pusat dan daerah baik secara manual maupun secara komputerisasi

**d. Sasaran 4:** Meningkatnya harmonisasi pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan

**4) Kegiatan Tematik 4:** Kerjasama Program Pembangunan dan Pendanaan Multipihak

**Output:**

- a) Tersusunnya kerjasama pembangunan wilayah perbatasan
- b) Terselenggaranya koordinasi dan sinergitas pembangunan lintas Kabupaten/Kota di wilayah
- c) Terwujudnya batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi
- d) Terselenggara fasilitasi kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan SDM Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing berbasis kewilayahan.
- e) Terwujudnya pengembangan kerjasama pembangunan ekonomi regional antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- f) Terfasilitasinya peningkatan kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota dalam bidang ketersediaan dan kualitas infrastruktur regional di Jabar.
- g) Terfasilitasinya kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan.
- h) Tersusunnya kerjasama Provinsi dengan Kabupaten/ Kota, Provinsi dengan Provinsi lain dan Provinsi dengan pusat
- i) Terlaksananya penegasan batas wilayah Provinsi Jabar dengan Banten

**e. Sasaran 5:** Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Akuntabilitas Pembangunan

**5) Kegiatan Tematik 5:** Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Akuntabilitas Pembangunan Serta Pengelolaan Aset dan Keuangan

**Output:**

- a) Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel serta berbasis penelitian
- b) Terwujudnya sinergitas perencanaan, pengendalian program dan pengelolaan administrasi keuangan
- c) Terwujudnya upaya peningkatan kinerja OPD
- d) Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan daerah yang didukung oleh para analis kebijakan pembangunan professional
- e) Terselenggaranya koordinasi, pembinaan, monitoring dan pengendalian perencanaan pembangunan pada seluruh sektor di Jawa Barat
- f) Terselenggaranya sinergitas pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

**f. Sasaran 6:** Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintahan

**6) Kegiatan Tematik 6:** Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dan desa

**Output:**

- a) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah.

## KEGIATAN PRIORITAS (2013 – 2018)

## TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT

<b>CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jabar bebas putus jenjang sekolah</li> <li>2. Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas</li> <li>3. Pendidikan berkebutuhan khusus</li> <li>4. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi</li> <li>5. Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik</li> </ol>	<b>CG 6 Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral dan non mineral</li> <li>2. Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%</li> <li>3. Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional</li> <li>4. Penanganan bencana longsor dan banjir</li> </ol>
<b>CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PIONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan</li> <li>2. Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak</li> <li>3. Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa</li> <li>4. Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat</li> </ol>	<b>CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olah raga</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan</li> <li>2. Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya di Jawa Barat</li> <li>3. Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat</li> <li>4. Pengembangan Destinasi wisata</li> </ol>
<b>CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karup dan Bandung Raya</li> <li>2. Infrastruktur Strategis di Kondor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-Tasikmalaya serta Jabar selatan</li> <li>3. Infrastruktur jalan dan perhubungan</li> <li>4. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis;</li> <li>5. Kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan;</li> <li>6. Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik; dan</li> <li>7. Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat</li> </ol>	<b>CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana</li> <li>2. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga</li> <li>3. Peningkatan pengelolaan kependudukan</li> </ol>
<b>CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional</li> <li>2. Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry</li> <li>3. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasemboda protein hewani</li> <li>4. Jawa Barat bebas rawan pangan</li> <li>5. Meningkatkan dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan</li> </ol>	<b>CG 9 Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Keamanan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurangan Kemiskinan</li> <li>2. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS;</li> <li>3. Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat</li> </ol>
<b>CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM</li> <li>2. Perkuat peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi</li> <li>3. Pengembangan skema pembiayaan alternatif</li> <li>4. Pengembangan industri manufaktur</li> <li>5. Pengembangan industri kreatif dan kewirausahaan muda kreatif</li> </ol>	<b>CG 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas Pemerintahan dan profesionalisme aparatur</li> <li>2. Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public</li> <li>3. Penataan sistem hukum dan penegakan hukum</li> <li>4. Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak</li> <li>5. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan</li> <li>6. Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Desa</li> </ol>

**Gambar 5.1**  
**Kegiatan Tematik Sektoral Tahun 2016**

Memperhatikan prioritas di atas, maka rencana kegiatan tematik sektoral Tahun 2016 dilakukan melalui skema pembangunan meliputi:

- a. Bidang Sosial Budaya antara lain: (1) Penanganan Peralatan, Personil, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) dalam Alih kelola SMA/SMK dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi; (2) Penanganan substansi penciri kurikulum dan ekstrakurikuler dalam Alih kelola SMA/SMK dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi; (3) RKB SMA/SMK/MA negeri dan Swasta, Kobong, dan RKB/Lab Perguruan Tinggi Swasta; (4) Beasiswa Governor List (DIII, S1, S2); (5) Beasiswa Governor List (Dokter, Dokter Spesialis); (6) Beasiswa Pemuda Atlit Guru dan Tenaga Medis (PAGM); (7) Beasiswa non gelar keterampilan khusus; (8) Beasiswa Governor List (SMA/SMK/MA) mencapai 200 dari 500 siswa; (9) Pendidikan gratis SMA/SMK/MA mencapai 100% dari total sekolah negeri dan swasta pada 11 kabupaten/kota; (10) Pelatihan calon tenaga kerja; (11) Pemicuan sanitasi komunal di 1.000 lokasi (sekolah, mesjid, pesantren, dan fasilitas umum); (12) Pembangunan Puskesmas PIONED 20 unit; (13) Pembangunan Puskesmas DTP



(Dengan Tempat Perawatan) 20 unit; (14) BPJS untuk masyarakat miskin Jawa Barat; (15) Penyelenggaraan PON XIX dan Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) XV; (16) Pembangunan 10 (sepuluh) Mesjid Monumental di Kabupaten/Kota; (17) Pembangunan Gedung Pusat Seni dan Budaya Provinsi Jawa Barat di Jalan Pahlawan Kota Bandung; (18) Pembangunan Gedung Pusat Seni dan Budaya Provinsi Jawa Barat di Cikamuning Kabupaten Bandung Barat; (19) Penyelesaian stadion olahraga di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Bogor; (20) Pembangunan dan beroperasinya Geotheatre Terbuka Provinsi di Padalarang Kabupaten Bandung Barat; (21) Pembentukan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Jabar; (22) Upaya preventif di bidang pornografi, HIV/AIDS, dan narkoba; (23) Kerja sama dengan ormas berpengalaman dalam pengurangan kemiskinan; (24) Pembangunan sistem informasi dan manajemen perpustakaan berskala dunia; (25) Pengadaan server dan peralatan jaringan perpustakaan; (26) Pembangunan Panti Rujukan anak Jawa Barat berstandar Nasional; (27) Pembangunan Panti Rujukan Wredhatama Jawa Barat berstandar Nasional; (28) Bebas anak jalanan di 9 Kota; (29) Penanganan kemiskinan terpadu Jabar lintas OPD/Biro; (30) Penanganan sosio-ekonomi masyarakat eks Jatigede di tempat yang baru; (31) Bantuan pelatihan keterampilan wirausaha Lansia sebanyak 500 orang; (32) Pembangunan paviliun perawatan Lansia di 13 RSUD se Jawa Barat; (33) Penempatan advisor lptek senior pada bidang pertanian, pendidikan/pelatihan dan industri kreatif; (34) Alih status Rumah sakit Pameungpeuk Garut, Rumah sakit Jampang Kulon Sukabumi, Rumah sakit Sukanegara Cianjur menjadi Rumah Sakit Provinsi; (35) Pemicuan kesiapan masyarakat sanitasi kesehatan; (36) Pembangunan Ruang Rawat Inap di 30 Rumah Sakit Swasta; (37) Peningkatan kelas RSUD Kabupaten/Kota; dan (38) Pembangunan RSUD Pangandaran Raya.

- b. Bidang Perekonomian, antara lain: (1) Pengadaan benih ikan air tawar untuk restocking di perairan umum sebanyak 12,5 juta benih; (2) Pengadaan benih padi unggul; (3) Subsidi pupuk; (4) Rekrutmen penyuluh pertanian sebanyak 1.000 orang; (5) Pelatihan wirausahawan; (6) Pengadaan traktor sebanyak 3.000 unit; (7) Pematangan lahan untuk sawah seluas 10.000 Ha; (8) Penyusunan Rencana Besar Destinasi Wisata Dunia; (9) Pembangunan objek wisata siap kunjung mencapai 9 (sembilan) lokasi; (10) Penyediaan dana Kredit Cinta Rakyat (KCR) mencapai 500 milyar; (11) Revitalisasi Spesifik Pasar Rakyat Sehat tahap III sebanyak 27 pasar;

(12) Pembangunan lumbung padi sebanyak 1.000 unit; (13) Bantuan pengadaan gabah kering sebanyak 1.000 ton; (14) Penyusunan rencana besar pembangunan tematik kewilayahan; (15) Pembelian kapal motor ukuran 29 GT sebanyak 50 unit di Pantai Selatan Jawa Barat; (16) Pembelian kapal motor ukuran 10 GT sebanyak 150 unit di Pantura Jawa Barat; (17) Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cisolok Sukabumi, PPI Jayanti Cianjur, PPI Nusamanuk Tasikmalaya, PPI Cilauteureun Garut, dan PPI Cikidang Pangandaran; (18) Penyediaan benih unggul kopi Java Preanger sebanyak 3 juta pohon; (19) Penyertaan modal untuk BUMD Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan BIJB Kertajati, Aerocity Kertajati, Pembangunan Jalan Tol Ciawi - Sukabumi, Tol Sukabumi – Ciranjang; Tol Ciranjang-Padalarang; Tol Cileunyi –Tasikmalaya sebesar 100 milyar; (20) Kerja sama BUMD dengan Perusahaan Swasta Dalam dan Luar Negeri; (21) Penyediaan dana korateral untuk bisnis BUMD sebanyak 5 (lima) BUMD dengan nilai 200 milyar; (22) Pembangunan dan beroperasinya 5 (lima) gedung Cabang Dinas Pendapatan; dan (23) Pembelian Saham.

c. Bidang Pemerintahan, antara lain: (1) Peningkatan bandwidth di 25 OPD Provinsi Jawa Barat; (2) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni mencapai 60.000 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di perdesaan; (3) Pembangunan infrastruktur desa dan perdesaan tahap III; (4) Revitalisasi Posyandu Tahap III sebanyak 50.000 unit; (5) Pengadaan komputer dan jaringan internet seluruh desa (Desa Online); (6) Penyusunan Peraturan pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa; (7) Perbaikan Balai Desa; (8) Pembangunan mesjid desa; (9) Pembangunan Pasar Desa; (10) Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi; (11) Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 di 94 OPD/Biro dan UPTD/Balai; (12) Pendidikan 3 (tiga) Bahasa asing untuk 100 orang bagi PNS; (13) Revitalisasi UPTD/Balai Tahap III sebanyak 50 UPTD/Balai; (14) Sertifikasi aset tanah sebanyak 1.000 persil; (15) Pelaksanaan Bina Bakti Lingkungan UPTD/Balai Provinsi; (16) Pembangunan lanjutan/renovasi Asrama Diklat Cipageran; (17) Pengadaan server untuk e-archive di 58 OPD/Biro

d. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan, antara lain: (1) Revisi Perda RTRW Provinsi Jawa Barat; (2) Dukungan penyusunan RDTR untuk 15 kabupaten/kota; (3)

Penetapan sebaran area Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); (4) Operasionalisasi Badan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat; (5) Revisi Perda RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018; (6) Perencanaan 3 (tiga) Metropolitan dan 3 (tiga) Pusat Pertumbuhan; (7) Penanganan Citarum Bestari mencapai km 60; (8) Pembangunan instalasi pemantau real time kualitas udara 27 kabupaten/kota dan kualitas air pada 5 (lima) sungai utama (Ciliwung, Citarum, Cimanuk, Citanduy dan Cilaki); (9) pembebasan lahan jalan akses non toll ke BIJB Kertajati (10) Pembebasan Lahan Jalan Lingkar Sukabumi (Segmen 1 dan Segmen 3); (11) Pembangunan Jalan Lingkar Kuningan (Caracas – Sampora-Panawuan-Garatengah); (12) pembebasan lahan Jalan Lingkar Tasik mencapai 25%; (13) pembangunan jalan lingkar Banjaran Kabupaten Bandung; jalan lingkar Ciamis; Jalan Kadungora – Leles; (14) Pembebasan lahan jalan horisontal poros tengah Jatiluhur Purwakarta – Jonggol (Cariu) – Simpang Sukamakmur; (15) Pembebasan lahan jalan poros timur Jonggol Cariu – Simpang Sukamakmur – Sentul - Kota Bunga Cipanas; (16) Pengadaan lahan jalan tol Cileunyi – Tasikmalaya; (17) Pembangunan infrastruktur berskala metropolitan; (18) Perencanaan Pembangunan jalan alternatif/lingkar Cisewu-Rancabuaya ( $\pm$  55 km); (19) Pembangunan jembatan rawayan sebanyak 50 unit; (20) Elektrifikasi Rumah Tangga mencapai minimal sebanyak 86.000 rumah tangga; (21) Pembangunan BIJB Kertajati sisi udara mencapai 80% dan pembangunan sisi darat mencapai 60%; (22) Dukungan penertiban lahan PT KAI untuk reaktivitasi jalur Kereta Api Rancaekek – Tanjungsari, dan jalur Kadipaten – Cirebon, serta pembebasan lahan untuk pembangunan jalur Kereta Api Tanjungsari – Kertajati – Kadipaten; (23) Penyediaan fasilitas lalu lintas pada jalan provinsi mencapai 1.500 km; (24) Rencana Induk 3 (tiga) Metropolitan dan 3 (tiga) Pusat Pertumbuhan; (25) Masterplan Bidang Transportasi dan Permukiman di 3 (tiga) Metropolitan dan 3 (tiga) Pusat Pertumbuhan; (26) Pembangunan dan beroperasinya air strip di 4 (empat) lokasi (Pangandaran, Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, Rancabuaya Kabupaten Garut, dan Cidaun Kabupaten Cianjur); (27) Pembangunan sanitasi Jabar sebanyak 1.000 unit meliputi sanitasi komunal di: sekolah, pesantren, mesjid, objek wisata, dan pasar/terminal; (28) Dimulainya pembangunan TPPAS Regional Legoknangka dan TPPAS Nambo; (29) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni mencapai 15.000 RTS di kelurahan; (30) Pembebasan lahan Kawasan Terpadu Growth Center Rancabuaya (GCRB) seluas 25 Ha; (31) Pembangunan drainase pada jalan provinsi mencapai 1.000 km; (32) Pembangunan

Jaringan Irigasi untuk dukungan Cetak sawah baru seluas 6.000 Ha di Daerah Irigasi (DI) Caringin; (33) Pembebasan lahan pembangunan Waduk Cileuweung Kuningan; (34) Pembebasan lahan pembangunan Jaringan Irigasi Rengrang Kabupaten Sumedang 14 km; (35) Rehabilitasi daerah irigasi kewenangan provinsi untuk meningkatkan kondisi jaringan irigasi baik 72%; (36) Pembangunan dan pengamanan Mata Air Citarum Hulu; (37) Pengerukan 5 (lima) Situ di DAS Citarum; (38) Rehabilitasi lahan kritis pada 4 (empat) DAS utama (Ciliwung, Citarum, Cimanuk, Citanduy); (39) Pembangunan Gardu Pandang di Ruas Jalan Cukul- Cisewu - Rancabuaya (Bukit Lolongokan dan Batu Karut)

### **5.1.2. Rencana Program dan Kegiatan Tematik Kewilayahan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018, bahwa salah satu upaya untuk melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat serta pemerataannya secara berkelanjutan, dilaksanakan melalui penetapan kegiatan tematik kewilayahan, yaitu konsentrasi pembangunan berbasis potensi strategis daerah dan wilayah sebagai ikon (penciri). Pembagian konsentrasi tematik kewilayahan didasarkan pada Wilayah Koordinasi Pemerintahan Pembangunan (WKPP) yaitu sebagai berikut:

- a. WKPP I (BOGOR) dengan ikon : (1) Pengembangan sentra ternak sapi potong, sapi perah, ayam ras dan unggas lokal; (2) Pengembangan agribisnis ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar regional dan global; (3) Pengembangan pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan varietas unggul lainnya; (4) Pengembangan agrowisata koridor Bogor-Puncak-Cianjur; ekowisata pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhanratu dan mengelola cagar biosfer Cibodas.
- b. WKPP II (PURWAKARTA) dengan ikon: (1) Pengembangan industri manufaktur, (2) Pengembangan industri keramik dan gerabah, (3) Pengembangan industri perberasan dan makanan olahan berbasis bahan lokal, perkebunan dan perikanan, budidaya ikan air tawar dan air payau serta mangrove; (4) Pengembangan wisata sejarah dan wisata ziarah (pilgrimage).
- c. WKPP III (CIREBON) dengan ikon : (1) Pengembangan industri mangga Gedong Gincu dan industrialisasi perikanan, (2) Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija, (3) Pengembangan industri batik dan rotan serta industri makanan

olahan berbahan baku lokal, (4) Pelestarian Keraton, wisata sejarah, wisata ziarah (pilgrimage), dan pengembangan ekowisata.

- d. WKPP IV (PRIANGAN) dengan ikon : (1) Pengembangan Kawasan Pendidikan dan Riset Terpadu di Jatinangor; (2) Pengembangan klaster unggas, perikanan budidaya air tawar dan tangkap, ternak sapi perah, sapi potong, domba Garut dan kambing, serta pengembangan sentra produksi pakan ternak; (3) Pengembangan produksi tanaman industri (kopi, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor; (4) Pengembangan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata;

### **5.1.3 Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat**

Pengembangan metropolitan dan pusat pertumbuhan merupakan strategi percepatan pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang dilaksanakan melalui penerapan sistem pemerintahan model hybrid, yaitu mengkombinasikan pembangunan daerah berbasis kabupaten/kota dan pembangunan daerah berbasis lintas kabupaten/kota (3 metropolitan dan 3 pusat pertumbuhan). Tiga metropolitan bertindak sebagai penghela pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, modernisasi dan keberlanjutan pembangunan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Tiga metropolitan tersebut adalah: (1) Metropolitan Bodebek Karpur, meliputi Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kab.Karawang, dan Kab. Purwakarta, dengan jumlah penduduk mencapai 14.3 juta jiwa (2015); (2) Metropolitan Bandung Raya, meliputi: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung, dan Kab. Sumedang, dengan jumlah penduduk mencapai 9,9 juta jiwa (2015); (3) Metropolitan Cirebon Raya, meliputi Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, dan Kab. Indramayu, dengan jumlah penduduk mencapai 2,4 juta jiwa (2015).

Implementasi kebijakan kegiatan tematik kewilayahan membutuhkan upaya penguatan kerja sama multi pihak, baik antarpemangku kepentingan pembangunan, khususnya antarstruktur pemerintahan, yang sejalan dengan strategi kunci dalam pembangunan berbasis kewilayahan, yaitu sistem pemerintahan model hybrid.

Untuk meraih sukses implementasi pelaksanaan pembangunan, telah ditetapkan penugasan khusus kepada Para Asisten Sekda untuk Program Unggulan Provinsi Jawa Barat (SK Gubernur No. 500/Kep.66-org/2014); penugasan khusus kepada Para Kepala BKPP Wilayah I - IV untuk Program Tematik Kewilayahan (SK Gubernur No.

650/Kep.1655-Bappeda/2014); serta penugasan khusus kepada Badan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan bagi suksesnya pembangunan metropolitan dan pusat pertumbuhan di Jawa Barat (Perda No. 12 Tahun 2014).

## **5.2 Rencana Program dan Kegiatan *Non Common Goals* (Non Tematik)**

Rencana kerja *Non-Common Goals* adalah merupakan rencana kerja penunjang yang dikategorikan bukan merupakan kegiatan prioritas pembangunan. Rencana kerja *Non-Common Goals* diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung operasional dan peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Kegiatan yang termasuk dalam lingkup *Non-Common Goals* adalah kegiatan tetap dan mengikat (*fixed cost*) dan kegiatan rutin (*regular cost*). Cakupan kegiatan tetap dan mengikat yaitu kegiatan yang harus dialokasikan oleh OPD karena merupakan kebutuhan dasar untuk operasional dan penunjang kinerja. Sedangkan kegiatan rutin adalah kegiatan yang merupakan tugas fungsi OPD dan bukan kegiatan unggulan namun akan berdampak luas apabila tidak dilaksanakan.

Dalam Matriks Rencana Kerja *Non Common Goals* ini juga memuat rincian kegiatan dari 96 program pembangunan Provinsi Jawa Barat yang mengacu kepada RPJMD 2013 - 2018 dan sudah dituangkan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah baik Urusan Wajib dan Pilihan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Matrik Rencana Kerja yang pendanaannya bersumber dari APBN merupakan penjabaran program dan kegiatan yang mengacu kepada Prioritas Program dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015.

Status kegiatan pada RKPD ini masih bersifat sementara dan dapat mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **5.3. Matrik Rencana Program dan Kegiatan**

Matrik Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 merupakan penjabaran dari uraian substansi yang dijelaskan dalam sub bab 5.1 dan 5.2. Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan tersebut diuraikan pada lampiran (berupa CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan judul Rencana Program dan Kegiatan OPD/Biro Provinsi Jawa Barat serta matrik usulan program dan kegiatan kategori Bantuan Keuangan, Hibah, Bantuan Sosial dan Subsidi Tahun 2015 yang alokasi pendanaannya diusulkan dari APBD Provinsi Jawa Barat.

Tabel 5.1.

## Rekapitulasi Usulan Program Dan Kegiatan OPD/BIRO Pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

No	OPD/BIRO	RANCANGAN AWAL	
		Kegiatan	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan	100	594.565.030.800
2	Dinas Kesehatan	40	40.177.960.192
3	Rumah Sakit Jiwa	10	12.850.000.000
4	Rumah Sakit Paru	12	20.629.500.000
5	Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan	11	133.047.290.000
6	Dinas Bina Marga	52	2.449.371.144.700
7	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	92	910.558.692.448
8	Dinas Perumahan Dan Perumahan	52	457.405.037.872
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	95	47.641.949.952
10	Dinas Perhubungan	61	1.054.792.679.000
11	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	44	59.850.000.000
12	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	33	61.007.000.192
13	Dinas Sosial	88	100.498.000.192
14	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	178	408.170.483.680
15	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	33	177.339.630.816
16	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu	24	29.529.999.872
17	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	183	241.645.395.568
18	Dinas Olah Raga Dan Pemuda	58	869.634.525.824
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24	17.730.000.000
20	<b>Sekretariat Daerah</b>		



No	OPD/BIRO (2)	RANCANGAN AWAL	
		Kegiatan (3)	Anggaran (Rp.) (4)
a.	Biro Pemerintahan Umum	22	12.138.353.248
b.	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	15	7.399.080.016
c.	Biro Hukum dan HAM	15	21.185.489.008
d.	Biro Perekonomian	7	5.877.749.000
e.	Biro Investasi dan BUMID	1	700.000.000
f.	Biro Administrasi Pembangunan	11	8.813.000.128
g.	Biro Pelayanan Sosial Dasar	27	13.700.000.000
h.	Biro Pengembangan Sosial	28	35.760.000.000
i.	Biro Organisasi	22	11.150.000.000
j.	Biro Keuangan	0	0
k.	Biro Pengelolaan Barang Daerah	20	177.999.998.976
l.	Biro Humas Protokol dan Umum	69	329.559.999.744
21	Sekretariat DPRD	11	122.256.668.416
22	Dinas Pendapatan Daerah	412	652.871.511.600
23	Inspektorat	13	28.346.770.936
24	Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I	29	11.449.999.872
25	Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II	35	9.682.390.752
26	Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III	33	16.265.810.112
27	Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV	41	17.041.350.048
28	Badan Kepegawaian Daerah	44	73.319.049.392
29	Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	32	182.374.996.928
30	Kantor Perwakilan Pemerintahan	14	85.876.085.336

No	OPD/BIRO	RANCANGAN AWAL	
		Kegiatan	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
31	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	15	7.517.500.000
32	Badan Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK	40	25.475.000.000
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28	26.766.499.968
34	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0
35	Sekretariat KORPRI	42	15.961.500.032
36	Badan Ketahanan Pangan Daerah	31	60.562.295.000
37	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	30	52.294.085.128
38	Dinas Komunikasi Dan Informatika	33	72.928.849.728
39	Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	52	118.223.967.264
40	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	81	609.323.473.032
41	Dinas Perkebunan	44	69.100.000.256
42	Dinas Peternakan	109	93.202.763.400
43	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan	24	66.206.316.000
44	Dinas Kehutanan	46	98.164.503.648
45	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	95	195.842.456.224
46	Dinas Perikanan Dan Kelautan	79	211.314.927.744
47	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	145	170.092.270.152
	<b>Jumlah</b>	<b>2.948</b>	<b>11.427.290.975.528</b>

Tabel 5.2.

## Rekapitulasi Usulan Program Dan Kegiatan Kabupaten/Kota Pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

No	KABUPATEN / KOTA	RANCANGAN AWAL		KETERANGAN
		Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bogor	63	552,638,461,000	Belum diverifikasi oleh OPD/BIRO Provinsi
2	Kabupaten Sukabumi	0	0	-
3	Kabupaten Cianjur	21	146,687,171,000	6 Kegiatan sudah diverifikasi OPD/Biro Provinsi
4	Kabupaten Bandung	17	687.700.000.000	Belum diverifikasi oleh OPD/BIRO Provinsi
5	Kabupaten Garut	58	625,324,137,000	Belum diverifikasi oleh OPD/BIRO Provinsi
6	Kabupaten Tasikmalaya	162	2,185,090,331,000	19 Kegiatan sudah diverifikasi OPD/Biro Provinsi
7	Kabupaten Ciamis	79	295,081,750,400	5 Kegiatan sudah diverifikasi OPD/Biro Provinsi
8	Kabupaten Kuningan	50	363,963,552,000	6 Kegiatan sudah diverifikasi OPD/Biro Provinsi
9	Kabupaten Cirebon	36	394.870.665.300	7 Kegiatan sudah diverifikasi OPD/Biro Provinsi
10	Kabupaten Majalengka	43	94,933,288,500	3 Kegiatan sudah diverifikasi OPD/Biro Provinsi
11	Kabupaten Sumedang	119	583,779,779,000	10 Kegiatan sudah diverifikasi OPD/Biro Provinsi
12	Kabupaten Indramayu	20	97,229,999,000	5 Kegiatan sudah diverifikasi OPD/Biro Provinsi
13	Kabupaten Subang	72	226,126,500,000	4 Kegiatan sudah diverifikasi OPD/Biro Provinsi
14	Kabupaten Purwakarta	1	100.000.000	Belum diverifikasi oleh OPD/BIRO Provinsi
15	Kabupaten Karawang	22	190,766,480,000	Belum diverifikasi oleh OPD/BIRO Provinsi
16	Kabupaten Bekasi	0	0	-
17	Kabupaten Pangandaran	46	266,185,694,000	Belum diverifikasi oleh OPD/BIRO Provinsi
18	Kabupaten Bandung Barat	0	0	-

No	KABUPATEN / KOTA	RANCANGAN AWAL		KETERANGAN
		Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	Kota Bogor	6	166.047.590.000	Belum diverifikasi oleh OPD/BIRO Provinsi
20	Kota Sukabumi	3	26.900.000.000	1 Kegiatan sudah diverifikasi OPD/Biro Provinsi
21	Kota Bandung	57	366.261.154.000	2 Kegiatan sudah diverifikasi OPD/Biro Provinsi
22	Kota Cirebon	15	160.156.080.500	Belum diverifikasi oleh OPD/BIRO Provinsi
23	Kota Bekasi	19	358.300.000.000	Belum diverifikasi oleh OPD/BIRO Provinsi
24	Kota Depok	29	1.837.216.754.100	Belum diverifikasi oleh OPD/BIRO Provinsi
25	Kota Cimahi	42	473.637.600.000	12 Kegiatan sudah diverifikasi OPD/Biro Provinsi
26	Kota Tasikmalaya	166	942.610.349.000	12 Kegiatan sudah diverifikasi OPD/Biro Provinsi
27	Kota Banjar	22	58.200.000.000	1 Kegiatan sudah diverifikasi OPD/Biro Provinsi
<b>Jumlah</b>		<b>1.168</b>	<b>11.099.807.335.800</b>	

## Catatan :

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur No 52 Tahun 2014, bahwa usulan kegiatan kategori Bantuan Keuangan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh OPD/Biro Provinsi terkait, sehingga Bappeda Provinsi belum dapat melakukan seleksi terhadap usulan kabupaten/kota.

Tabel 5.3.  
Rekapitulasi Usulan Program Dan Kegiatan Berdasarkan Pengguna Sistem RKPDJabar Online 2101  
Pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

No	Pengguna	Jumlah			Keterangan
		Pengusul	Kegiatan (Buah)	Anggaran (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Akademisi	0	0	0	-
2	Desa	8 Desa	27	5.237.273.520	-
3	Reses DPRD	0	0	0	-
4	Komunitas	0	0	0	-
5	Dunia Usaha	0	0	0	-
6	Umum	4 Orang	4	2.796.709.500	-
<b>JUMLAH</b>			<b>31</b>	<b>8.033.983.020</b>	<b>-</b>



## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 . Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016. RKPD Tahun 2016 merupakan upaya memantapkan Pembangunan secara menyeluruh.

Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2016, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian 10 (sepuluh) tujuan bersama Common Goals dan Non Common Goals. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam Melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2016, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan seluruh pelaku pembangunan di Jawa Barat wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta sinergis
2. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi dunia usaha, komunitas dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperanserta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
3. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh OPD, BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2015. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2015 menjadi dasar bahan penyusunan RKPD Tahun 2016.

4. Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2016 dan penyelenggaraan MUSRENBANG serta Forum OPD Tahun 2016, mengacu pada peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintah daerah, melalui MUSRENBANG di tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tingkat Nasional, perlu ditingkatkan kualitasnya.

5. RKPD Tahun 2016 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

## **6.2. Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan RKPD Tahun 2016, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam menyusun RAPBD Tahun 2016, RKPD Tahun 2016 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Barat.
2. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap OPD/BIRO harus menyusun dan membuat RENJA OPD/BIRO masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2017
3. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan, difasilitasi melalui mekanisme RKPD Jabar Online 2101, Forum OPD serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodasi.
4. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap OPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2016, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya



secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Gubernur, melalui Biro Administrasi Pembangunan, Biro Keuangan dan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.

5. Secara proaktif, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, wajib melakukan pengendalian dan monitoring pelaksanaan RKPD Tahun 2016 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing OPD/Biro dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur.

